



**KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG PENGETAHUAN HUTAN
KONSERVASI BAGI MASYARAKAT SUKOMADE**

*(SOCIAL CONSTRUCTION OF THE KNOWLEDGE CONCERNING FOREST
CONSERVATION OF SUKOMADE PEOPLE)*

SKRIPSI

Oleh:

**Sultan Ahmad Afandi
NIM. 130910302042**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG PENGETAHUAN HUTAN
KONSERVASI BAGI MASYARAKAT SUKOMADE**

*(SOCIAL CONSTRUCTION OF THE KNOWLEDGE CONCERNING FOREST
CONSERVATION OF SUKAMADE PEOPLE)*

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sosiologi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial.

Oleh:

**Sultan Ahmad Afandi
NIM. 130910302042**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Martumi Nurhayati, Ayahanda Afandi dan Kakakku Niken Prah Utami;
2. Guru – guruku dan para pelatihku sejak taman kanak – kanak sampai dengan perguruan tinggi;
3. Kebanggaan di Program Studi Sosiologi dan almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
4. Para Aktivistis lingkungan hidup dan seluruh para relawan.



MOTTO

“...dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul – betul kamu orang yang beriman.” QS. Al A’raf (7)¹



¹Tim Al - Mizan. 2014. Al – alim Al – Qur’an dan Terjemahannya Edisi Ilmu Pengetahuan. Bandung : Al – Mizan Publishing House.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

nama : Sultan Ahmad Afandi

NIM : 130910302042

menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “Konstruksi Sosial Tentang Pengetahuan Hutan Konservasi Bagi Masyarakat Sukomade” adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Desember 2017

Yang menyatakan,

Sultan Ahmad Afandi

NIM 130910302042

SKRIPSI

**KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG PENGETAHUAN HUTAN
KONSERVASI BAGI MASYARAKAT SUKOMADE**

diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sosiologi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial.

Sultan Ahmad Afandi
NIM. 130910302042

Pembimbing: Dr. Maulana Surya Kusumah, M.Si.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Konstruksi Sosial Tentang Pengetahuan Hutan Konservasi Bagi Masyarakat Sukamade” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada :

Hari/ tanggal : Kamis, 22 Februari 2018
Jam : 09.00 WIB s.d selesai.
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Drs. Joko Mulyono, M.Si.
NIP. 196406201990031001

Dr. Maulana Surya Kusumah, M.Si
NIP. 196505131990021001

Anggota I

Anggota II

Hery Prasetyo, S. Sos, M.Sosio
NIP. 198304042008121003

Lukman Wijaya Baratha, S.Sos, MA
NIP. 760016803

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Konstruksi Sosial Tentang Pengetahuan Hutan Konservasi Bagi Masyarakat Sukomade, Sultan Ahmad Afandi, 130910302042. Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Jember.

Deforestasi merupakan ancaman nyata terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat di Bumi. Usaha deforestasi dikaitkan dengan usaha masyarakat yang menjadi korban dalam kondisi tertentu sebagai wujud usaha strategi bertahan hidup. Sehingga dimunculkanlah usaha konservasi yang mengarah kepada pemanfaatan pada lahan konservasi. Sebagai pengetahuan dasar tentang konservasi, masyarakat Sukamade sebagai masyarakat perkebunan menilai bahwa kawasan konservasi hanyalah hutan yang tidak boleh dimasuki. Pengetahuan tersebut merupakan produk klasik tentang usaha membangun pengetahuan dan konstruksi sosial di masa lalu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan, mendeskripsikan dan menganalisis usaha pembangunan pengetahuan dan konstruksi masyarakat Dusun Sukamade tentang konservasi yang berpengaruh terhadap analisa deforestasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi langsung, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menghasilkan 3 temuan yaitu: pertama, pembangunan pengetahuan tentang konservasi melibatkan pihak Taman Nasional, perkebunan dan masyarakat lokal. Pembangunan pengetahuan tentang konservasi kepada masyarakat Dusun Sukamade meliputi tentang peraturan – peraturan konservasi. Dari pembangunan pengetahuan terhadap konservasi, masyarakat diharapkan memahami pentingnya konservasi dan pelestarian. Selain pembangunan pengetahuan dan pemahaman tentang konservasi, terdapat pula kontrol dan pengawasan dalam pelaksanaan konservasi. Kontrol dan pengawasan tersebut melibatkan dari 3 stakeholder yaitu Taman Nasional Merubetiri, Perkebunan PT Sukamade dan masyarakat. Kedua, tindakan sosial masyarakat Sukamade terhadap upaya konservasi. Tindakan sosial masyarakat meliputi tindakan kooperatif dan tindakan pelanggaran. Tindakan asosiatif masyarakat yaitu sikap kooperatif untuk tidak melakukan pelanggaran. Tindakan positif yaitu munculnya nilai – nilai masyarakat dalam Dusun Sukamade dalam menjaga hutan mereka sendiri dari pihak luar sehingga menumbuhkan kesadaran baru dan menekan angka pelanggaran

dalam kawasan. Tindakan - tindakan pelanggaran yaitu berburu satwa, *illegal logging*, dan ancaman pembukaan lahan untuk pertanian. Kecenderungan tindakan sosial disosiatif saat ini masih sedang, karena melihat waktu masyarakat yang tidak seluruhnya dihabiskan bekerja di perkebunan sehingga praktek untuk melakukan pelanggaran masih tetap ada. Ketiga, fungsi ekonomi dalam usaha pelestarian hutan. Menjaga kelestarian hutan dengan nilai – nilai konservasi sebagai fungsi pengawetan dan pemanfaatan merupakan bentuk orientasi ekonomi yang terkandung dalam nilai konservasi. Hutan yang lestari memiliki motif nilai ekonomi yang lebih tinggi daripada sekedar membuka lahan untuk komoditi dan produksi. Masyarakat menyadari kekayaan yang dimiliki Merubetiri khususnya kawasan Sukamade. Sehingga dengan kekayaan itu masyarakat dapat hidup berdampingan dan memanfaatkan sumberdaya seperlunya dengan bijak untuk tetap memiliki kekayaan alam dan kelestarian sebagai bentuk pemahaman terhadap nilai konservasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Konstruksi Sosial Tentang Pengetahuan Hutan Konservasi Bagi Masyarakat Sukamade*. Penulis secara pribadi ingin mendedikasikan tulisan ini sebagai wujud penghormatan kepada seluruh relawan lingkungan dan kebencanaan yang tersebar di penjuru negeri. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Dr. Maulana Surya Kusumah, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk diskusi dan arahan untuk penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Baiq Lily Handayani, S.Sos, M.Sosio selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan;
3. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Bapak Drs. Joko Mulyono M.Si selaku Ketua Program Studi Sosiologi sekaligus sebagai ketua dosen penguji;
5. Hery Prasetyo, S.Sos, M. Sosio dan Lukman Wijaya Barata, S.Sos, MA selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Sosiologi dan seluruh karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas bantuan dan semangat yang diberikan selama ini;
7. Kepada masyarakat Dusun Sukamade dan rekan – rekan di Resort Sukamade yang telah membantu penulis dalam semua petualangan dan proses penelitian.

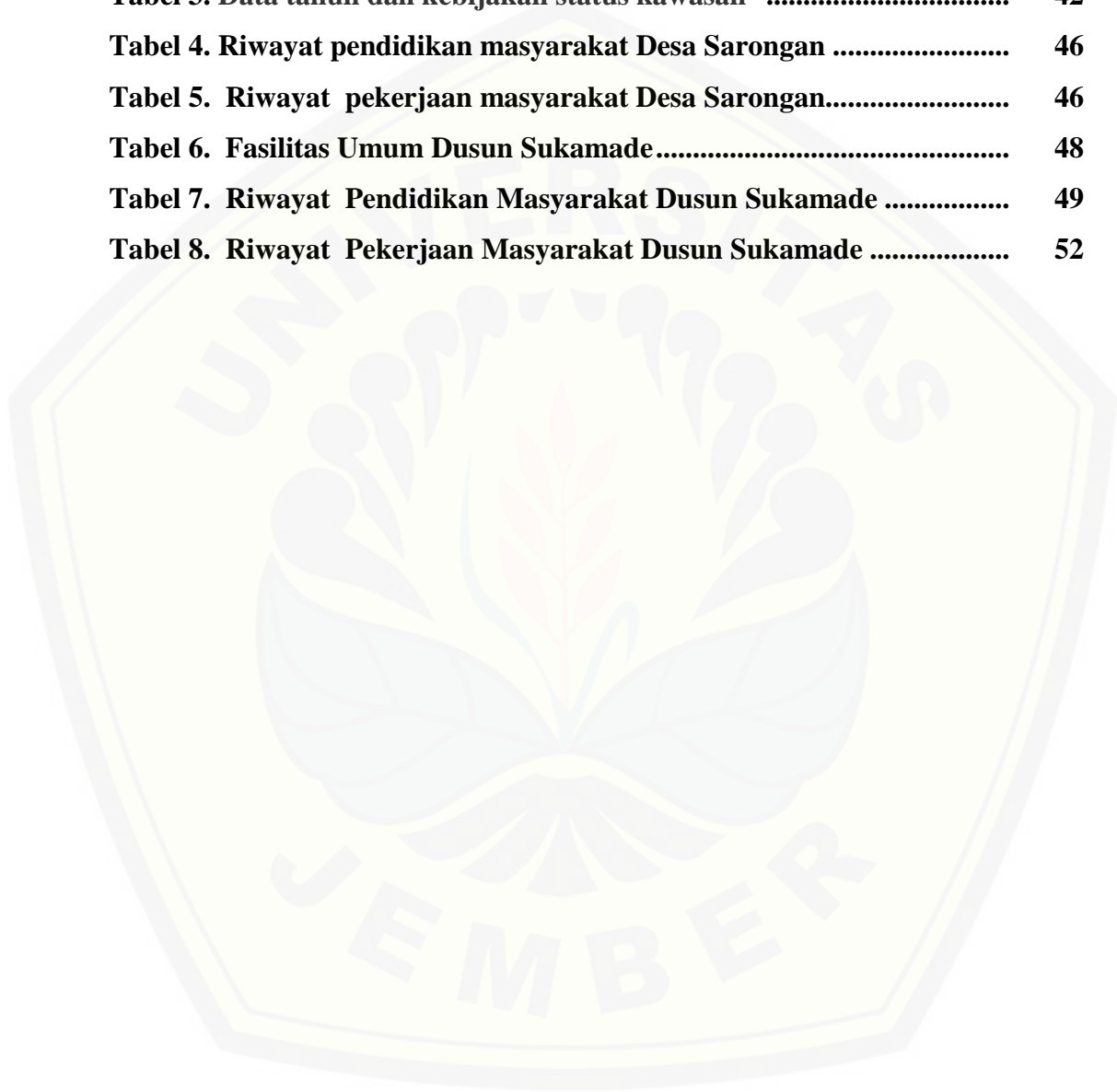
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Konseptualisasi	8
2.1.1 Konservasi	8
2.1.2 Deforestasi	11
2.1.3 Konstruksi Sosial.....	18
2.2 Kerangka Dasar Teori	20
2.3 Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Metode Penelitian	31
3.2 Setting Lokasi Penelitian.....	31
3.3 Teknik Pengumpulan Data	33
3.4 Penelusuran Informan	34

3.5 Validitas Data	35
3.6 Teknik Analisa Data	36
BAB IV KONSTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT DUSUN SUKOMADE TENTANG MAKNA HUTAN KONSERVASI	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.	40
4.1.1 Gambaran Umum Taman Nasional Merubetiri.....	40
4.1.2 Gambaran umum desa Sarongan.....	44
4.1.3 Gambaran Umum Kehidupan Masyarakat Sukamade	47
4.2 Pembangunan Pengetahuan Tentang Hutan Bagi Masyarakat Dusun Sukamade Di Kawasan Taman Nasional Merubetiri.	54
4.2.1 Konservasi dan Peraturan	56
4.2.2 Peningkatan Pemahaman Konservasi dan Peraturan.	66
4.2.2 Kontrol dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Konservasi	73
4.3. Tindakan Sosial Masyarakat Dusun Sukamade Terhadap Upaya Konservasi Dan Ancaman Deforestasi	80
4.3.1 Tindakan Kooperatif Masyarakat Perkebunan Dusun Sukamade Terhadap Konservasi di Taman Nasional Merubetiri	83
4.3.2 Tindakan Pelanggaran Masyarakat Dusun Sukamade Terhadap Berlangsungnya Upaya Konservasi di Taman Nasional Merubetiri....	91
4.4 Fungsi Ekonomi Dalam Usaha Pelestarian Hutan di Taman Nasional Merubetiri.	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	114
5.2 Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Potret keadan hutan 2009 - 2013	14
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3. Data tahun dan kebijakan status kawasan	42
Tabel 4. Riwayat pendidikan masyarakat Desa Sarongan	46
Tabel 5. Riwayat pekerjaan masyarakat Desa Sarongan.....	46
Tabel 6. Fasilitas Umum Dusun Sukamade.....	48
Tabel 7. Riwayat Pendidikan Masyarakat Dusun Sukamade	49
Tabel 8. Riwayat Pekerjaan Masyarakat Dusun Sukamade	52

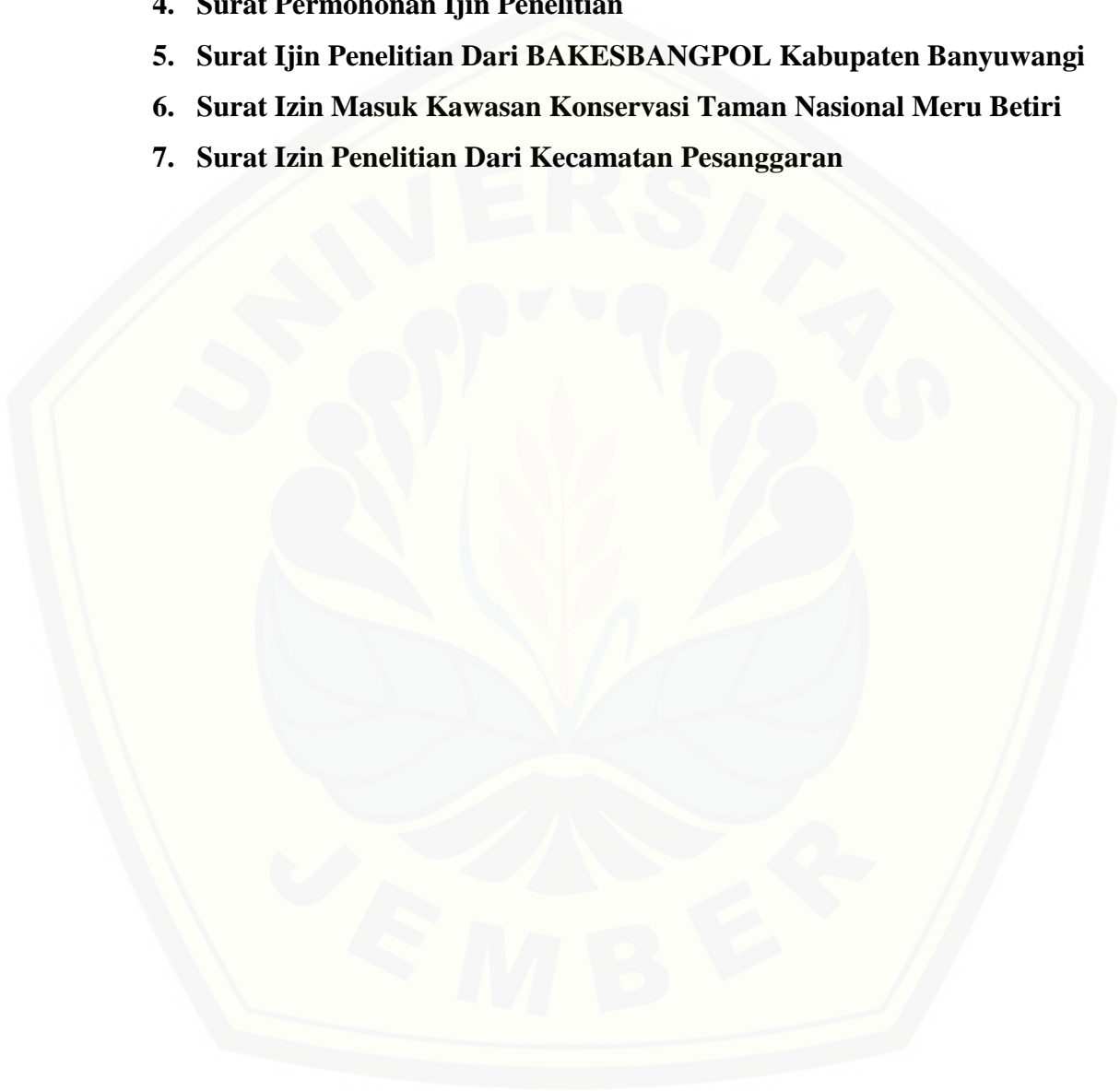


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Skema Konsep	24
Gambar 2. Konsep Analisis Data	39
Gambar 3. Peta Wilayah TN Merubetiri	41
Gambar 4. Peta Wilayah Desa Sarongan	45
Gambar 5. Gambaran Peta Wilayah Observasi Dusun Sukamade	50
Gambar 6. Kegiatan MBSC di Resort Sukamade	60
Gambar 7. Anjang Sana Kepada Warga	65
Gambar 8. Foto warga menyeter hasil pertanian ke warung	73
Gambar 9. Kondisi dan situasi Dusun Sukamade saat sore hari	86
Gambar 10. Warga mengolah tanah untuk pertanian di tengah kawasan.	95

Daftar Lampiran

- 1. Pedoman Wawancara Informan**
- 2. Transkrip Wawancara**
- 3. Foto – Foto Penelitian**
- 4. Surat Permohonan Ijin Penelitian**
- 5. Surat Ijin Penelitian Dari BAKESBANGPOL Kabupaten Banyuwangi**
- 6. Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi Taman Nasional Meru Betiri**
- 7. Surat Izin Penelitian Dari Kecamatan Pesanggaran**



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Deforestasi merupakan fenomena lama yang semakin hari menjadi fenomena yang semakin kritis. Kritis dalam artian publik semakin tahu bagaimana kondisi hutan kita hari ini. Berbagai persoalan seputar kehutanan juga menjadi pembahasan yang menarik untuk diikuti dan dicari solusi paling idealnya. Seperti transformasi daerah pedalaman tentang nilai hutan, kemudian konflik tenurial hutan dan perhutanan sosial yang saat ini menjadi program kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Deforestasi yang berujung pada rusaknya ekosistem merupakan ancaman bencana yang serius. Ancaman antropogenik atau ancaman yang diakibatkan oleh ulah manusia baik secara tradisional perseorangan ataupun secara modern dengan latar belakang korporasi. Selain daripada hilangnya luasan hutan yang akhirnya menyebabkan kerusakan micro iklim sampai iklim global, secara kaidah kebencanaan pun hilangnya hutan juga menjadi salah satu penyebab bagi munculnya beberapa bencana. Bencana alam seperti longsor, banjir bandang, krisis air sampai krisis pangan juga menjadi dampak dari hilangnya hutan kita. Hutan sebagai fungsi penyerap emisi karbon serta penahan degradasi tanah dan juga sebagai fungsi penyangga terhadap air tanah. Artinya hutan memiliki nilai yang dapat memberikan manfaat kesejahteraan dan penghidupan bagi masyarakat.

Menurut laporan dari Forest Watch Indonesia (FWI) dalam buku Potret keadaan hutan di Indonesia periode 2009 – 2013 (2014) dalam lima tahun terakhir, penyusutan areal hutan di Indonesia terjadi 4,6 juta atau seluas 7 kali luas provinsi DKI Jakarta. Menurut data dari FWI hutan yang tersisa diperkirakan 82 juta Ha itupun data yang termonitor pada tahun 2014. Dari data tersebut konversi lahan cenderung beraktifitas diluar ruang lingkup kehutanan sendiri karena cenderung menuju ke arah perkebunan sawit, penambangan dan hutan tanaman industri (HTI). Dari penurunan luas hutan atau deforestasi tersebut secara korelasinya mengurangi fungsi pembaharu pada kualitas udara kita. Ancaman CO₂ di udara atau saat ini dikenal dengan gas rumah kaca membuat suhu bumi menjadi lebih panas dan beralasan sekali perubahan iklim terus terjadi. Dari dampak besar yang ditimbulkan

tersebut, menurut kelompok kerja Dewan Nasional Perubahan Iklim, di tahun 2100 diperkirakan 800 ribu rumah yang berada di pesisir harus segera dipindahkan akibat naiknya air laut (Herman Hidayat, 2015:3.) Belum lagi dampak dari perubahan iklim tersebut cuaca yang tidak bisa diprediksi, gagal panen dan krisis pangan juga bisa jadi menjadi akibat dari hilangnya hutan kita.

Deforestasi sendiri terjadi akibat 2 faktor yaitu akibat alamiah seperti kebakaran hutan dan juga karena faktor manusia sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, seperti kebutuhan lahan pemukiman dan lahan pertanian. Kaidah pembangunan yang masih antroposentris dan tidak berwawasan pembangunan berkelanjutan yang pro terhadap lingkungan merupakan pekerjaan rumah bersama dalam mengatasi masalah ini. Perkembangan manusia semakin hari semakin banyak dan otomatis kebutuhan akan hunian juga semakin meningkat. Hunian tersebut juga tidak akan ada apabila tidak adanya tanah atau lahan yang mendasarinya. Maka pembangunan hunian yang semakin lama semakin meluas juga menjadi penyebab dari deforestasi. Selain daripada itu, ancaman deforestasi yang terus membayangi dalam proses pelestarian hutan di Indonesia saat ini semakin lama semakin banyak. Perubahan konsesi lahan hutan menjadi lahan produksi menjadi ancaman serius dalam keberlangsungan kehidupan manusia.

Ancaman kerusakan lingkungan berakibat pada kondisi masyarakat itu sendiri secara tidak langsung. Karena kehidupan manusia membutuhkan unsur-unsur untuk hidup dan berkembang seperti sumberdaya air, udara dan sumber daya lainnya. Jika salah satu faktor penyangga tersebut terganggu maka rotasi kehidupan pun juga terganggu. Kebutuhan lain pada masyarakat seperti kebutuhan akan pakaian kemudian peralatan dan kebutuhan penunjang juga menjadi faktor lain yang mempengaruhi perubahan konsesi hutan di Indonesia. Kebutuhan penunjang yang kami maksud adalah bahan – bahan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan tersebut seperti misal minyak goreng, karet, kapas atau kebutuhan kayu. Kita lihat seberapa besar kerusakan hutan untuk dijadikan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan penunjang tersebut. Sebut saja minyak goreng yang keberadaannya dibutuhkan jutaan manusia hanya untuk menggoreng atau mengolah makanan, imbasnya harus menghancurkan jutaan wilayah hutan kita. Sebut saja hutan di Sumatra, Riau,

Kalimantan harus ter ekspansi akibat korporasi korporasi yang melakukan praktek yang terlalu ekstrim untuk memenuhi satu saja bahan pemenuhan bahan penunjang. Masalah pangan juga tidak berhenti terhadap kebutuhan perut saja. Hutan sebagai salah satu aset dan aspek terpenting dari kehidupan manusia. Hutan juga memiliki keberagaman manfaat yang tentu dapat menunjang kesejahteraan dan keberadaan dari manusia itu sendiri. Kekayaan – kekayaan yang lain yang mungkin luput dari pandangan adalah bagian dalam dari jantung hutan itu sendiri. Seperti ekosistem flora dan fauna yang saat ini terus menurun drastis akibat perburuan liar dan perubahan iklim yang juga membuat menurunnya adaptasi dari ekosistem yang ada.

Selain itu adalah masalah kebutuhan pangan atau pertanian, masyarakat kita mengenal dengan sawah dan tegal. Pada masyarakat Jawa konteks pertanian lebih menjurus ke sawah dengan air dan luasan lahan yang melimpah. Bukan tidak mungkin bahwa membuka hutan di zaman dulu untuk menjadikan lahan pertanian di pulau Jawa juga menjadi sejarah bagaimana deforestasi terjadi. Penulis belum bisa menjelaskan deforestasi hutan di Jawa karena secara luasan dan catatan historis belum kami ketahui selain catatan kementerian kehutanan sejak tahun 1989 dan sudah tidak dapat tercatat asal mula jumlah hutan yang tersedia kemudian hanya meninggalkan hutan – hutan Cagar Alam dan Taman Nasional yang kondisinya kini juga semakin terancam. Hanya beberapa catatan yaitu tentang *babat alas* yang dilakukan orang – orang kerajaan Mataram pada masa lalu. Kondisi geografis pulau Jawa yang sangat subur dengan bentang alam yang sangat cocok untuk iklim pertanian memang menjadi tempat yang diidamkan oleh daerah lain bahkan negara lain. Oleh karena itu sejak pendudukan kolonial, ekspansi tanaman – tanaman luar mengharuskan tanaman – tanaman endemik harus ditebang dan hal itu sangat mempengaruhi bagaimana dan berapa jumlah hutan Jawa saat itu dan tersisa berapa untuk saat ini. Sedangkan di pulau madura sendiri masyarakat tempo dulu hanya mengenal sistem tegal, karena faktor alam pulau madura yang banyak terdiri dari tanah berkapur yang tidak cocok untuk bertani sawah. Sehingga usaha tegal atau ladang masyarakat di konsentrasikan kelahan – lahan yang banyak ditumbuhi pepohonan sehingga banyak hutan – hutan, oro – oro dan rawa di kawasan pulau

madura harus berkurang karena difungsikan sebagai tegal atau ladang pertanian dan pemukiman masyarakat(Kuntowijoyo, 2017 :33).

Sebagai salah satu hutan di pulau Jawa saat ini, Meru Betiri adalah salah satu yang menjadi Taman Nasional. Hutan di pulau Jawa dengan berbagai macam flora dan fauna endemik khas dari Jawa. Tempat berlabuh dari penyu laut yang singgah untuk bertelur di salah satu pantainya. Rumah bagi ekosistem banteng, rusa, merak dan harimau Jawa yang saat ini sudah langka keberadaannya. Tidak hanya sebagai rumah bagi flora dan fauna saja, akan tetapi di beberapa wilayah kawasan Taman Nasional ini juga terdapat beberapa komunitas masyarakat desa hutan yang saat ini masih tetap eksis dan bertambah jumlah populasinya. Dari sekian desa hutan atau kawasan desa yang berbatasan dengan zona penyangga, diantaranya tersebar mulai dari administrasi Kabupaten Jember seperti Andongrejo, Curah Nongko, Sanenrejo dan Mulyorejo. Kemudian di Banyuwangi terdapat Desa Sarongan dan Kandangan yang masuk sebagai desa penyangga kawasan. Sarongan Sendiri memiliki beberapa Dusun yang bahkan secara topografi berada di tengah kawasan konservasi seperti salah satunya adalah Dusun Sukomade. Dusun ini bertempat di timur kawasan Taman Nasional dan masih masuk dalam wilayah kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

Untuk menuju di Dusun Sukomade harus melewati 12 kilometer zona rimba dengan trek terjal dan berbatu. Kawasan Dusun Sukomade sendiri masuk dalam kategori zona lahan guna usaha yang dikelola oleh pihak swasta yaitu PT. Sukomade dengan usaha perkebunan kakao dan karet. Komunitas ini mendiami di kawasan Taman Nasional sejak beberapa generasi setelah usaha perkebunan di Taman Nasional ini dibuka. Komunitas masyarakat Dusun pada awalnya adalah para pegawai dari perkebunan dan akhirnya menetap dan membentuk sebuah komunitas masyarakat desa hutan seperti saat ini. Bahkan di Dusun Sukomade terdapat pula sekolah dan pos kesehatan serta tempat beribadah. Keberadaan komunitas lokal ini secara tidak langsung juga memberikan pengaruh atau ancaman dari keberadaan hutan itu sendiri. Karena secara tidak langsung, penyangga kehidupan masyarakat juga pasti menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya. Penggunaan kayu bakar, air, tanaman dan obat-obatan yang notebene merupakan sumberdaya hasil non

kayu adalah salah satu bentuk usaha yang bisa didapatkan dari hutan. Nilai ekonomis yang terdapat didalam hutan memang sangat tinggi jika kita dapat menguraikan potensi hasil hutan satu persatu yang ada. Seperti kayu – kayu hutan yang saat ini kebutuhan kayu untuk bidang properti dan lain-lain masih sangat tinggi. Kemudian rotan yang saat ini Indonesia termasuk eksportir rotan terbesar di Dunia (dikutip dari Kemenperin.co.id). dari berbagai potensi alam yang ada di dalam kawasan Taman Nasional, kesadaran masyarakat harus dibentuk sedemikian rupa untuk mengurangi resiko dari rusaknya kawasan. Konstruksi sosial masyarakat Dusun Sukamade tentunya memiliki makna tersendiri bagi mereka yang tinggal di tengah kawasan konservasi.

Kesadaran yang dibentuk oleh masyarakat yang berada di tengah hutan tentu akan berbeda dengan masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Masyarakat Dusun Sukamade ini termasuk dalam masyarakat terisolir karena aksesibilitas menuju Dusun ini harus melewati dataran tinggi dan hutan serta harus melewati sungai besar. Keterisoliran masyarakat dari dunia luar bukan karena sebab, jalan yang sengaja tidak diaspal dan tidak adanya listrik merupakan salah satu kebijakan Taman Nasional. Untuk tetap menjaga kelestarian hutan Meru Betiri karena dengan tidak adanya fasilitas seperti itu satwa dan seluruh tumbuhan yang terdapat di kawasan konservasi akan tetap terpelihara dan tidak akan ada gangguan yang menyebabkan kerugian pada pihak Taman Nasional. Karena struktur masyarakat yang berperan penting sebagai agen atau kelompok yang dapat membentuk paradigma yang tinggal di kawasan tengah hutan. Maka peran penyuluh sangat diperlukan, terlebih *enclave* seperti Dusun Sukamade ini yang berada persis berdampingan dengan zona inti. Sampai pada saat ini sering kali diadakan penyuluhan baik dari lembaga luar sampai pada pihak Taman Nasional yang pernah menjadi fasilitator, akan tetapi penyuluhan yang dilakukan tidak terjadi perubahan secara signifikan pada masyarakat karena terganjal konsesitensi dalam menjaga program penyuluhan sampai berhasil. Dari hal itu kehadiran masyarakat komunitas sekitar hutan bisa saja menjadi ancaman serius terhadap bertambahnya kasus deforestasi ataupun malah sebaliknya yaitu sebagai penjaga hutan itu sendiri, tergantung dari motivasi masyarakat. Dusun Sukomade adalah salah satu contoh dari sekian ribu komunitas desa hutan yang ada di Indonesia

dan Meru Betiri merupakan salah satu Taman Nasional yang ada di pulau Jawa. Sebagai salah satu *pilot project*¹, usaha pelestarian hutan Jawa upaya masih terus dilakukan untuk membangun sebuah sistem yang dapat memiliki nilai lebih dari hutan itu sendiri. Di Meru Betiri sendiri terdapat berbagai zonasi antara lain zona penyangga, zona rimba, zona inti dan zona lahan usaha.

Dari hal tersebut kami melihat bahwa komunitas tersebut dianggap sebagai ancaman dari keberlangsungan usaha konservasi yang dilakukan oleh pihak Taman Nasional. Ancaman tersebut menjadi menarik untuk diamati ketika bagaimana pola pengetahuan dan kesadaran terhadap konservasi harus disandingkan dengan privatisasi atau upaya konservasi hutan terkait pengawetan dan pelestarian. Upaya seperti apa yang harus dikembangkan untuk memberikan keuntungan kepada masyarakat sekitar tanpa merusak dan mengganggu upaya perlindungan di dalamnya. Ancaman deforestasi yang dialami oleh kawasan hutan Taman Nasional yang lain membuat upaya motivasi kerjasama dari para stakeholder semakin diperkuat. Untuk itu penelitian ini dibuat untuk melihat bagaimana pola kerjasama para stakeholder yang membentuk sebuah system dalam membuat konstruksi sosial dalam rangka pengurangan ancaman dari deforestasi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Jika melihat kawasan Taman Nasional Meru Betiri, tidak hanya merupakan sebuah kawasan yang hanya terdapat vegetasi flora dan fauna akan tetapi terdapat pula komunitas masyarakat yaitu Dusun Sukomade. Kehadiran kawasan komunitas masyarakat ini secara tidak langsung juga berpotensi sebagai ancaman kerusakan. Pengetahuan mempengaruhi tindakan dan kebiasaan masyarakat dalam keseharian, oleh karena itu pengetahuan inilah yang kami fokuskan sebagai topik penelitian kami. Maka dari penjelasan singkat tersebut rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konstruksi sosial masyarakat Dusun Sukomade dalam pembangunan pengetahuan tentang konservasi hutan di TNMB ?

¹ Meru Betiri ditetapkan sebagai salah satu pilot project program REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) yang merupakan kerjasama antara Kementerian Kehutanan dengan International Tropical Timber Organization (ITTO). Baseline karbon TN Meru Betiri total sebesar 29.690.954,3 tCO₂e.

2. Bagaimana tindakan sosial masyarakat Dusun Sukamade dalam usaha konservasi hutan di kawasan TNMB ?
3. Motivasi apakah yang dimaknai oleh masyarakat Dusun Sukamade dalam upaya konservasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Mendeskripsikan dan menganalisis konstruksi sosial masyarakat Dusun Sukamade dalam pembangunan pengetahuan tentang hutan konservasi.
- 1.3.2 Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis tindakan sosial masyarakat Dusun Sukamade dalam upaya konservasi dan ancaman deforestasi di TNMB.
- 1.3.3 Menganalisis faktor – faktor yang mendorong keterlibatan masyarakat Dusun Sukomade dalam upaya konservasi hutan.

1.4 Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Akademis
Hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pihak – pihak atau peneliti yang ingin melakukan kajian atau penelitian dengan topik serupa.
- b. Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah pengetahuan dan informasi baru bagi masyarakat luas tentang kontruksi sosial, konservasi dan ancaman deforestasi.
- c. Pemerintah
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya Taman Nasional dalam mengambil kebijakan terhadap usaha konservasi dan menjelaskan potensi ancaman deforestasi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Konseptualisasi.

2.1.1 Konservasi

Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris, (Inggris) *Conservation* yang artinya pelestarian atau perlindungan. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Menurut Pasal 7 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, jenis hutan konservasi ; 1) hutan suaka alam, yaitu hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. 2) kawasan hutan pelestarian alam, yaitu hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya

Dikutip dari Konservasi Indonesia (2008), Indonesia memiliki potensi keanekaragaman spesies satwa yang sangat tinggi, yaitu sekitar 12% (515 species, 39% endemik) dari total spesies binatang menyusui, urutan kedua di dunia; 7,3% (511 spesies, 150 endemik) dari total spesies reptilian, urutan keempat di dunia; 17% (1531 spesies, 397 endemik) dari total spesies burung di dunia, urutan kelima; 270 spesies amfibi, 100 endemik, urutan keenam di dunia; dan 2827 spesies binatang tidak bertulang belakang, selain ikan air tawar. Selanjutnya, Indonesia memiliki 35 spesies primata (urutan keempat, 18% endemik) dan 121 spesies kupu kupu (44% endemik). Indonesia menjadi satu-satunya negara setelah Brazil, dan mungkin Columbia, dalam hal urutan keanekaragaman ikan air tawar, yaitu sekitar 1400 spesies (Dephut 1994; Mittermeier dkk. 1997). Dalam hal keanekaragaman tumbuhan, Indonesia menduduki peringkat lima besar di dunia; yaitu memiliki lebih dari 38.000 spesies, 55% endemik. Keanekaragaman palem di Indonesia menempati

urutan pertama, mencapai 477, 225 endemik. Lebih dari setengah dari seluruh spesies (350) pohon penghasil kayu bernilai ekonomi penting (dari famili Dipterocarpaceae) terdapat di negara ini, 155 di antaranya endemik di Kalimantan (Dephut 1994; Newman 1999).

Sebagai salah satu *pilot project*, kelestarian hutan Jawa dengan berbagai upaya saling menguntungkan di beberapa pihak terjalin dari hutan Meru Betiri ini. Taman Nasional Meru Betiri terletak melintasi 2 kabupaten, dengan batas timur berada pada kabupaten Banyuwangi batas barat berada di Kabupaten Jember. Sebagai hutan konservasi Meru Betiri memiliki beberapa zonasi yang digunakan sebagai patokan pembatas wilayah. Di Meru Betiri sendiri terdapat berbagai zonasi antara lain zona penyangga, zona rimba, zona inti dan zona lahan usaha. Meru Betiri khususnya di wilayah timur terdapat komunitas desa hutan yang mana keberadaan komunitas tersebut merupakan kemunculan dari kehadiran peluang usaha yang dapat menyambung kehidupan. Dari munculnya masyarakat tersebut keberadaan hutan konservasi berubah menjadi lahan industri untuk usaha mendapatkan keuntungan dari hutan itu sendiri. Hingga saat ini pengelolaan kawasan hutan di Indonesia mengacu pada perundang undangan di bidang kehutanan yaitu UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di dalam perundang-undangan tersebut kawasan hutan terbagi ke dalam beberapa status yaitu: hutan negara dan hutan hak. Hutan secara fungsi juga terbagi ke dalam fungsi lindung, fungsi produksi dan fungsi konservasi. Hutan konservasi dalam Pasal 1 huruf i. UU No.41 th 1999 adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya

Konservasi hutan yang berada dalam kawasan Meru Betiri merupakan contoh dari perlindungan keragaman hayati di pulau Jawa. Di Indonesia, Taman Nasional adalah salah satu kawasan konservasi yang relatif paling maju baik bentuk maupun sistem pengelolaannya dibandingkan dengan Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa. Taman Nasional bahkan memperoleh perhatian yang lebih serius dalam pengembangannya dibandingkan dengan

pengembangan kawasan lindung ataupun pengembangan gagasan cagar biosfer. Departemen Kehutanan juga berencana mengembangkan 21 Taman Nasional Model dan meningkatkan status sebagian Balai Taman Nasional menjadi Balai Besar Taman Nasional. Taman Nasional Model diartikan sebagai suatu taman nasional yang dikelola sesuai dengan kondisi spesifik lokasi, termasuk perubahan yang terjadi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menuju tercapainya Taman Nasional mandiri (Ditjen PHKA, 2006). Konservasi hutan dimaksudkan untuk menjaga eksistensi hutan itu sendiri. Selain daripada untuk keberlangsungan keragaman flora dan fauna, konservasi dimaksudkan sebagai lahan serapan air, pengembangan akademik untuk penelitian dan pengembangan medis serta sebagai usaha dalam merotasikan kehidupan berkelanjutan.

Usaha dari konservasi itu sendiri pada dasarnya adalah meningkatkan kesadaran tentang nilai hutan itu sendiri. Dimana kesadaran yang mengakibatkan munculnya *common sense* ini membuat masyarakat juga menjaga dan tidak melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan dari hutan tersebut. Rasa memiliki atau *sense of belonging* yang harus ditumbuhkan dalam setiap anggota komunitas masyarakat desa hutan diharapkan mampu mengurangi dampak deforestasi yang mengancam akibat kurangnya kesadaran masyarakat. Pengelolaan hutan dengan pilar keseimbangan antara fungsi ekologi, ekonomi dan sosial memang harus seimbang dimana setiap sub sistem bekerja. Akan tetapi dari fungsi hutan yang demikian harus diawasi dengan ketat karena pada dasarnya konsepsi konservasi bukan berarti hal yang terkesan mistis dan syarat akan nuansa magis, akan tetapi hutan yang terlindungi dari tangan-tangan perusak karena keberadaannya yang sangat penting.

Usaha menjaga hutan ini pada dasarnya untuk mengurangi kerusakan yang mengakibatkan bencana di kemudian hari. Karena salah satu faktor keberadaan hutan adalah mereduksi emisi karbon diudara untuk menahan dari perubahan iklim. Dari beberapa contoh kasus, bencana alam yang muncul akibat perubahan iklim ini menjadi lebih anomi dan tak terkendali. Dari perubahan iklim tersebut memunculkan berbagai masalah baru seperti ancaman bencana baik hidrologi sampai pada bencana sosial. Kaitannya perubahan iklim dengan perubahan sosial adalah alam yang

seharusnya menjadi sahabat bagi manusia harus menjadi hal yang mengancam akibat ulah manusia itu sendiri. Perubahan iklim juga menyebabkan manusia untuk beradaptasi dengan alam sekitar yang baru. Seleksi alam yang terjadi di daerah sub tropis saat ini juga mengancam kehidupan masyarakat di iklim tropis. Jika di iklim sub tropis seleksi alam terjadi karena musim dingin yang dapat menyebabkan manusia dapat mati akibat hipotermia. Di iklim tropis ancaman kekeringan jauh lebih berbahaya daripada musim dingin di iklim sub tropis. Karena dari satu masalah kekeringan menimbulkan problem baru seperti konflik, gagal panen, kebakaran hutan hingga wabah penyakit akibat tidak adanya air untuk sanitasi. Dari rusaknya hutan dan mengakibatkan kerusakan iklim dunia membuat kesadaran akan pentingnya hutan dan nilai – nilai konservasi harus diterapkan. Menurut kaidah dasar ilmu lingkungan beberapa penjelasan disebutkan bahwa konservasi merupakan upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya serta upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam (fisik.)

2.1.2 Deforestasi

Dikutip dari pendahuluan jurnal CIFOR; Laju dan penyebab deforestasi Indonesia, Indonesia menempati peringkat ketiga (sesudah Brazil dan Zaire) dalam kekayaan hutan hujan tropis, dan memiliki 10% dari sisa sumberdaya ini di dunia. Perkiraan resmi mengenai kawasan lahan hutan di Indonesia sangat bervariasi. Kasus pengalih fungsian hutan menjadi lahan komersial lain non hutan, banyak menjadi topik dan sorotan para peneliti dan aktivis pecinta lingkungan. Bahkan organisasi – organisasi yang bergerak untuk menentang kerusakan yang dilakukan para perusahaan yang mencoba merusak hutan tersebut juga tidak sedikit. Deforestasi sendiri menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan iklim global. Banyak penelitian tentang deforestasi dilakukan untuk menjelaskan upaya upaya seperti apa dalam mencari solusi dari persoalan tersebut. Dikutip dari rancangan strategis nasional REDD+ revisi, berbicara tentang deforestasi, menurut FAO (1996) adalah pengalihan hutan dengan lahan tujuan lain atau pengurangan tajuk pohon

dibawah ambang bata minimum 10% untuk jangka panjang dengan tinggi pohon minimum 5 m (in situ) dan areal minimum 0,5 ha.

Hutan yang sejatinya menjadi lahan untuk menyeimbangkan kehidupan ini sudah tentu sangatlah penting fungsinya, bahkan seharusnya untuk berbicara masalah konservasi dan deforestasi harusnya menjadi hal yang sulit untuk dilakukan terutama di Indonesia karena notebene masuk menjadi negara dengan julukan paru – paru dunia. Menurut Stevens Alan(2004) pengawahatan atau penghilangan hutan atau penggundulan hutan atau deforestasi adalah kegiatan penebangan hutan atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat dialih gunakan untuk penggunaan nir-hutan (non-forest use), yakni pertanian, peternakan atau kawasan perkotaan. Dikutip dari jurnal CIFOR yaitu Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya (1997), beberapa penulis melihat bahwa estimasi deforestasi di Indonesia digerogoti oleh penggunaan istilah “deforestasi” yang kurang jelas dan tidak konsisten. Diantara penulis yang paling vokal mengenai permasalahan ini adalah Dick (1991), Soemarwoto (1992), Saharjo (1994) dan Angelsen (1995.)²

Usaha – usaha untuk mengurangi nilai dan luasan hutan saai ini semakin kritis. Pembangunan yang tidak berlandaskan pro lingkungan juga semakin banyak dan menjamur. Tata kelola pembangunan yang tidak berlandaskan keberlangsungan (sustainable development) juga semakin banyak jika melihat semakin banyak data – data tentang berkurangnya luasan hutan baik hutan adat, hutan rakyat dan hutan alam di kalimantan, sumatra dan papua. Semakin berkurangnya luasan hutan yang diakibatkan adanya campur tangan manusia yang berorientasi ekonomi dan tanpa melihat sisi buruknya, membuat status hutan kita di Indonesia semakin dipertanyakan. Chomitz dan Griffiths (1996) dalam jurnal CIFOR, menemukan bahwa tanaman keras hasil perkebunan rakyat, dan bukannya kegiatan perladangan berpindah untuk memenuhi kebutuhan pokok, juga berperan penting dalam deforestasi di Indonesia; diantara berbagai jenis tanaman perkebunan, karet nampaknya mempunyai hubungan yang paling erat dengan deforestasi. Karet merupakan sumber pendapatan tunggal terbesar dalam bidang pertanian di Indonesia

² Sayer dan Whitmore (1991) dan Grainger (1993) mencatat kesulitan membuat perbandingan estimasi hilangnya tutupan hutan secara internasional karena dipakainya definisi-definisi yang berbeda atas istilah-istilah dan konsep-konsep kunci.

(US\$ 1,5 milyar pada tahun 1994-95) dan nilainya bertambah dua kali lipat pada periode 1984 - 1995 (Bank Dunia 1996:141). Pada periode 1982-1994 produksi tanaman perkebunan meningkat dengan laju berikut: karet dari 900 menjadi 1.499 ton (66%); kelapa dari 1.718 menjadi 2.631 ton (60%); dan kopi dari 281 menjadi 446 ton (55%) (World Bank 1996:163).

Tidak sedikit pula masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, bahkan interaksi didalamnya bisa jadi turun temurun sehingga membuat kawasan hutan berganti menjadi kawasan pemukiman. Menurut data dari BAPPENAS yaitu sekitar 12 juta jiwa meskipun tidak dijelaskan terbagi antara kawasan hutan adat, hutan sosial atau hutan konservasi. Sumber lain (Lynch dan Tallbot 1995 :22) memperkirakan angka tersebut akan lebih tinggi yaitu sekitar 40 – 65 juta orang yang tinggal di kawasan hutan negara. Sukamade sebagai salah satu Dusun di kecamatan Pesanggaran, merupakan Dusun terakhir yang berada di kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Sebagai Dusun yang dihuni oleh sekitar 250 kk maka dibutuhkan lahan pemukiman dan lahan pangan untuk kehidupan mereka. Dusun yang berada di kawasan HGU PT Sukamade baru ini masuk dalam zona pemanfaatan Taman Nasional Meru Betiri. Perusahaan yang berdiri lebih dahulu daripada taman nasional Meru Betiri ini adalah perkebunan swasta yang bergerak di bidang karet kopi dan kakao. pemukiman warga pun disediakan perusahaan sebagai usaha untuk mengurangi biaya transportasi yang tinggi karena jaraknya yang sangat jauh dari pemukiman, sekitar 11 km dengan medan yang sulit sebelum pemukiman terdekat. Dikutip dari Sunderlin dan Resosudarmo, ada ketidakcocokan yang cukup besar dalam estimasi deforestasi yang diakibatkan oleh pertumbuhan perkebunan-perkebunan besar dan hutan tanaman industri. Estimasi-estimasi tersebut berkisar dari angka yang rendah, yaitu 11.400 ha/tahun sampai 274.000 ha/tahun (World Bank, 1994:52) Tidak jelas apakah istilah “perkebunan besar” terbatas pada tanaman komersial di perkebunan besar, atau apakah itu juga menyangkut hutan tanaman industri, (CIFOR;1997.)

Usaha pemukiman ini jika merujuk pada istilah kata deforestasi, maka kawasan pemukiman adalah kawasan dengan penyumbang nilai tertinggi angka untuk deforestasi. Fraser (1996) mengemukakan bahwa pertumbuhan kepadatan

penduduk merupakan penjelasan fundamental akan masalah deforestasi di Indonesia. Fraser (1996:6, 15) menyatakan bahwa pada tiap 1% kenaikan penduduk (kenaikan penduduk di pulau-pulau di luar pulau Jawa adalah 3%) terjadi penurunan kira-kira 0,3% tutupan hutan. Sebab itu keseluruhan penurunan luas tutupan hutan setiap tahun adalah 1%, sesuai dengan pengamatan FAO yang memperlihatkan bahwa besarnya tutupan hutan yang hilang setiap tahun mencapai 900.000 sampai 1 juta ha. Selain daripada pemukiman, Sukamade sendiri memiliki lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat sekitar sebagai usaha penambahan pendapatan.

Tabel 1. Potret keadaan hutan 2009 - 2013 (FWI).

No.	Temuan
1	Di tahun 2013 luas daratan Indonesia yang masih tertutup hutan alam adalah 82 juta hektare. Tujuh puluh lima persen diantaranya ada di daratan Papua dan Kalimantan.
2	Di tahun 2013 tersebut urutan luas tutupan hutan alam adalah: Papua 29,4 juta hektare, Kalimantan 26,6 juta hektare, Sumatera 11,4 juta hektare, Sulawesi 8,9 juta hektare, Maluku 4,3 juta hektare, Bali dan Nusa Tenggara 1,1 juta hektare, dan Jawa 675 ribu hektare.
3	Di tahun 2013 dari luas seluruh daratan Maluku 57 persennya masih berupa hutan alam. Luas hutan Maluku tersebut hanya menyumbang 5 persen ke total luas hutan Indonesia. Kondisi geografis dan kerentanan wilayah akibat aktivitas konversi hutan di suatu pulau, khususnya di pulau-pulau kecil, ternyata selama ini tidak menjadi pertimbangan penting dalam penentuan arah kebijakan pengelolaan hutan.
4	Di tahun 2013 sekitar 78 juta hektare atau 63 persen dari luas seluruh Kawasan Hutan Negara masih berupa hutan alam.
5	Tutupan hutan alam terluas berada di dalam Kawasan Hutan Lindung yaitu sebesar 22,9 juta hektare atau 28 persen dari total luas tutupan hutan alam di Indonesia.
6	Sampai dengan tahun 2013 sekitar 44 juta hektare atau 25 persen dari luas daratan Indonesia telah dibebani izin pengelolaan lahan dalam bentuk IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, perkebunan kelapa sawit, dan juga pertambangan.
7	Kondisi tutupan hutan alam di dalam konsesi IUPHHK-HA adalah seluas 11 juta hektare, IUPHHK-HT seluas 1,5 juta hektare, konsesi perkebunan seluas 1,5 juta hektare, dan pertambangan seluas 10 juta hektare.

8	Kami menemukan 14,7 juta hektare areal penggunaan lahan yang tumpang tindih antara IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan.
9	Kami menemukan sekitar 7 juta hektare luas tutupan hutan alam yang berada di dalam areal penggunaan lahan yang tumpang tindih antara IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan.
10	Di tahun 2013 berdasarkan fungsi Kawasan Hutan Negara dan Areal Penggunaan Lain kami menemukan bahwa dari 51 juta hektare luas tutupan hutan alam yang tidak dibebani izin, sekitar 37 persennya berada di dalam Kawasan Lindung, 19 persen di dalam Kawasan Konservasi, 15 persen di dalam Kawasan Hutan Produksi, 12 persen di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas, 12 persen di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi, dan 5 persen di dalam Areal Penggunaan Lain.
11	Sampai dengan tahun 2013 terdapat 41 juta hektare luas tutupan hutan alam yang berada di Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Area Penggunaan Lain yang belum memiliki lembaga yang bertanggung jawab sebagai pengelola di lapangan
12	Sekitar 73 juta hektare luas tutupan hutan alam di Indonesia terancam oleh kerusakan yang lebih besar di masa yang akan datang, baik yang disebabkan aktivitas penebangan dan konversi lahan yang terencana, akses terbuka (open access) terhadap lahan, serta ketidakhadiran pengelola di tingkat tapak.
13	Berdasarkan analisis FWI kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) di Indonesia pada periode 2009-2013 adalah sekitar 4,50 juta hektare dan laju kehilangan hutan alam Indonesia adalah sekitar 1,13 juta hektare per tahun.
14	Kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) terbesar selama periode 2009-2013 berdasarkan urutan provinsi: Provinsi Riau 690 ribu hektare, Kalimantan Tengah 619 ribu hektare, Papua 490 ribu hektare, Kalimantan Timur 448 ribu hektare, dan Kalimantan Barat 426 ribu hektare.
15	Kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) terbesar selama periode 2009-2013 berdasarkan fungsi Kawasan Hutan Negara dan Areal Penggunaan Lain secara berurutan adalah Kawasan Hutan Produksi dengan angka deforestasi 1,28 juta hektare, Areal penggunaan lain 1,12 juta hektare, Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi 0,78 juta hektare, Kawasan Hutan Produksi Terbatas 0,7 juta hektare, Kawasan Hutan Lindung 0,48 juta hektare dan Kawasan Konservasi 0,23 juta hektare.
16	Analisis FWI atas hasil penafsiran citra satelit di Indonesia menunjukkan bahwa kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) di lahan gambut pada periode 2009-2013 adalah 1,1 juta hektare. Angka ini adalah lebih dari seperempat total kehilangan tutupan hutan alam di seluruh Indonesia.

17	Kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) terbesar di lahan gambut selama periode 2009-2013 adalah di Provinsi Riau yaitu sebesar 500 ribu hektare.
18	Kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) selama periode 2009-2013 berdasarkan wilayah yang sudah dibebani izin pengelolaan hutan dan lahan (HPH, HTI, Perkebunan, dan Pertambangan) adalah sebesar 2,3 juta hektare. Sedangkan deforestasi yang terjadi di wilayah yang tidak dibebani izin adalah sebesar 2,2 juta hektare.
19	Kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) selama periode 2009-2013 di dalam konsesi HPH adalah sebesar 276,9 ribu hektare, dimana 152,8 ribu hektare diantaranya adalah kehilangan tutupan hutan alam di dalam konsesikonsesi HPH di Pulau Kalimantan
20	Sampai dengan tahun 2013 terdapat 22,8 juta hektare Kawasan Hutan Produksi yang dimanfaatkan oleh 272 unit manajemen IUPHHK-HA atau HPH yang memiliki izin definitif. Dari seluruh unit manajemen IUPHHK-HA tersebut, hanya 115 yang masih aktif beroperasi.
21	Sejak diterapkannya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di tahun 2009, hingga bulan Juni 2014 terdapat 112 unit manajemen IUPHHK-HA yang telah mengajukan permohonan sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), dan hanya 92 unit manajemen yang totalnya mengelola 10 juta hektare yang memperoleh Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). Sementara untuk sertifikasi Legalitas Kayu, terdapat 25 unit manajemen IUPHHK-HA yang mengajukan permohonan, dan hanya 22 unit yang memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
22	Kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) selama periode 2009-2013 di dalam konsesi IUPHHK-HT atau HTI adalah sebesar 453,1 ribu hektare, dimana 366,2 ribu hektare diantaranya adalah di dalam konsesi-konsesi HTI di Pulau Sumatera.
23	Dari sekitar 10 juta hektare luas IUPHHK-HT atau HTI di Indonesia, 4,5 juta hektare diantaranya berada di Pulau Sumatera (110 unit manajemen) dan 4,5 juta hektare lagi di Pulau Kalimantan (105 unit manajemen).
24	Sampai dengan tahun 2012 dari 234 unit manajemen IUPHHK-HT yang definitif, hanya 53 unit manajemen atau 23 persen saja yang telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
25	Sampai dengan Juni 2014 dari total 234 unit manajemen IUPPHK-HT hanya 44 unit yang telah bersertifikat PHPL, dan 58 unit telah bersertifikat LK.
26	Pasokan kayu dari hutan tanaman pada tahun 2012 adalah sebesar 26,12 juta m ³ atau sekitar 53 persen dari total produksi kayu nasional di tahun tersebut
27	Kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) selama periode 2009-2013 di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit adalah sebesar 515,9 ribu hektare, dimana 327,5 ribu hektare diantaranya berada di dalam konsesi-konsesi

	perkebunan sawit di Pulau Kalimantan.
28	Kalimantan Barat adalah provinsi dengan kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) terbesar di dalam konsesi perkebunan sawit yaitu 147,6 ribu hektare
29	Terdapat sekitar 44,3 juta hektare area berhutan alam di dalam Kawasan Konservasi, Kawasan Hutan Lindung, Lahan Gambut, dan Hutan-hutan Primer yang terliput oleh kebijakan Penundaan Pemberian Izin Baru (PPIB)
30	Kepulauan Aru di Provinsi Maluku merupakan cermin dari kelemahan kebijakan Penundaan Pemberian Izin Baru, di mana izin untuk perkebunan tebu seluas 67 ribu hektare malah diberikan di atas lahan berhutan alam di Kepulauan Aru yang telah termasuk di dalam wilayah PPIB
31	Terdapat 14 perusahaan IUPHHK-HT (HTI) yang terlibat kasus korupsi, 3 di antaranya adalah perusahaan yang telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan 8 lagi adalah perusahaan yang telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.
32	Pada periode 1990-2010 terdapat 2.585 kasus konflik di 27 provinsi di Indonesia yang melibatkan masyarakat adat/lokal. Dari total kasus konflik tersebut 1.065 adalah kasus konflik di sektor kehutanan dan 563 kasus di sektor perkebunan
33	Pada laju kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) yang sama maka diperkirakan pada tahun 2023 hutan alam di beberapa provinsi akan habis, termasuk provinsi-provinsi di Sumatera yaitu Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Sumber : Data Temuan Forest Watch Indonesia

Sejauh ini pendataan tentang kondisi hutan di Indonesia masih sampai tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Forest Watch Indonesia sebagai lembaga independen. Catatan tentang penurunan luas hutan atau deforestasi di mulai pada tahun 1989 oleh Kementerian Kehutanan. Tahun 1989 – 1997 Kementerian Kehutanan menjelaskan penurunan jumlah luas hutan yaitu sekitar 1, 7 juta hektar. Kemudian FAO (2007) data tentang penurunan luasan hutan sebesar 1,87 juta Hektar pada tahun 2000 – 2005. Penulis tidak dapat menemukan literasi atau hasil temuan tentang data kondisi hutan di Indonesia yang terbaru yaitu antara 2013 sampai 2018 karena kemungkinan pendataan tersebut bisa saja belum dimulai ataupun belum selesai.

2.1.3 Konstruksi Sosial

Ancaman deforestasi yang terus membayangi dalam pengurangan hutan di Indonesia saat ini semakin lama semakin banyak. Perubahan konsesi lahan hutan

menjadi lahan produksi menjadi ancaman serius dalam keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Ancaman kerusakan lingkungan berakibat pada kondisi masyarakat itu sendiri secara tidak langsung. Karena kehidupan manusia membutuhkan unsur-unsur untuk hidup dan berkembang seperti sumberdaya air, udara dan sumber daya lainnya. Jika salah satu faktor penyangga tersebut terganggu maka rotasi kehidupan pun juga terganggu. Beberapa kasus, masyarakat adat atau masyarakat sekitar hutan dianggap menjadi faktor dari kerusakan tersebut. Oleh karena itu secara kaidah akademis penulis ingin mengetahui konstruksi sosial masyarakat di salah satu desa yang berdekatan dengan hutan konservasi.

Berger dan Luckman (Bungin, 2008:14) mulai menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman 'kenyataan dan pengetahuan'. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan (being) yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri. Pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (real) dan memiliki karakteristik yang spesifik. Dalam melihat realitas yang terjadi dalam kajian sosiologis tentang kehutanan, memang tidak dapat dilepaskan dari proses rangsangan dari luar yang sistematis. Dalam realitas yang terjadi, deforestasi ini bisa jadi proses yang murni sebagai gerakan sosial atau kecenderungan model pembangunan dari negara. Dimana jika terdapat gerakan murni yang kemungkinannya berasal dari himpitan ekonomi maka dibutuhkan kajian tentang kenyataan hidup sehari – hari pada masyarakat. Konsepsi tentang konstruksi sosial yang dikaitkan dengan usaha konservasi, dan deforestasi yang terjadi di salah satu Taman Nasional ini dibutuhkan penjelasan dan pendekatan yang prahmatis untuk melihat dan menjelaskan realitas yang terjadi didalamnya, yaitu tentang dasar-dasar pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Dimana bentuk dari deforestasi yang terjadi dan kenapa bisa sampai terjadi perlu adanya analisa yang detil yang difokuskan pada pola pikir masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan.

Konstruksi sosial sendiri merupakan sebuah konsep yang diciptakan oleh Peter L Berger dan Luckman (1990). Konstruksi sosial yang kami kaitkan dengan konsepsi penelitian ini pada dasarnya mencari akar permasalahan dan kami langsung mengambil objek pada pengetahuan masyarakat. Upaya Deforestasi menyebabkan

munculnya masalah baru yang dialami dengan dampak terbesarnya kepada masyarakat kita sendiri. Dari permasalahan tersebut peneliti ingin mencari tahu dengan detil bagaimana hal tersebut dapat terjadi dikaji dengan konsep konstruksi sosial. Pada penelitian ini harapan peneliti untuk menemukan pola seperti apa yang melingkupi berbagai unsur dan keterkaitannya serta hubungan yang saling melengkapi antar satu sama lain.

Dari konstruksi sosial yang kami anggap merupakan bentukan dari para pengambil kebijakan tentang pengetahuan masyarakat desa hutan. Dimana hutan bisa jadi menjadi komoditas yang hanya boleh dikelola oleh negara atau badan atau lembaga yang memiliki tingkat legalitas yang kuat dan tidak dimiliki sama sekali oleh masyarakat. Sesuai dengan konsep ini, kami ingin melihat bagaimana realitas masyarakat terbentuk, apakah hutan memang di sakralkan oleh para lembaga atau negara dari jangkauan masyarakat. Kedua, apakah masyarakat tahu sejauh mana hak tata kelola yang dimiliki tentang pengelolaan hutan ini. Dan ketiga bagaimana sikap dan perilaku masyarakat dalam melihat fungsi hutan ini jika dikaitkan dengan realitas yang berlaku terkesan mengkonservasi hutan dari masyarakat biasa. Melalui konsep konstruksi sosial ini saya tidak akan berbicara tentang proses terjadinya konstruksi sosial kepada masyarakat Sukamade. Konstruksi sosial ini saya pahami sebagai wujud hasil dari rangsangan – rangsangan pengetahuan atau kami menyebutnya sebagai sosialisasi dari agen – agen sosial. Agen – agen sosial ini bisa jadi dari masyarakat sendiri, atau stakeholder yang berada dan berdampingan dengan kawasan konservasi seperti perkebunan dan Taman Nasional itu sendiri. Konstruksi sosial yang notabene sebagai wujud akhir dari proses sosialisasi akan berakibat dari tindakan – tindakan masyarakat, apakah mereka menerima usaha sosialisasi atau menolak sebagai wujud pertimbangan yang lain seperti ada hal yang belum mereka dapatkan disana. Kemudian nilai – nilai sosial sebagai dampak pembentukan tindakan sosial yang mengakar dan menjadi sebuah kebudayaan yang bisa jadi masyarakat sendiri tidak menyadari bagaimana nilai – nilai sosial ini terbangun.

2.2 Kerangka Dasar Teori.

Kemunculan problema di era dewasa ini terkait isu lingkungan, krisis pangan dan energi selalu menjadi kajian yang diulas berulang kali dalam menemukan kunci keberhasilan termasuk alih fungsi hutan (deforestasi). Oleh karena strategi kehidupan dalam mengupayakan bagaimana manusia dapat terus bertahan hidup atau dengan keyakinan masalah tersebut dapat dihentikan. Konsepsi tentang bagaimana masyarakat sebagai pusat semesta (antroposentrisme) ternyata berakibat buruk terhadap keadaan dan lingkungan sekitar. Berlainan dengan konsepsi alam sebagai pusat semestanya (biosentrisme) yang berasumsikan alam harus tetap ada dan harus terjaga. Kesadaran yang dibangun dengan pengetahuan seharusnya dapat membuat perubahan yang baik di kemudian hari. Kesadaran yang dibangun dari pengetahuan juga mempunyai peran yang signifikan untuk melihat fenomena yang terjadi dan latar belakang yang menyebabkan fenomena itu. Deforestasi merupakan kasus yang cukup serius terlebih lagi berhubungan dengan masyarakat yang ada di sekitar hutan. Pembentukan pengetahuan dan usaha peyuluhan (stimulan) memang tidak dapat terjadi satu dua kali usaha, bahkan untuk membangun sebuah kesadaran baru pun membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana konstruksi masyarakat Dusun Sukamade terkait dengan deforestasi, apakah masyarakat yang selama ini menghuni di dalam atau ditengah kawasan konservasi memiliki pengaruh terhadap ancaman deforestasi tersebut.

Dalam penelitian ini kami menggunakan kerangka teori konstruksi sosial yang diusung oleh Peter L Berger & Luckman. Pada bagian ini penulis akan memaparkan kerangka berfikir yang digunakan sebagai landasan dalam melihat fakta yang ada dilapangan. Kerangka berfikir berikut merupakan pandangan atau cara berfikir awal peneliti dalam mengkaji fakta yang berada di lapangan. Untuk penelitian ini peneliti menggunakan perspektif sosiologi pengetahuan yang merupakan konsep teoritis Peter L Berger tentang konstruksi sosial. Analisa penggunaan teori konstruksi sosial dalam data temuan dilapangan peneliti ingin melihat bagaimana masyarakat menilai hutan sebagai bagian dari kehidupan. Proses obyektivasi seperti apa yang masyarakat dapatkan melalui pihak negara yang

direpresentasi oleh pihak Taman Nasional. Dari konsepsi ini penulis mencoba menjelaskan bagaimana nilai-nilai konservasi hutan dapat terwujud dan diterima masyarakat. Dari konsepsi ini peneliti juga mengembangkan data awal temuan di lapangan menjadi dua kerangka berfikir, yaitu selain mengenai nilai-nilai konservasi juga terdapat pula pengembangan wisata yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Karena secara legal formal Taman Nasional yang memiliki nilai-nilai fungsi di dalamnya terdapat pula fungsi edukasi dan pariwisata. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat bagaimana proses pembentukan pengetahuan sampai menjadi sebuah kesadaran atau konstruksi sosial tentang nilai-nilai konservasi dapat diterapkan dalam masyarakat. Individu adalah manusia yg bebas yang melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain.

Konstruksi sosial yang coba dijelaskan oleh Peter L Berger dan Luckman (1996) ini pada dasarnya terdiri dari 3 konsep dasar yang coba disederhanakan oleh dialektika yaitu eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi.. Tugas utama sosiologi pengetahuan dalam menjelaskan adanya dialektika antara diri (the self) dan dunia sosio – kultural, dialektik itu berlangsung dalam suatu proses dengan tiga “momen” simultan yakni eksternalisasi (penyesuaian diri dengan dunia sosio – kultural sebagai produk manusia), obyektivasi (interaksi sosial dalam dunia inter – subjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusialisasi), dan internalisasi yaitu individu mengidentifikasi diri dengan lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya(Berger dan Luckmann 1996). Eksternalisasi, eksternalisasi ini mencoba menyesuaikan diri terhadap rangsangan yang diterima dalam bentuk dimana posisinya dalam lembaga sosial tersebut. Sebagai bentuk perwujudan bahwa masyarakat adalah bentuk dari individu – individu yang dibentuk secara masif, eksternalisasi mencoba menggambarkan dengan lugas bagaimana pandangannya terhadap sesuatu. Dan hal inipun atau pengetahuan yang terbentuk dari rangsangan lingkungannya menjadikan konstruksi tersebut sebagai hasil dari pemikirannya. Logika pemikiran yang diterima subjek individu yang terpengaruh dari lingkungan inilah bentuk akhir dari konstruksi sosial.

Objektivasi atau proses dimana upaya mendapatkan rangsangan dari apa yang subjek dapat atau dengan sederhanya subjek mencoba melihat bahwa interaksi sosial berada dalam institusionalisasi dalam dunia intersubjektif. Dalam proses ini subjek berfikir dengan rasionalnya dalam melihat bagaimana proses rangsangan yang diterimanya tersebut diterima atau ditolak. Upaya pembentukan stimulan ini pada dasarnya mencoba menggali apa yang kenyataan dan pengetahuan itu sendiri. Proses ini mencoba melihat realitas yang terjadi pada masyarakat. Objektivasi ini secara tidak langsung terpapar dari pengalaman dalam melihat intersubjektifitas lain yang dilakukan secara terus menerus. Kemudian Internalisasi, sebagai pemahaman konsep yang terbangun dalam interpretatif subjek tersebut untuk mencoba menimbang dimanakah posisinya dalam sebuah lembaga sosial mana ia berada. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya (Basrowi dan Sukidin, 2002 : 194). Dan yang terakhir adalah internalisasi, dari beberapa tahapan pembentukan kesadaran ini muncul dua konsep hasil dari konstruksi sosial ini terdapat dua hasil terjemahan dari kesadaran masyarakat yaitu disektif dan missektif. Dalam bahasa hegelian, kedua bentuk konsepsi adalah tesis dan anti tesisnya, dimana sebuah kesadaran masyarakat dalam objektifikasi terhadap nilai-nilai konstruksi tentang konservasi akan diterima atau ditolak. Dalam melihat dari proses konstruksi sosial ini objektivasi bergerak dari sebuah bentuk rangsangan dari para lembaga penyuluh atau peranan penguasa dalam menginisiasi masyarakat untuk memahami dari sebuah nilai. Nilai yang coba dijelaskan adalah tentang konservasi dan kesadaran terhadap konservasi itu sendiri. Pengetahuan yang dibangun merupakan wujud dari rangsangan baik dari pengalaman, pendidikan dan lingkungan kerja masyarakat itu sendiri. Baik dari segi baik atau buruknya sebuah usaha lembaga dalam membentuk kesadaran masyarakat pada dasarnya terdapat dari hasil akhir persepsi masyarakat itu sendiri baik diterima ataupun ditolak.

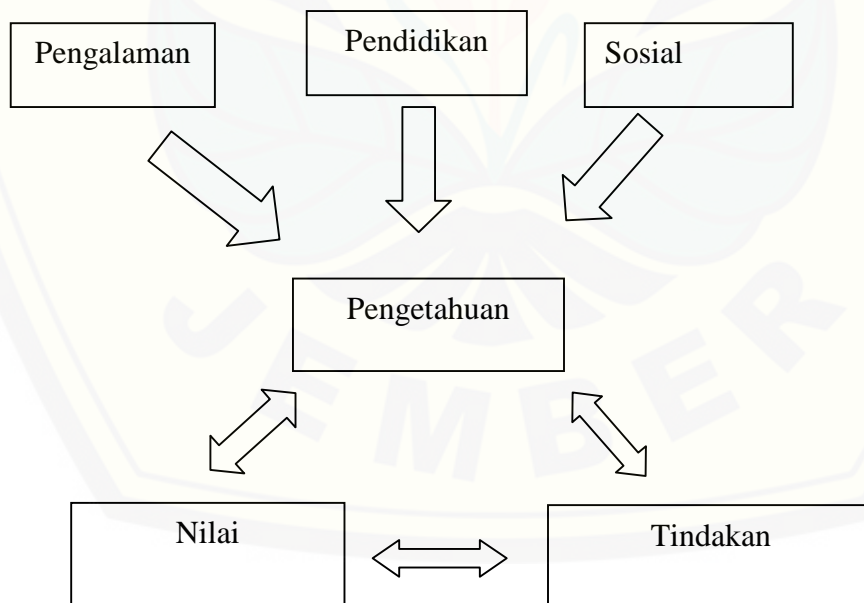
Dari konsep internalisasi inilah penulis mencoba menjelaskan bagaimana kondisi sebuah realita masyarakat Dusun dan di tengah kawasan konservasi. Internalisasi masyarakat dalam menyadari sebuah nilai yang sedang membangunnya, tentu akan

mengalami dialektika dan melalui predisposisi kesadaran yang cenderung ke arah sosialitas. Rangsangan terhadap individu pun dibagi menjadi dua tipe yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer cenderung dilakukan kepada masyarakat usia dini atau anak – anak, sehingga menumbuhkan pengetahuan yang dicerna sempurna dari masyarakat. Semisal anak – anak diajarkan untuk tidak menggunakan tangan kiri saat makan pada budaya Jawa, maka besar kemungkinan rangsangan dan pengetahuan yang ia terima akan melekat sampai usia yang lebih matang nantinya. Kemudian sosialisasi sekunder, sosialisasi ini dilakukan kepada masyarakat usia matang. Dengan berbagai intervensi lingkungan sosial masyarakat sekitarnya maka pengetahuan akan dapat diterima bagi individu tersebut. Inilah yang menurut penulis menjabarkan internalisasi pada masyarakat usia sekunder semisal masyarakat Dusun Sukamade tentang konservasi. Sosialisasi bagi masyarakat usia sekunder merupakan hal yang cukup berat, selain dari rangsangan pengetahuan yang baru, kesadaran dan kebiasaan lama juga menjadi hal kompleks untuk di cerna dalam dunia intersubjektivitasnya. Pembangunan pengetahuan baru tidak melulu terjadi dari agen – agen baru yang mencoba memasukan pengetahuan kepada setiap individu akan tetapi pengetahuan yang didasari dari pengalaman individu dalam menginterpretasi juga merupakan pembentukan pengetahuan baru. Contoh saja pengetahuan lokal masyarakat tentang hal yang berbau mistis akan ditanggapi berbeda pada setiap orang. Tentu dari pengalaman individu tentang hal – hal yang berbau mistis atau supranatural akan terjalin interaksi yang saling melengkapi setiap versinya. Bisa saja versi individu A akan sama dengan individu B maka kecenderungan setiap individu yang berada dalam konteks yang sama akan berfikir yang sama terhadap pengalaman individu sebelumnya dan mempengaruhi individu baru.

Tidak hanya sebatas pengalaman dan pengetahuan, setiap individu yang tergabung dan membentuk sebuah komunitas (society) juga memiliki pengaruh dalam membentuk sebuah kesadaran baru. Dalam konsep parsonian komitmen kolektif mampu membangun sebuah kesadaran dan pengetahuan baru dan mempengaruhi individu atau kelompok. Pengaruh dari kesadaran kolektif inilah yang menjadi upaya dalam membangun kesadaran baru, terutama tentang masalah

konservasi. Selain dari sosial dan pengalaman, pendidikan setiap individu juga menjadi hal yang diperhitungkan terlebih kesadaran baru tersebut dapat dipatahkan oleh pengetahuan individu yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup. Dalam artian pendidikan yang cukup akan pengetahuan akan mempengaruhi kelompok kesadaran kolektif dalam mencari kebenaran dan kesepakatan bersama. Contoh dalam sebuah komunitas tertentu mempunyai pengalaman bercocok tanam menggunakan sistem tradisional, kemudian keberadaan individu baru seperti penyuluh memberikan alternatif lain yang lebih mudah dan lebih menguntungkan, tentu pengalaman kolektif ini akan terpengaruh dengan sistem baru yang lebih efektif dari individu yang memiliki pendidikan yang cukup tersebut. Dari ketiga hal tentang internalisasi seperti pengalaman, sosial dan pendidikan akan menumbuhkan pengetahuan baru. Dari pengetahuan baru ini akan muncul sebuah hasil apakah masyarakat menerima pengetahuan baru dengan berindak secara kooperatif ataupun menolak dan malah melakukan tindakan kontra seperti pelanggaran.

Gambar 1. Skema Konsep.



2.3 Penelitian Terdahulu.

Masyarakat hutan juga harusnya masuk menjadi konsentrasi pemerintah dalam segala hal termasuk pemberdayaan, pembangunan, jaminan kesehatan dan kesejahteraannya. Dalam kajian penelitian terdahulu dapat dilihat bagaimana pola kehidupan masyarakat desa hutan yang hampir sama di setiap daerah khususnya di pulau Jawa. Kasus illegal logging, pembukaan lahan untuk pertanian sampai pada ancaman kekeringan masih menjadi topic unggulan bagaimana kehidupan di hutan sangat begitu penting dan ketergantungan terhadapnya sangat tinggi tak ubahnya komunitas masyarakat yang mendiami pinggiran hutan. Revolusi hijau yang digembar-gemborkan pada era orde baru di satu sisi memang membuat ketersediaan bahan pangan yang melimpah sampai pada sebuah kenyataan Negara ini termasuk Negara kuat yang berdikari dan berdaulat di bidang pangan. Satu sisi yang lain juga tak ubahnya seperti 2 sisi koin yang selalu berbeda tampaknya, pembukaan lahan besar-besaran sampai pada akhirnya masyarakat yang tidak mendapatkan bagian di daerah tanah datar harus bergeser menuju pinggiran hutan dan membukanya untuk dijadikan lahan pertanian sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi dari jumlah luas hutan itu sendiri.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi Subektini tentang analisa Sosial Ekonomi masyarakat di zona rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri. Dalam penelitiannya beliau menjelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat ini tergolong rendah, dengan pendapatan yang berasal dari pertanian dan non pertanian. Ketergantungan non pertanian yang terdapat pada kontribusi pengambilan hasil hutan. Menurutnya masyarakat yang berada di zona rehabilitasi merupakan salah satu ancaman yang tinggi, karena dilihat dari penemuannya yang mayoritas masyarakatnya memiliki pendidikan rendah yang didominasi oleh tamatan Sekolah Dasar (SD), serta usia produktif masyarakat lebih dari setengah seluruh masyarakat yang berasal dari zona rehabilitasi. Untuk mata pencaharian mayoritas berada pada sektor pertanian dengan 44 % dan 31,5% merupakan buruh tani. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan serta pendayagunaan lahan masih menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan rehabilitasi hutan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dyah Edningtyas yang menganalisa tentang kemandirian masyarakat desa sekitar hutan dalam melakukan agroforestri. Kajian ini menjelaskan tentang usaha Agroforestri kopi di BKPH Pengalengan. Dalam temuannya menjelaskan bahwa kemandirian petani dalam melakukan agroforestri kopi terolong tinggi akan tetapi kemandirian untuk usaha produksi tergolong masih rendah karena terbatasnya pengetahuan tentang budidaya kopi. Yang menjadi faktor penentu kemandirian dijelaskan bahwa usia pelaku usaha agroforestri cukup menjadi hal signifikan karena semakin dewasa seseorang maka pengalaman yang diperoleh dalam melakukan agroforestri kopi juga cukup banyak yang didapat. Selain daripada itu adalah luas garapan, ketersediaan sarana produksi, interaksi dengan lembaga keuangan, interaksi dengan lembaga penyuluhan dan interaksi dengan LMDH atau lembaga masyarakat desa hutan. Pengaruh dari kebijakan lokal oleh tokoh masyarakat dan nasional oleh lembaga penyuluh tentang manfaat program PHBM (pengelolaan hutan bersama masyarakat) juga menjadi factor dalam keberhasilan proses yang dilakuka oleh masyarakat. Meskipun dalam kenyataannya kendala terhadap modal usaha dan minimnya pengetahuan teknik budidaya kopi masih ada dan juga menjadi hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat daerah Pengalengan ini.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Gunggung Senoaji tentang kontribusi hutan lindung terhadap pendapatan masyarakat desa di sekitarnya. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa masyarakat mayoritas bekerja sebagai petani dan lading kebunnya ditanam tumbuhan baik tumbuhan bumbu pokok seperti cabe kemudian makanan tambahan seperti petai dan tanaman kayu berbuah seperti durian. Tanaman kopi sebagai prestise dengan luas lahan garapan rata – rata sekitar 2,5 hektar. Untuk menentukan pendapatan masyarakat sangat tergantung sekali dengan harga kopi jika missal batas harga kopi berada dibawah 6000/kg maka masyarakat berada dibawah garis kemiskinan, jika diatas dari harga tersebut maka masyarakat akan hidup berkecukupan. Jika dilihat rata-rata panen bertotal 500 kg/ hektar setiap tahunnya. Dalam kesimpulannya, Gunggung senoaji menjelaskan bahwa hutan berperan sangat vital sekali terhadap kebutuhan masyarakat untuk menyambung

hidup dengan tingkat prosentase sekitar 52,5% atau dengan kata lain separuh lebih pendapatan masyarakat berasal dari hutan.

Penelitian yang lain tentang ekowisata dilakukan oleh Lailatul Qomariah dengan judul Pengembangan Ekowisata TNMB di daerah kajian blok Rajegwesi. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perbedaan persepsi oleh masyarakat terhadap keberadaan ekowisata di Rajegwesi mengakibatkan potensi konflik. Tingginya keinginan masyarakat baik masyarakat sekitar tempat wisata sampai luar daerah untuk ikut berpartisipasi karena pandangan mereka menganggap bahwa dilihat dari segi ekonomis lebih tinggi daripada pendapatan mata pencaharian awal jika dilihat masyarakat sekitar adalah mayoritas sebagai nelayan. Perkembangan terhadap adanya pariwisata juga membuat potensi enclave atau pertambahan animo pendatang untuk menetap di daerah tersebut, hal tersebut dirasa dapat menjadi problem baru terhadap keberadaan tempat pariwisata di TNMB sektor Rajegwesi.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1.	Dewi Subektini	Analisa Sosial Ekonomi Masyarakat Di Zona Rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri	Kondisi sosial ekonomi masyarakat ini tergolong rendah, dengan pendapatan yang berasal dari pertanian dan non pertanian. Ketergantungan non pertanian yang terdapat pada kontribusi pengambilan hasil hutan. Menurutnya masyarakat yang berada di zona rehabilitasi merupakan salah satu ancaman yang tinggi, karena dilihat dari penemuannya yang mayoritas masyarakatnya memiliki pendidikan rendah yang didominasi oleh tamatan sekolah dasar (sd), serta usia produktif masyarakat lebih dari setengah seluruh masyarakat yang berasal dari zona rehabilitasi. Untuk mata pencaharian mayoritas berada pada sektor pertanian dengan 44 % dan 31,5%

			merupakan buruh tani.
2.	Dyah Edningtyas	Kemandirian Masyarakat Desa Sekitar Hutan Dalam Melakukan Agroforestri Kopi Di BKPH Pengalengan	Kemandirian petani dalam melakukan agroforestri kopi terolong tinggi akan tetapi kemandirian untuk usaha produksi tergolong masih rendah karena terbatasnya pengetahuan tentang budidaya kopi. Yang menjadi faktor penentu kemandirian dijelaskan bahwa usia pelaku usaha agroforestri cukup menjadi hal signifikan karena semakin dewasa seseorang maka pengalaman yang diperoleh dalam melakukan agroforestri kopi juga cukup banyak yang didapat. Selain daripada itu adalah luas garapan, ketersediaan sarana produksi, interaksi dengan lembaga keuangan, interaksi dengan lembaga penyuluhan dan interaksi dengan LMDH .Pengaruh dari kebijakan lokal oleh tokoh masyarakat dan nasional oleh lembaga penyuluh tentang manfaat program PHBM (pengelolaan hutan bersama masyarakat) juga menjadi factor dalam keberhasilan proses yang dilakuka oleh masyarakat. Meskipun dalam kenyataannya kendala terhadap modal usaha dan minimnya pengetahuan teknik budidaya kopi masih ada dan juga menjadi hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat daerah Pengalengan ini.
3.	Gunggung Senoaji	Kontribusi Hutan Lindung Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Di Sekitarnya	Masyarakat mayoritas bekerja sebagai petani dan lading kebunnya ditanam tumbuhan baik tumbuhan bumbu pokok seperti cabe kemudian makanan tambahan seperti petai dan tanaman kayu berbuah seperti

			<p>durian. Tanaman kopi sebagai prestise dengan luas lahan garapan rata – rata sekitar 2,5 hektar. Untuk menentukan pendapatan masyarakat sangat tergantung sekali dengan harga kopi jika missal batas harga kopi berada dibawah 6000/kg maka masyarakat berada dibawah garis kemiskinan, jika diatas dari harga tersebut maka masyarakat akan hidup berkecukupan. Jika dilihat rata-rata panen bertotal 500 kg/ hektar setiap tahunnya</p>
4.	Lailatul Qomariah	Pengembangan Ekowisata TNMB Di Daerah Kajian Blok Rajegwesi	<p>Perbedaan persepsi oleh masyarakat terhadap keberadaan ekowisata di Rajegwesi mengakibatkan potensi konflik. Tingginya keinginan masyarakat baik masyarakat sekitar tempat wisata sampai luar daerah untuk ikut berpartisipasi karena pandangan mereka menganggap bahwa dilihat dari segi ekonomis lebih tinggi daripada pendapatan mata pencaharian awal jika dilihat masyarakat sekitar adalah mayoritas sebagai nelayan. Perkembangan terhadap adanya pariwisata juga membuat potensi enclave atau pertambahan animo pendatang untuk menetap didaerah tersebut, hal tersebut dirasa dapat menjadi problem baru terhadap keberadaan tempat pariwisata di TNMB sektor Rajegwesi.</p>

Dalam beberapa penelitian terdahulu terdapat beberapa pola yang dapat dikembangkan pada penelitian ini. Dari penelitian tersebut dapat diambil pola, terdapat unsur yang bisa dikelompokkan seperti pendidikan, ekonomi, kepemilikan lahan dan faktor Negara yang harus hadir yang direpresentasikan oleh lembaga

seperti pengelola Taman Nasional. Antara setiap penelitian beberapa kesimpulan dapat disatukan seperti hal, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi serta ancaman terhadap kelestarian hutan menjadi sedikit. Dengan kata lain tingkat pendidikan yang dimiliki narasumber dimaksudkan untuk keterbukaan pikiran tentang konsekuensi kehidupan yang terus bergantung dengan hutan menyebabkan kerusakan.

Tingginya tingkat pendidikan seseorang dimaksudkan untuk pengalih fungsian hutan yang tidak pada orientasi pertanian hutan (agro forestry) semata, melainkan lebih mengusung orientasi lain yang daya jual atau nilai ekonomisnya lebih tinggi dari pertanian hutan akan tetapi kelestarian hutan tetap terjaga. Berbeda dengan penelitian kami yang mencari bagaimana pola kerjasama dalam manajemen hutan yang berbasis konservasi yang di analisis menggunakan teori konstruksi sosial. Sehingga dalam kesimpulannya diharapkan bahwa ada pola yang diusung dalam penelitian ini. Kemudian mampu melihat dan menjelaskan bagaimana hubungan yang efektif terkait para pemangku kepentingan dan masyarakat. Dan menjadi alternatif untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat dan kelestarian hutan di masa akan datang khususnya kawasan Taman Nasional Meru Betiri.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian (Mulyana, 2008:151). Penelitian kualitatif digunakan guna memahami sebuah keseluruhan fenomena yang terjadi di masyarakat secara luas seperti perilaku, persepsi, motivasi ataupun juga tindakan. Selain itu penggunaan metode kualitatif penulis anggap dapat menjelaskan sebuah kejadian secara holistik dan detil atau dalam artian tidak hanya menyajikan data, angka dan statistik. Fenomena deforestasi yang peneliti angkat dan di interpretasikan dengan konsep teori konstruksi sosial maka metode penelitian kualitatif sesuai dengan topik penelitian.

Bogdan dan Taylor (dalam Sihite, 2007:95) menjelaskan bahwa metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami individu secara personal. Menurut Sa'ud (dalam Ghony dan Almanshur, 2012:13-14) penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, kepercayaan, persepsi dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok. Jadi pada dasarnya penelitian dengan jenis kualitatif yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu tentang konstruksi sosial yang berhubungan dengan kasus deforestasi. Untuk itu metode kualitatif digunakan untuk melihat seberapa jauh bagaimana obyek penelitian dan subyek penelitian dapat terjangkau melalui penjelasan data-data yang menyeluruh.

3.2. Setting Lokasi Penelitian.

Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di Taman Nasional Meru Betiri via Banyuwangi, Di kawasan hak guna usaha PT. Sukamade Baru Dusun Sukomade Kecamatan Pesanggaran. Penelitian dilakukan di Sukamade karena yang pertama

Dusun Sukamade merupakan Dusun yang berada di tengah kawasan konservasi, sehingga untuk mencari data tentang deforestasi melalui pendekatan partisipan cukup memadai. Selain untuk melihat kepentingan penelitian, Sukamade kami gunakan sebagai lokasi penelitian karena memiliki kompleksitas struktur masyarakat dan kondisi yang unik. Dimana masyarakat hidup berdampingan dengan hutan, perkebunan dengan segala keterbatasan dan keterisoliran.

Alasan penelitian saya lakukan di Dusun Sukamade adalah saya mencoba mengambil setting Sukamade karena saya mencoba menelusuri jejak historis bagaimana deforestasi terjadi di pulau Jawa khususnya Sukamade karena memiliki rekam jejak perkebunan dan saat ini bersebelahan dengan kawasan Taman Nasional. Dari beberapa data temuan oleh forest watch Indonesia (FWI) dibandingkan oleh penelitian yang saya lakukan memang memiliki perbedaan yang sangat jauh. Selain luasan yang sangat kecil deforestasi di Jawa tidak begitu populis karena deforestasi besar – besaran juga tidak lepas dari pembangunan peradaban tempo dulu yang Jawa sentris. Dari rangkuman data hutan di Jawa Khususnya Taman Nasional Meru Betiri yang terbatas. Saya mencoba melihat lebih dalam terhadap persepsi dan pengetahuan masyarakat yang beberapa temuan lain tentang masyarakat lokal menjadi sosok yang dicitrakan dari penyebab kerusakan hutan. Selain daripada itu temuan kerusakan hutan juga terjadi di kawasan Taman Nasional Meru Betiri seperti curah nongko, Andongsari, Sarongan dan Kandangan. Hal tersebut terjadi karena hutan yang berbatasan langsung dengan masyarakat, dan dari latar belakang inilah peneliti mencoba mengambil objek kajian di Dusun Sukamade.

Dari beberapa data temuan oleh FWI, memang terdapat banyak usaha konsesi yang berhubungan dengan perkebunan, baik perubahan konsesi lahan hutan menjadi perkebunan sawit atau perkebunan reguler seperti kakao, kopi dan karet. Dari hal tersebut saya mencoba melihat bagaimana masyarakat dibangun realitasnya dan Sukamade selain dari masyarakat sekitar hutan juga menjadi masyarakat yang memiliki struktur perkebunan sehingga saya melihat Sukamade cocok sebagai setting penelitian saya. Selain dari latar belakang tentang perkebunan dan dikomparasikan dengan data FWI (forest watch Indonesia) keterbatasan akses dan fasilitas untuk

meninjau tempat lain dengan setting lokasi yang jauh belum dapat dilaksanakan karena alasan estimasi waktu dan pembiayaan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi langsung. Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004 : 104). Observasi langsung kami gunakan untuk mengantisipasi apabila terdapat penjelasan yang ditutupi sehingga peneliti susah untuk melihat fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain (Sugiyono 2009 : 114) Metode observasi ini kami pakai sebagai pengumpulan data karena melihat topik yang kami lakukan merupakan topik lintas waktu yang bisa jadi di lapangan dan data sebelumnya terdapat revisi dan mengantisipasi apabila topik kami di objek penelitian merupakan penelitian pertama. Maksud dari topik lintas waktu adalah sebuah fenomena yang terjadi di masa lalu sampai sekarang, fenomena yang terus berjalan tentang deforestasi cukup rumit berbeda dengan fenomena seperti clsh yang setiap orang masih tergambar jelas tentang peristiwa tersebut. Selain untuk menambah informasi dari teknik pengumpulan data yang lain, observasi akan terus kami upayakan untuk melihat dan menggambarkan situasi dan kondisi di dalam masyarakat Sukamade.

b. Wawancara Secara Mendalam (in depth interview).

Untuk menggali informasi dan mendapatkan data primer, wawancara kami lakukan kepada subyek penelitian. Wawancara yang kami lakukan, sebelumnya kami persiapkan draft wawancara sehingga kami mendapat informasi dan data yang kami inginkan, akan tetapi ditengah wawancara apabila terdapat pembahasan tidak menutup kemungkinan akan kami periksa dan perluas sesuai dengan topik. Pengertian wawancara sendiri menurut Joko Subagyo (2011:39) adalah Suatu

kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Pengertian wawancara menurut Esterberg yang diterjemahkan oleh Sugiyono (2009:72) adalah sebagai berikut Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Sebagai penunjuk jalan terhadap topik yang sedang kami gali, studi pustaka kami lakukan untuk melihat sejauh mana kondisi di lapangan. Peneliti berusaha mencari referensi – referensi yang sesuai dengan topik yang sesuai dengan penelitian kami. Studi pustaka kami mulai dengan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan objek penelitian ataupun subjek. Selain dari penelitian terdahulu kami berusaha mencari literatur dari buku ataupun jurnal – jurnal baik secara cetak ataupun elektronik.

c. Dokumenter

Untuk melengkapi penelitian yang kami lakukan, tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan data sekunder yang mendukung penelitian kami. Data sekunder yang kami perlukan adalah data yang berasal dari arsip atau catatan – catatan. Pengertian Dokumentasi menurut Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, Lina Ismawati (2010:39) adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada perusahaan. Pengertian dokumentasi menurut Suharsimi Arikanto (2011:201) adalah Dokumentasi adalah barang-barang tertulis. Dan Pengertian dokumentasi menurut Sugiyono (2009:82) adalah sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu.

3.4 Penelusuran Informan

Subyek Penelitian adalah para petugas Taman Nasional Meru Betiri dan juga tokoh masyarakat Dusun Sukomade yang mewakili sebagai kunci informan. Informan yang kami pilih sebelumnya berasal dari salah satu tokoh pegawai Taman Nasional yang berjabatan sebagai penyuluh di SPTN Sarongan. Nama – nama informan merupakan bagian dari tokoh kunci baik dari lapisan masyarakat,

perkebunan dan Taman Nasional. Metode yang digunakan untuk mencari narasumber adalah dengan menggunakan pendekatan *purposive*. Alasan menggunakan menggunakan pendekatan *purposive* adalah peneliti tidak memiliki koneksi terhadap kawasan tersebut, dan alternatifnya adalah menggunakan rujukan dari para petugas Taman Nasional yang dapat menjadi narasumber selain daripada masyarakat Dusun Sukamade.

Peneliti mengambil beberapa tokoh kunci yang dapat memberikan keterangan dan penjelasan yang dibutuhkan peneliti. Adapun informan tersebut berasal dari beberapa tokoh di resort Sukamade yaitu bapak Hartono selaku mantan kepala resort Sukamade, kemudian bapak Nyoto Prasetyo sebagai kepala resort yang baru, beberapa informan yang lain seperti petugas UPKP dan polisi hutan yang sedang berdinis di resort tersebut. Informasi dari pihak Taman nasional selain melalui wawancara juga melalui catatan lapangan pada kegiatan sehari-hari yang dapat kami analisa dan memperkuat data. Informan dari pihak kedua yaitu perwakilan dari pihak perkebunan adalah bapak Sulaiman selaku ADM PT Sukamade baru. Secara pribadi bapak Sulaiman merupakan petinggi perkebunan yang secara detail dapat memberikan keterangan seputar kegiatan kebun dan hubungannya dengan pegawai dan pihak Taman Nasional. Pihak ketiga adalah perwakilan dari masyarakat, saya memilih kepala Dusun yang bernama Pak Feri dan tokoh masyarakat yaitu Pak Haji Busiri. Alasan saya mencari informasi dari Pak Feri adalah beliau merupakan kepala Dusun yang notabene merupakan ujung kepemimpinan di Dusun. Yang kedua adalah Pak Haji Busiri, alasan saya untuk meminta keterangan karena beliau merupakan salah satu tokoh yang dituakan di masyarakat dan menjadi salah satu tokoh kunci di dalam Dusun Sukamade.

3.5 Validitas Data

Validitas merupakan keakuratan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek

penelitian(Sugiyono,2005:117). Data yang disampaikan dan dianalisa peneliti merupakan rujukan langsung dari narasumber yang sebelumnya sudah di reduksi. Sehingga memudahkan peneliti untuk membagi data mana saja yang dapat digunakan. Untuk menguji keabsahan data atau validitas data khususnya penelitian kualitatif dapat menggunakan beberapa teknik, salah satunya adalah triangulasi. Menurut Sugiyono (2013: 330) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam triangulasi yaitu :

a. Triangulasi Teknik Menurut Sugiyono (2013: 330) triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, Serta dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Selain daripada itu, peneliti menggunakan draft wawancara untuk menggali data dengan baik dan juga membantu peneliti untuk melakukan triangulasi teknik. Draft wawancara secara mendalam nantinya akan dikembangkan sesuai dengan informasi yang lebih detil dan baru yang akan menambah kaidah penelitian. Selain daripada wawancara secara mendalam pengumpulan data juga berasal dari dokumentasi data desa dan juga beberapa dokumen kebijakan seperti surat keputusan (SK).

b. Triangulasi Sumber data Menurut Sugiyono (2013: 330) triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dengan draft wawancara digunakan peneliti untuk menangkap informasi yang ingin digali oleh peneliti. Draft wawancara tersebut selain dari mengambil fokus topik juga membantu peneliti untuk memvalidkan keterangan narasumber lain melalui teknik triangulasi sumber.

3.6 Teknik Analisa Data.

Menurut Milles and Huberman, analisis data tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi.

Prinsip dasarnya adalah kronologi. Berikut tahapan dalam analisis data tertata, Pertama, Membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika terjadi perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu (Miles dan Huberman, 2007: 173-174).

Kedua, Memasukkan data. Pada tahap ini, peneliti sedang mencari perubahan-perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen. Perubahan-perubahan itu dapat ditempatkan dalam catatan-catatan lapangan wawancara dengan para pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai secara khusus apakah mereka telah membuat suatu yang sudah terkode dalam format buku inovasi. Kelanjutan penyelidikan menurut adanya bagian-bagian yang telah ditambah, didrop, diperbaiki, digabungkan, atau diseleksi untuk digunakan. Dalam beberapa hal dapat mengacu pada bukti-bukti dokumenter (Miles dan Huberman, 2007: 174). Ketiga, Menganalisis data. Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya (Miles dan Huberman, 2007: 177)

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclutions).

1. Pengumpulan Data.

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai

dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi Data.

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 2007: 16). Data yang telah diperoleh peneliti selanjutnya dikelompokkan sesuai kebutuhan. Dalam mereduksi data ini perlu fokus yang cukup tinggi dalam mengelompokkan data tersebut, sehingga dari data yang telah dikelompokkan dapat dianalisa. Selain perlu fokus yang tinggi, untuk reduksi data, harus segera dilakukan setelah data dapat terkumpul dari satu narasumber untuk mengurangi resiko data terpecah atau tidak fokus.

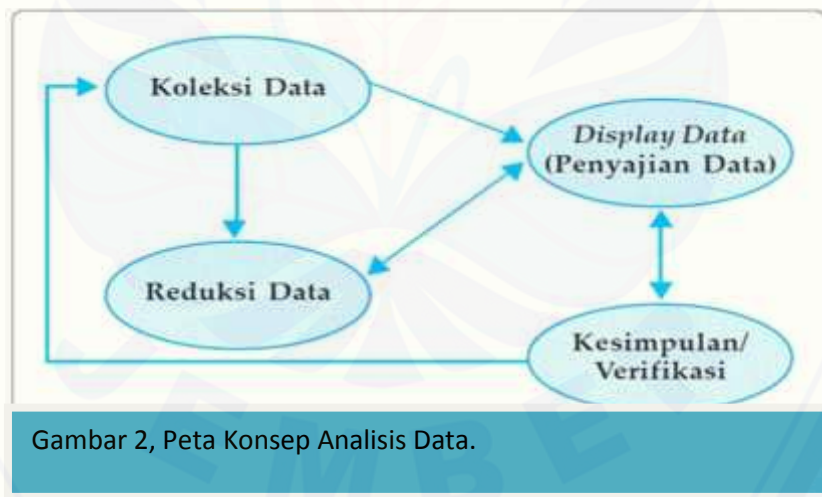
3. Penyajian Data.

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan (Miles dan Huberman, 2007: 84). Agar data dapat digunakan untuk analisa sesuai dengan konsep yang sudah diinginkan. Penyajian data awal peneliti melakukan *textual interpretatif* atau interpretasi tulisan sehingga tulisan atau hasil penelitian sedikit banyak membantu peneliti data tersebut dianggap dicukupkan atau perlu penambahan.

4. Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh (Miles dan Huberman, 2007: 18). Kesimpulan kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi (Harsono, 2008: 169). Penarikan kesimpulan yang dipakai melalui penalaran induktif yaitu

penalaran yang secara garis besar adalah dari khusus ke umum. Alasan peneliti menggunakan penalaran induktif karena didalam penalaran induktif terdapat 3 bentuk penalaran yaitu generalisasi, analogi dan hubungan kausal.maksud dari generalisasi merupakan sebuah peristiwa tersebut pada kenyataannya dapat mewakili dari fenomena yang cukup luas. Seperti contoh pertanian di dalam kawasan konservasi ternyata tidak hanya terjadi di Taman Nasional Meru Betiri, akan tetapi hampir semua hutan yang berdampingan dengan masyarakat menemui peristiwa atau fenomena yang sama. Termasuk dengan penalaran analogi dan hubungan kausal yang menjelaskan hubungan sebab akibat ataupun menjelaskan tentang bagaimana sebuah perkara yang sangat sensitif dapat dibuka dan dijelaskan tanpa merusak hubungan anantara peneliti dan narasumber. Meskipun analogi ini bisa jadi sangat subjektif, akan tetapi untuk mempertimbangkan faktor keamanan ketika berada di lapangan.



Gambar 2, Peta Konsep Analisis Data.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, menghasilkan 3 temuan yaitu: pertama, pembangunan pengetahuan tentang konservasi melibatkan dari pihak Taman Nasional, perkebunan dan masyarakat lokal sendiri. Pembangunan pengetahuan tentang konservasi kepada masyarakat Dusun Sukamade meliputi tentang peraturan – peraturan konservasi. Dari pembangunan pengetahuan terhadap konservasi, masyarakat diharapkan memahami akan pentingnya konservasi dan pelestarian. Selain pembangunan pengetahuan dan pemahaman tentang konservasi, terdapat pula kontrol dan pengawasan dalam pelaksanaan konservasi. Kontrol dan pengawasan tersebut meliputi dari 3 stakeholder yaitu Taman Nasional Meru Betiri, Perkebunan PT Sukamade dan masyarakat. Konstruksi sosial masyarakat menganggap mereka adalah masyarakat perkebunan, bukan sebagai masyarakat pinggiran hutan atau desa hutan. Kontrol paling dominan berasal dari perkebunan sehingga segala tindakan ataupun usaha – usaha pelanggaran semuanya diawasi ketat oleh perkebunan yang sebelumnya terdapat erjasama dengan pihak Taman Nasional sebagai daerah penyangga.

Kedua, tindakan sosial masyarakat Sukamade terhadap upaya konservasi. Tindakan sosial masyarakat meliputi tindakan assosiatif dan dissosiatif. Tindakan assosiatif masyarakat seperti sikap kooperatif untuk tidak melakukan pelanggaran. Tindakan positif seperti munculnya nilai – nilai masyarakat dalam Dusun Sukamade dalam menjaga hutan mereka sendiri dari pihak luar sehingga menumbuhkan kesadaran baru dan menekan angka pelanggaran dalam kawasan. Tindakan dissosiatif yang meliputi tindakan pelanggaran seperti berburu satwa, *illegal logging*, dan ancaman pembukaan lahan untuk pertanian. Kecenderungan tindakan sosial dissosiatif saat ini masih sedang, karena melihat waktu masyarakat yang tidak seluruhnya dihabiskan bekerja di perkebunan sehingga praktek untuk melakukan pelanggaran masih tetap ada. Pertumbuhan dan kecenderungan masyarakat untuk menetap di Dusun Sukamade menjadi salah satu alasan meningkatnya ancaman terhadap alih fungsi lahan. Saat ini keberadaan lahan pertanian kacang tanah

memang berada di sekitar daerah aliran sungai, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dapat melebar dan mengintervensi kawasan Taman Nasional.

Ketiga, fungsi ekonomi dalam usaha pelestarian hutan. Menjaga kelestarian hutan dengan nilai – nilai konservasi sebagai fungsi pengawetan dan pemanfaatan merupakan bentuk orientasi ekonomi yang terkandung dalam nilai konservasi. Masyarakat Sukamade menyadari tentang keberadaan perkebunan yang menjadi zona penyangga Taman Nasional juga menjadi sumber pendapatan masyarakat. Motif ekonomi masyarakat untuk tetap bekerja di perkebunan dan juga hasil dari bertani dan berternak di zona hak guna usaha menjadi kesepakatan bersama untuk tidak memasuki kawasan konservasi. Dari keberadaan zona hak guna usaha perkebunan masyarakat dapat bekerja dan juga mengelola tanah untuk berladang sebagai tambahan pendapatan tanpa harus merusak hutan. Pemahaman bahwa masyarakat menggantungkan hidup dari perkebunan yang bekerja sama dengan Taman Nasional, maka kerjasama tersebut juga harus dilaksanakan masyarakat dengan kesadaran untuk tidak melakukan pelanggaran di dalam kawasan konservasi. Meskipun di satu sisi pihak Taman Nasional tidak menghendaki adanya pertanian dalam kawasan akan tetapi keberadaan zonasi yang berada di kawasan hak guna usaha juga harus ditaati oleh kedua belah pihak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran – saran sebagai berikut :

- a. Pembangunan pengetahuan masyarakat tentang konservasi perlu ditambahkan dengan asas manfaat dari usaha konservasi tersebut. Melihat masih adanya pelanggaran di dalam kawasan maka perlu peningkatan kontrol dan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam menjaga hutan. Selain itu peran penyuluh untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat Dusun Sukamade harus dioptimalkan dan diikuti sertakan sebagai bagian dari *pilot project* program pelestarian hutan Jawa.

- b. Pemerintah dalam hal ini pihak Taman Nasional disarankan melakukan upaya serius terhadap pemetaan kawasan – kawasan yang rawan terhadap upaya deforestasi. Selain pemetaan kawasan rawan, juga kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Harapannya adalah untuk menekan terjadinya deforestasi dan mengalihkan ke sektor yang lebih baik selain pembukaan lahan hutan.
- c. Pengembangan potensi pariwisata di kawasan resort Sukamade perlu ditambahkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal. Oleh karena itu perlu dilakukan kesepakatan bersama dalam membangun pariwisata berbasis konservasi dengan keterlibatan masyarakat. Usaha tersebut diharapkan untuk mengembangkan sektor pariwisata dan juga menekan jumlah pelanggar dalam kawasan hutan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi VII*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Alan, M Steven dan A. Ed Schmidgall. 2004. *Comprehensive Indonesian – English Dictionary*. Ohio University Press. Athens. (dilansir melalui Wikipedia 19/03/2018).
- BAPPENAS. 2010. *Draft Strategi Nasional REDD+*. Jakarta.
- Basrowi dan Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi*, Surabaya: Insan Cendekia
- Berger, Peter L dan Thomas Luckmann.1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan : Sebuah Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. LP3ES. Jakarta.
- Beratha, I. N.1982. *Desa, masyarakat desa dan pembangunan desa*. Ghalia Indonesia
- Easton, David & Simamora,Sahat (alih bahasa).1984, *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*, Jakarta: Bina Aksara.
- Ediningtyas,Dyah. 2007. Tesis. *Kemandirian Masyarakat Desa Sekitar Hutan Dalam Melakukan Agroforestri (Studi Kasus Usaha Agroforestri Tanaman Kopi di BKPH Pangalengan, KPH Bandung Selatan, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten)*,Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- FAO. 1996. *Forest Resource Assesment 1990: Survey of Tropical Forest Cover and Study of Change Processes*. Food and Agricultural Organization of The United Nations, Rome.
- Fathi Hanif dkk. 2005. ‘Referensi Peraturan Hukum Penanganan Kasus Perdagangan satwa dan tumbuhan yang dilindungi’, Ditjen PHKA-WWF Indonesia, Jakarta.

- Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cetakan 1. Yogyakarta :Ar-Ruzz Media.
- Hidayat, Herman (ED). 2015. *Pengelolaan Hutan Lestari:Partisipasi,Kolaborasi, dan Konflik*. Yayasan Obor Pustaka. Jakarta.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Djambatan, Jakarta.
- Kuntowijoyo. 2017. *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris : Madura 1850 – 1940*. IRCiSoD. Yogyakarta.
- Linton, L., 1995, Parthnership Modal Ventura, Jakarta: PT. IBEC, h. 8(dikutip melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/>)
- Lynch,Owen J. & Kirk Tallbot, 1995. *Balancing Acts : Comunity – Based Forest Management and National Law in Asia and the Pacific*. Washington: World Resources Institute.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyo,Barito.2008.Teori Kerjasama. (Melalui <http://a1stop.blogspot.com/2008/02/teori-kerma-bisa-efektif-dalam-suatu.html/17/05/2016>)
- Narimawati, Umi, Sri Dewi Anggadini dan Lina Ismawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah : Panduan Awal menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM*. Bekasi: Penerbit Genesis
- Nurdin, Muhamad. 2005. Tesis. *Pengembangan ekowisata berbasisan masyarakat Dusun Sukamade, Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Taman Nasional Meru Betiri, Banyuwangi Jawa Timur*. Universitas Gadjah Mada. Jogjakarta (melalui [:UGM.library/17/05/2016](http://UGM.library/17/05/2016)).
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta..(dikutip melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/> 17/05/2016)

- Pamudji, S., 1985, *Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Suatu Tinjauan Dari Administrasi Negara*, Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan.
- Poernomo, Eddy.2006.Jurnal. *Pengaruh Kreativitas Dan Kerjasama Tim Terhadap Kinerja Manajer Pada PT. Jesslyn K Cakes Indonesia Cabang Surabaya*.Adm Bisnis UPN Veteran Jawa Timur.
- Rahardjo.1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Gadjah Mada University Press.
- Reif, J.A. Levy, Y. 1993. *Password :Kamus Bahasa Inggris Untuk Pelajar*. PT. Kesaint Blanct Indah Corp. Bekasi.
- Riduwan. 2004. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung : Alfabeta, Cetakan Pertama
- Ricklefs, M.C., 2001, *A History Of Modern Indonesia Since C. 1200*, Palgrave, Great Britain
- Ruwindriyanto,Ambrosius (Ed). 2014. *Potret Keadaan Hutan Indonesia : Periode 2009 – 2013*. Forest Watch Indonesia. Bogor.
- Saparin,Sumber. 1977. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Desa*. Ghalia Indonesia:Jakarta.
- Santosa, A. (Ed) 2008 *Konservasi Indonesia : Dalam Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan*. Perpustakaan nasional
- Subektini, Dewi. 2006. Jurnal. *Analisis Sosial Ekonomi masyarakat di Zona Rehabilitasi,Taman Nasional Meru Betiri,Jember,Jawa Timur*. Forum Geografi.
- Subagyo, P. Joko, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik Cetakan Keenam*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Senoaji, Gunggung.2009. Jurnal. *Kontribusi Hutan Lindung Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa di Sekitarnya: Studi Kasus di Air Lanang Begkulu*.Universitas Bengkulu.

Sihite, Romany.2007. *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bisnis*. Alfabeta. Bandung.

_____. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

_____.2013. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunderlin,Ida Aju PR.1997. *Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya*. CIFOR.

Qomariah,Lailatul.2009.SKRIPSI. *Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Meru Betiri:Studi Kasus Blok Rajegwesi SPTN 1 Sarongan*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Qadim, Abdul. HS. 2012. *Desertasi. Ekologi Politik Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember – Era Reformasi Politik*. ITB.

Widodo, Arief. *Kerusakan Hutan (deforestasi) Berbagai Wilayah di Indonesia*.(Melalui <https://lobieflima.wordpress.com/17/05/2016>)

World Bank. 1996. *World Development Report 1996 : From Plan to Market*. New York: Oxford University Press. (Dilansir melalui : <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5979> License: CC BY 3.0 IGO)

Zainudin, dkk. 2009. *Petunjuk Praktikum Terpadu Dasar – Dasar Agronomi*. Malang: Lab Agronomi UMM.

[http://www.kemenperin.go.id/artikel/3521/Kebijakan-Larangan-Ekspor-Rotan\(11/06/2016\)](http://www.kemenperin.go.id/artikel/3521/Kebijakan-Larangan-Ekspor-Rotan(11/06/2016)).

<http://Meru>

[Betiri.com/detail_dinamis/id/26/petugas_tnmb_temukan_lagi_kasus_illegal_logging.html](http://Meru.com/detail_dinamis/id/26/petugas_tnmb_temukan_lagi_kasus_illegal_logging.html) (17/05/ 2016)

<http://www.mongabay.co.id/2015/03/20/menyelamatkan-hutan-tn-meru-betiri-dengan-memakmurkan-masyarakat-kok-bisa/> (23/05/2016).

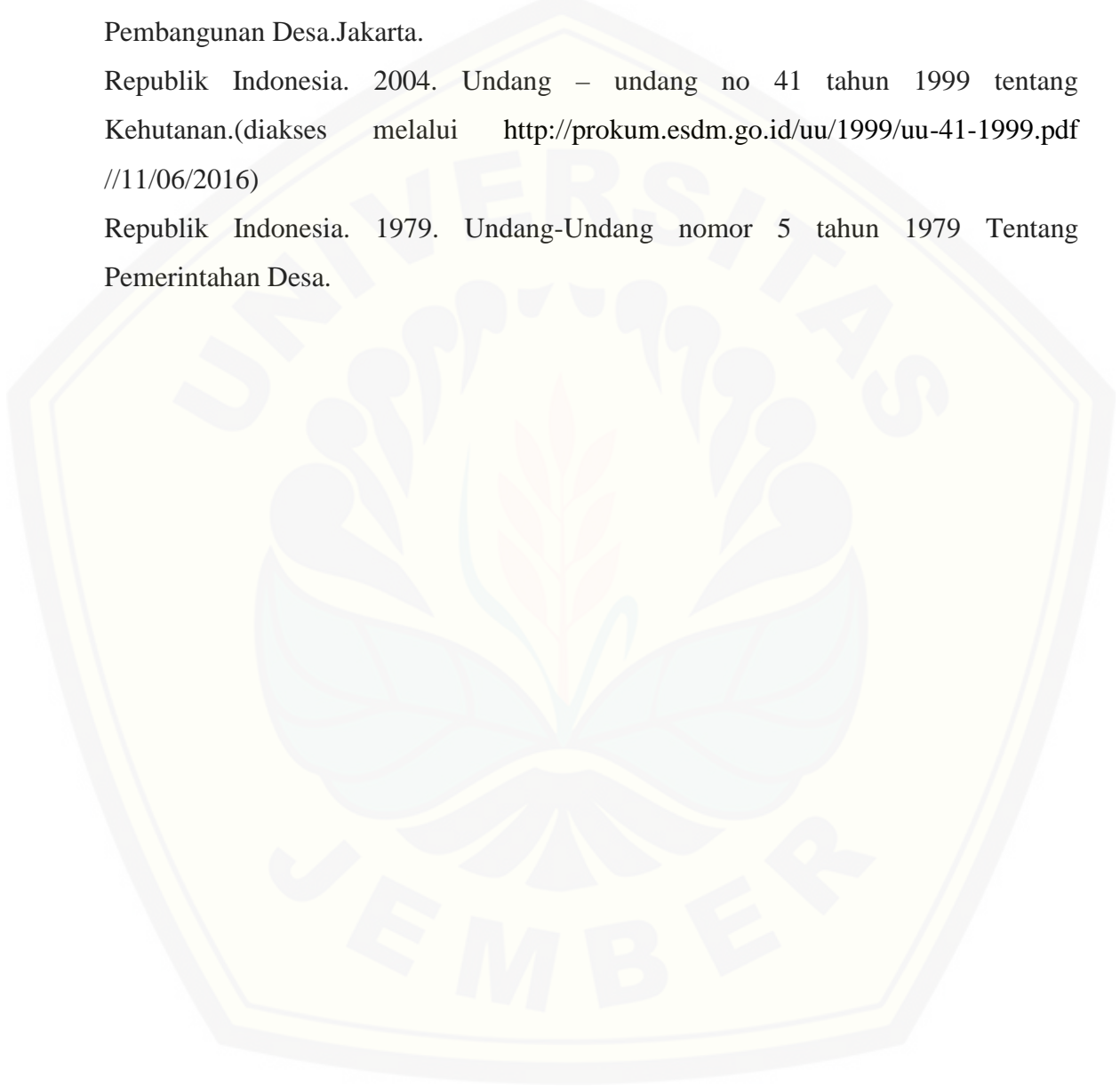
[http://kpshk.org/tag/taman-nasional-meru-betiri\(11/06/2016\)](http://kpshk.org/tag/taman-nasional-meru-betiri(11/06/2016))

<http://bk.menlh.go.id/?module=pages&id=cprofile> (11/06/2016)

Republik Indonesia. 1976. Instruksi Presiden NO 05 TAHUN 1976 Tentang Bantuan Pembangunan Desa. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. Undang – undang no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. (diakses melalui <http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-41-1999.pdf> //11/06/2016)

Republik Indonesia. 1979. Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.



Lampiran Foto dokumentasi.

Kegiatan mempersiapkan ladang untuk tanaman kacang



Salah satu rumah pekerja perkebunan dan juga peladang.



Sekolah satu atap sebagai sarana umum pendidikan



Toko kelontong milik Bu Dima



Proses pembangunan hunian permanen





Proses Panen Kacang Tanah





Spot mencari akses sinyal komunikasi



Bertamu dan wawancara bersama Pak Rohim



Kegiatan jual beli hasil ladang pertanian warga



Akses ke dusun harus menggunakan rakit untuk menyebrangi sungai



Kondisi perkebunan PT Sukamade Baru



Melakukan wawancara singkat dengan mandor Kebun



Situasi anak – anak saat mengaji pada sore hari



Alih Fungsi lahan untuk persiapan tanaman baru.



Diskusi dan wawancara bersama mas Ardi, mas feri dan mas eko.



Diskusi dan wawancara bersama pak pras, pak tri dan mas feri.



Berbincang dan investigasi bersama pak yud.



Wawancara bersama pak ali dan pak sulaiman



Diskusi dan wawancara bersama pak pras mas ardi dan mas eko



Wawancara dan diskusi bersama mas simon, mas jager, mas satrio dan pak nur



anjang sana dan wawancara bersama pak samsul, dan keluarga pak mun.



Foto bersama para ranger dan mahasiswa PKL



DRAFT WAWANCARA

SUBJEK 1

1. Bagaimana penjelasan pihak TNMB tentang sejak kapan usaha pengalih fungsi lahan konservasi menuju lahan guna usaha?
2. Jika terdapat alih fungsi lahan, motivasi apa yang merumuskan kebijakan tersebut dalam konteks kajian dilapangan? Kemudian diciptakan dalam bentuk peraturan apa?
3. Dalam usaha pengalih fungsian lahan, siapa oknum yang membuka lahan tersebut? Apakah berasal dari masyarakat sekitar hutan(masyarakat dusun sukomade) atau berasal dari luar kawasan?
4. Jika pengalih fungsi lahan merupakan korporasi atau perusahaan,sejauh apa hubungan taman nasional dan korporasi tersebut dan dalam bentuk kongkrit apa?
5. Jika terdapat pengurangan jumlah luasan kawasan, berubah menjadi apakah lahan tersebut?
6. Sejauh apa proses sosialisasi pihak TNMB kepada masyarakat terkait upaya konservasi?
7. Adakah atau pernahkah diadakannya sosialisasi tentang sanksi tegas tentang pengrusakan kawasan?
8. Pada umumnya apa yang dilakukan TNMB dalam usaha konservasi?
9. Pernahkah pihak TNMB mensosialisasikan jumlah luasan atau dampak kerusakan wilayah yang rusak?
10. Jika pernah bagaimana reaksi masyarakat terhadap hal tersebut?
11. Pernahkah terjadi kejadian luar biasa atau kejadian tidak biasa dari hutan yang menyebabkan gangguan pada sistem kehidupan masyarakat?
12. Pernahkah diadakan kerjasama antara TNMB dan masyarakat ataupun dengan korporasi pengelola kawasan taman nasional?
13. Jika terdapat kerjasama, kerjasama seperti apa? Dan adakah pendampingan kepada masyarakat?
14. Kawasan Taman nasional khususnya merubetiri terdiri dari beberapa zonasi, berapa luas lahan untuk zona kelola baik untuk masyarakat ataupun sebuah korporasi?

SUBJEK 2.

1. Pengetahuan masyarakat tentang konservasi?
2. Apa yang mereka tahu tentang konservasi?
3. Pernahkah ada penyuluhan tentang konservasi?
4. Ketika diberikan penyuluhan reaksi masyarakat seperti apa?
5. Apakah menerima atau menolak?
6. Jika menerima apa yang masyarakat lakukan?
7. Jika menolak apa yang masyarakat lakukan?
8. Adakah komunitas atau grup atau lembaga masyarakat yang fokus terhadap usaha pelestarian?
9. Jika ada bagaimana usahanya?
10. Bagaimana keberlangsungan organisasinya?
11. Adakah program organisasi masyarakat yang dapat diciptakan oleh masyarakat sendiri dan dilaksanakan?
12. Apakah program tersebut sukses? jika sukses faktor apakah yang membantu?
13. Jika program tersebut gagal, faktor apakah yang menyebabkan kegagalan tersebut.
14. Pernahkah mendengar tentang kebijakan?
15. Jika pernah bagaimana pandangan dan reaksi masyarakat?
16. Apa yang masyarakat percayai pada hutan di merubetiri ini?
17. Adakah kearifan lokal terhadap hutan tersebut?
18. Sebelum masyarakat berubah yang pada dulunya menggantungkan diri terhadap hutan, seperti kayu untuk masak, obat-obatan dll, faktor apa yang membuat perubahan tersebut?
19. Siapakah oknum yang paling sering untuk melakukan sosialisasi terhadap kelestarian hutan merubetiri?

Wawancara dengan ADM perkebunan, pak Sulaiman.

S : Pertanyaan pertama saya tentang sejarahnya dulu saja, Pak, jadi Kebun Sukomade ini dahulunya seperti apa, sejak tahun berapa?

X : Kalau sejarahnya ini dulu dari Belanda, ini dibentuk oleh Belanda dan ini namanya dulu PT.Sukomade Baru. Saya juga kurang tahu karena saya juga baru disini.

S : Kalau operasi di Sukomade ini, ini kan berhubungan langsung dengan Taman Nasional, itu hubungannya seperti apa, Pak?

X : Hubungannya sangat baik dengan Taman Nasional, berkaitan dengan kelestarian alam, intinya pihak kebun ini juga melestarikan apa yang sudah dicanangkan yang sudah ada di (MOI) semuanya sudah tercantum di (MOI) ada Taman Nasional dengan pihak kebun. Tapi tidak sembarangan orang yang bisa.

S : Jadi (MOI) sini dengan Taman Nasional atau langsung dari kementerian?

X : Ini sudah antara direktur perusahaan dengan pihak **balai taman nasional**

S : Jadi kalau misal saya ingin tahu MOInya berarti langsung ke balainya?

X : Bisa-bisa, dari Taman Nasional bisa, di kantor bisa nanti ada gambaran.

S : Setidaknya ada dokumentasinya.

X : Kalau untuk dokumentasi mungkin saya tidak bisa memberikan. Apakah kewajiban kebun untuk Taman Nasional sudah tertera disana. Bentuk kerjasamanya sudah ada semuanya. Itu di MOInya ada. Disini resortnya juga ketat. Saya harus takut dan taat terhadap MOI yang sudah ditetapkan oleh pihak direksi dan Taman Nasional, saya tinggal melanjutkan saja.

S : Kalau untuk operasi di Sukomade ini kan terdiri dari beberapa apdeling, itu disini apdeling apa aja, Pak?

X : Apdeling Summersari, Apdeling Sumberseko, Apdeling Sukomade, Apdeling Sumberadap termasuk Apdeling pabrik, kalau pabrik termasuk internal, kalau apdeling lapangan ya itu tadi.

S : Apa di Sukomade ini berkulat sama kakao dan karet saja atau ada yang lain, Pak?

X : Yang lebih dominan disini karet. Ada juga kopi, kakao.

S : Saya tadi juga sempat jalan-jalan di bukit sekitaran jalur sini, saya melihat kebun ini berada di jalur sungai. Apa memang perkebunan ini didirikan di sekitar jalur sungai atau sampai masuk-masuk ke dalam, Pak?

X : Oh tidak, memang sudah ada kaitannya, termasuk aliran sungai ini bagian dari kebun. Pokoknya kalau ada aliran di dalam kebun, ya itu milik kebun.

S : Saya mohon ijin ya, Pak, ini kan PT. Sukomade berasal dari Belanda berdiri lebih dulu dari Taman Nasional. Ketika ada pihak dari Taman Nasional yang baru terbentuk ini, apakah ada sekiranya benturan mungkin dari perkebunan sini akan memiliki lahan untuk produksi akan terganggu karena adanya konservasi?

X : Oh tidak ada sama sekali.

S : Jadi sejak dulu sudah ada koordinasi terus, Pak.

X : Iya, sesuai HGU.

S : Kalau HGUnya disini luasnya berapa, Pak?

X : 1097 Ha.

S : Dan semuanya beroperasi?

X : Yang efektif hanya 697 Ha.

S : Jadi ada sekitar 400an ya.

X : Iya, nanti kan ada yang..537-540.. sisanya itu (Tertera di kantor)

S : 400 Ha ini apakah nantinya akan difungsikan atau gimana, Pak?

X : Saya nunggu intruksi dari direksi dulu. Sampai sekarang belum terjamah. Menunggu intruksi dari direksi selaku kuasa usaha, saya harus patuh. Kalau seandainya direksi menyuruh mengerjakan ya saya kerjakan karena memang di kawasan Taman Nasional.

S : Jadi kira-kira untuk seperti ini sulit, sangat sulit atau cukup?

X : Sangat sulit. Ya sebetulnya kalau menurut saya tidak terlalu sulit tapi karena dari direksi menghendaki maka saya harus menuruti.

S : Saya tadi juga wawancara ke beberapa pihak, masyarakat ini menggantungkan hidupnya dari kebun ini. Otomatis waktu yang digunakan untuk pekerjaan yang lain-lain juga disini.

X : Iya, tapi kalau diluar ya diluar kebun. Saya disini harus mempekerjakan karyawan, semua yang ada dilingkungan sukomade. Kalau jam kerja ya kerja.

S : Untuk jam produksi mulai jam berapa?

X : Jam 3 pagi, dan sekarang jam 4 sudah mulai kerja.

S : Kalau kakaonya?

X : Setengah 6, jam 6 sudah mulai kerja.

S : Saya sempat ke beberapa narasumber, disini kan banyak yang bekerja sebagai buruh borongan, nah itu sebenarnya bagaimana, Pak, kalau dilihat dari anda sebagai ADM?

X : Memang begini, disini itu ada pekerja borongan ya saya pekerjakan borongan sesuai jam kerja. Tapi disini juga ada karyawan tetap (KAT) ada juga (KAR). Saya kira ini sudah sesuai lah.

S : Saya mohon maaf ini, Pak, tadi disebutkan bahwa sadapan itu mulai kerja sekitar jam 3-4, itu adakah target yang harus dipenuhi?

X : Ya harus. Dia harus mengumpulkan terus. Saya kalau kerja ya kalau dibayar sekian harus mengumpulkan produksi sekian.

S : Kalau target produksi dari pabrik, sekarang berapa, Pak?

X : Kalau produksi perbulan itu sesuai (**APBN**), kalau sebulan itu kurang lebih 17 Ton. Itu kadang-kadang targetnya tidak masuk karena banyak hal, terutama pengawasan mandor, karyawan.

S : Jadi ini tidak pernah ada paksaan?

X : Oh tidak ada kalau paksaan, disini tidak ada unsur paksaan. Kalau secara KAT atau karyawan tetap, ini harus bekerja pada jam kerja karena upah mereka selalu dibayar.

S : Anda sebagai ADM, otomatis kebun berdampingan dengan hutan, pernahkah Taman Nasional mengupayakan seperti sosialisasi kepada berbagai pihak?

X : Sering itu, saya sering koordinasi. Apapun yang tertera di **Mou** selalu dilaksanakan. Seperti istilahnya patrol.

S : Misalkan ada pegawai yang melanggar **MOu** tadi, kira-kira adakah hal-hal atau sanksi?

X : Ada, nanti diproses lah sesuai di disini. Seperti seandainya ada yang masuk di hutan yang sudah dilarang.

S : Kalau dari kebun tindakannya seperti apa itu, Pak?

X : Tindakannya ya paling tidak, terkena skors. Saya kira kalau karyawan dari kita tetap patuh lah terhadap aturan-aturan yang sudah tertera, karena memang disini lingkungnya Taman Nasional jadi orang-orang tau begitu. Kadang-kadang kan orang-orang hoax.

S : Mengenai organisasi masyarakat sini, kemarin sempat disebutkan Masyarakat Peduli Sukomade, itu keterlibatan kebun dan organisasi masyarakat tersebut ada atau tidak?

X : Ada. Semua organisasi termasuk di dalam pengajian dan sebagainya, seperti pengajian malam minggu itu ada kontribusinya. Jadi kebun ke organisasi juga ada.

S : Ini berbicara mengenai kontribusi, Pak, Taman Nasional kan sering kali ada program yang mungkin akan dijalankan, misal sering atau tidaknya Taman Nasional itu meminta sumbangan ke kebun? Apakah itu sering?

X : Tidak ada, seperti itu.

S : Itu seperti apa biasanya, Pak?

X : Kalau seandainya ada kegiatan MBSC, itu Taman Nasional meminta diskusi dan lain sebagainya. Itu kerjasama dan sudah tertuang di **MOI**.

S : Pak Suliman ya, sejauh ini anda bekerja disini, pernahkah anda mendengar kearifan lokal masyarakat dan hutannya sini, seperti mendengar cerita mengenai petuah-petuah orang tua.

X : Maksudnya itu gimana ya?

S : Seperti mungkin ada kearifan lokal dari masyarakat desa sini supaya masyarakat menjaga hutannya.

X : Oh iya ada, seperti ini. Ada dari luar dulu itu pernah, masyarakat kita tidak setuju. Ya paling tidak istilahnya melarang begitu.

S : Jadi secara tidak langsung kebun ini memang sudah difungsikan sebagai penyangga juga begitu.

X : Iya

S : Pernahkah terjadi kejadian luar biasa gitu dari kebun dan hutan ini dan mengganggu aktifitas.

X : Oh tidak pernah. Kalau di lingkungan sini dan lingkup sukumade saya tidak pernah tau.

S : Tadi mengenai kontribusi ada MBSC (Bersih-bersih lahan), perkebunan dan Taman Nasional. Selain itu apakah ada kontribusi atau kerja sama dari perkebunan?

X : Ada, kalau butuh kendaraan, cukup dulu kalau cukup itu transitnya di sungai lembu pakai bis. Saya cukup pakai truk sampai pualng pergi.

S : Pernah terjadi konflik, Pak? Dalam masalah apapun?

X : Tidak pernah. Saya itu selama menjabat tidak pernah ada konflik, ya cuma konflik kecil lah seperti contoh makang masyarakat atau kedisiplinan dan lain-lain. Itu cuma omong-omong saja. Bukan seperti kejahatan apa gitu, istilahnya sampai mengganggu keamanan itu ngga ada. Tapi kalau diluar jangkauan saya tidak tahu.

S : Kalau untuk pemerintahan, disini ada dusun sukumade, pernahkah ada benturan atau kepentingan kebun ini dengan pemerintah dusun?

X : Malah justru kerjasamanya lebih baik, pemerintah daerah dan desa juga dengan masyarakat baik. Sehingga sepertiga kebun sini sekitar sini betul-betul baik.

S : Kalau menurut anda sendiri, misalnya PT. Sukumade tutup apakah masyarakat akan merusak hutan atau bagaimana, Pak?

X : Akan tetap saya pertahankan, karena nantinya masyarakat mau kemana lagi, ini akan tetap saya pertahankan. Karena kasihan nanti masyarakat sini, sekitar 300 kepala keluarga terus tidak punya pekerjaan terus bagaimana nanti.

S : Saya juga menanyakan hal yang sama ke beberapa narasumber saya, dan jawabannya juga seperti itu sama dengan anda.

X : Iya tetap, kasihan nantinya mau kemana masyarakat. Hidupnya sampai cucu-cucunya sudah disini, kakeknya meninggal disini.

S : PT. Sukumade ini apakah ada PT yang lain?

X : Ada PT yang satu naungan, Cuma yang ada di Kabupaten Banyuwangi cuma PT. Sukumade Baru, yang lain ada 4 di Jember semua (Nama PT-PT yang lain).

S : Kalau sini dengan ... apa bedannya, Pak?

X : Mungkin kalau sejarah, tempat, struktur dan sebagainya ya ada bedanya. Cuma kalau disana saya tidak tahu juga. Kalau pelanggaran-pelanggarannya saya juga tidak tahu. Pelanggaran di hutan pun sama, tapi kalau dilingkupnya kebun ya masyarakatnya fokus di pekerjaan. Itu kan kewajibannya, Cuma tetap koordinasi.

S : Kemarin saya juga sempat jalan-jalan disini, pabrik ini juga dibuka untuk umum sebagai destinasi pariwisata unik, itu yang menjadi ide untuk membuka pabrik sebagai pariwisata yang seperti itu, tercetusnya bagaimana , Pak?

X : Itu seperti ini, banyak turis-turis itu kan kebanyakan ingin mengetahui bagaimana pengolahan karet dan seterusnya. Ya saya persilahkan, satu paket lah istilahnya. Misal ikut ke pabrik lihat-lihat begitu.

S : Jadi ada juga kontribusi dari para guide.

X : Iya, kita disini tinggal menyediakan.

S : Kalau untuk tujuan seperti itu apakah kewenangannya hanya khusus lingkup kebun atau ada hubungan lain dengan misal dinas pariwisata, Pak?

X : Tidak ada.

S : Jadi hanya untuk ruang lingkup kebun sendiri saja.

X : Cuma kan guide-guidenya sudah tahu, terus turis kan juga ingin tahu lah tentang disini. Disana juga ada pembantunya kalau ditanya sama guidenya. Kalau tidak ada ya Cuma dilihat-lihat saja guidenya sendiri yang ngomong. Guidenya kan sudah sering kali disini, jadi sudah tahu lah.

S : Oh jadi sudah sejak lama ya, Pak.

X : Iya, sudah lama.

S : Kalau dari karyawan kebun anda ini, untuk bekerja sama misal seperti patroli hutan bersama Taman Nasional, apakah pernah terjadi atau belum?

X : Nah ini, ini sudah ada di **MOI**. Jadi ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Paling tidak ada kontrol lah.

Wawancara dengan kepala resort Sukamade, Bapak Nyoto Prasetyo.

Waktu pertama kali masuk kawasan Taman Nasional, saya membawa bekal untuk 5 hari, jadi dengan carier ukuran 60 liter dan motor matic vario, saya bertekad untuk masuk kawasan. Medan yang cukup terjal dengan banyaknya batu seukuran kepala manusia di tanjakan dan turunan,serta licinnya tanah berbatu yang sengaja tidak diaspal karena alasan konservasi. Motor yang saya gunakan pun akhirnya berulang kali bergesekan dan menabrak batu yang akhirnya membuat dek bawah motor saya patah. Pada beberapa kali kesempatan untuk naik dan menginap, motor yang saya pergunakan dek bawahnya harus saya lepas karena sudah tidak bisa dipakai lagi karena pecah. Sebelum memasuki kebun swasta milik pt sukamade, saya bertemu dengan pos jaga, hanya sekedar formalitas untuk menjaga keamanan, saya mengisi buku tamu dan menulis plat nomor saya, yang akhirnya saya tahu alasannya untuk mencari dan mengamankan apabila ada tindak pidana kriminal seperti pencurian maka akan terlacak posisinya melalui catatan plat nomor tersebut. Setelah melewati pos jaga tersebut saya lanjutkan perjalanan, saya disambut dengan beberapa lutung dan hamparan tanpa pohon dan hanya terdiri dari rumput liar dan gubuk, dan akhirnya saya tahu adalah lahan tersebut merupakan lahan alihan perkebunan untuk komoditas kayu sengon pada mulanya dan sempat saya dokumentasikan sebagai usaha penambahan data saya tentang deforestasi. Setelah mengambil dokumentasi, saya pun melanjutkan perjalanan sampai saya menemui perkampungan pertama yaitu dusun sumber suko, kalau tidak salah di dusun ini hanya terdapat belasan rumah yang beberapa terlihat sepi,lengkap dengan musola yang berada di tengah – tengah dusun setelah melewati jembatan kayu pertama bersebalahan dengan jalan.

Sebelum masuk ke resort saya menghampiri kawasan yang pada kanan saya atau barat jalan terdapat kawasan produksi karet dan di sebelah kirinya merupakan lahan kosong dan beberapa wilayah lain dijadikan lahan pertanian lengkap dengan gubuk yang terbuat dari kayu atau bambu. waktu itu terlihat banyak tanaman cabe rawit, dan ditengah – tengah kebun terdapat pohon entah pohon karet atau mahoni,jumlahnya jarang-jarang karena kebanyakan luasan lahan ditanami cabe, saya berasumsi ini merupakan daerah bekas lahan karet juga seperti di seberang jalan. Setelah saya melewati kawasan tersebut saya masuk ke di zona rimba, terlihat rotan dan semak-semak berduri serta terlihat tumbuhan paku raksasa, dan palm serta pohon –pohon besar. Setibanya di resort, saya langsung menuju ke meja resepsionis, bentuknya sederhana hanya bangunan rumah dan dengan jendelanya yang digunakan untuk menerima tamu dan tiket di resort ini. Ketika pertama kali masuk ke ruangan ini ternyata terdapat beberapa petugas yang sedang berbincang ,lalu saya memohon izin dengan mengeluarkan surat simaksi saya akhirnya saya diterima oleh kepala resort yang baru yaitu bapak prasetyo. Beliau merupakan polisi hutan dan merangkap sebagai kepala resort sukamade ini. Awalnya saya berbincang mengenai identitas dan asal – usul saya tapi pada akhirnya beliau sedang enak hati. Tidak melewatkan kesempatan ini saya langsung meminta kesediaan pak kares untuk wawancara. Pertanyaan saya seputar

wilayah sukamade ini dan beberapa hal tentang deforestasi yang terjadi di kawasan merubetiri khususnya resort ini.

X : Kalau ada yang kurang jelas dikonfirmasi lagi karena apabila saya tidak bisa menjawab ya bisa ditanya ke yang lain gitu, karena kebetulan saya disini juga merangkap sebagai kepala resort. Jadi semua tidak sesuai dengan **keputusan** saya

S : Kembali lagi ke lahan penyanggah, yang sekarang ini dipakai kebun

X : Jadi itu ada **tempo dulu** antara perkebunan dan taman nasional, jadi ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi perkebunan terkait pelestarian kawasan yang ada disini. Jadi walaupun kebun itu mempunyai hak **guna usaha** tapi tidak bisa **mengumpatkan** dari kegiatan atau upaya-upaya konservasi, tapi tetap harus berkoordinasi dengan kita. Contohnya pembukaan lahan, penebangan kayu walaupun diwilayah kebun tetap harus berkoordinasi dengan kita, karena untuk sebagai pengawasan juga bahwa kayu itu memang benar-benar diperkebunan dan memang digunakan untuk perkebunan, dan tidak digunakan untuk yang lain, dalam artian untuk dijual-belikan atau apa, itu yang dari sisi **tegakan**, termasuk juga dari hewan kebun juga bertanggungjawab dalam artian itu kerjasama, karena disitu bahwa, disini juga dekat dengan habitatnya banteng, habitatnya rusa kemungkinan hewan-hewan itu masuk dalam wilayah perkebunan, jadi perkebunan tidak boleh untuk membunuh jadi hanya berkewajiban untuk mengusir atau mengembalikan ke habitatnya, itupun juga bisa bekerja sama dengan kita, memberitahukan, menginformasikan bahwa banteng ini mungkin memakan salah satu tumbuhan diperkebunan. Jadi tetap harus melakukan penjagaan bersama

S : untuk yang sebagai pada umumnya itu taman nasional sebagai usaha konservasi yang tadi dijelaskan mengenai pembentukan MPS

X : jadi pada awal memang konservasi itu ada 3 pihak, ada perlindungan dan keamanan, kedua pelestarian, dan ketigapemanfaatan. Terkait itu jadi memang upaya upaya kita itu, kita represif ataupun persuasif yang berupa tindakan atau yang reprensif jadi upaya yang reprensif itulah kita yang berkaitan dengan perkebunan. Upaya reprensif itu yang sangat dibutuhkan yaitu salah satunya dengan anjingsana dengan masyarakat tercipta hubungan yang harmonis agar timbal balik memiliki kawasan disini, yang kedua dengan melalui penyuluhan dengan masyarakat yang sifatnya kelompok besar atau kelompok-kelompok kecil dengan artian beberapa orang ataupun mengumpulkan dari banyak orang, termasuk koordinasi dengna pihak perkebunan dan pernagkat yang ada disini, karena tidak menutup kemungkinan kita itu bersentuhan dengan masyarakat dengan yang notaben dengan wilayah perkebunan, tetapi tidak menutup kemungkinan ketergantungan masyarakat terhadap wilayah hutan itu juga ada, hanya kita perkebunan mempunyai laptop sistemnya disini kita masuk disitu, yang

selanjutnya ditingkat pendidikan, melalui pendidikan konservasi dari SD, SMP, SMA kebetulan disukomade ada SMP 1 atap dan SMA 1 atap juga, konservasi ini yang mengajarkan anak-anak tingkat SD, SMP harapan kita itu akan berdampak yang positif juga karena mau tidak mau masyarakat juga akan tinggal disini, itu yang ditingkat pelajar, dan ditingkat masyarakat ada pemberdayaan masyarakat itu kita membentuk MPS (masyarakat peduli sukamde) yang intinya bahwa masyarakat itu ikut serta didalam pengelolaan jasa wisata paling tidak menambah intan untuk mengurangi ketergantungan dengan hutan, selain itu kita merekrut masyarakat untuk bekerja di taman nasional sukamade ini jadi intinya keberadaan kita itu, kita juga komunikatif yang perkebunan dengan masyarakatnya, kita juga memberdayakan masyarakatnya, harapannya biar masyarakat itu ikut memiliki jadi untuk kelesatarian itu tetap ada. Itu yang komunikasi dengan presentif supaya represif. Tetapi untuk cara cara yang represif itu juga dibutuhkan tetapi dampaknya kurang mengena, dalam artian perlu dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar, tetapi yang paling efektif menurut kita itu upaya represif jadi jangan sampai itu terjadi, mangkanya melalui penyuluhan.

S : Pernah tapi pak ada kejadian luar biasa gitu ?

X : Pernah, pernah masyarakat sukamade kita sudah satu kali duakali diperingatkan, terutama disini yang banyak pencurian telur penyu, tapi untuk akhir-akhir ini sudah tidak ada, kalau untuk masyarakat yang terkena hukum belum pernah.

S : Berarti sudah pernah diadakan sosialisasi tentang sanksi tegas baik perusakan kawasan dan pengambilan sesuatu?

X : Pernah, mensosialisasikan undang-undang mengenai konservasinya 590, undang-undang 499 yang terkait dengan kehutanan, memang kami sosialisasikan supaya masyarakat tahu bahwa apabila melakukan perusakan atau pengambilan sesuatu dikawasan observasi sanksinya diatur diundang-undang.

S : Reaksinya kira-kira setelah penyuluhan sanksi tersebut apakah langsung bisa diterima masyarakat atau masih ada penolakan.

X : Yang jelas gini kalau masyarakat, pengalaman kita tetap masyarakat tak serta-merta, bilang iya tapi tetap saja ya itu tadi kawasan berdekatan sedangkan mungkin kondisi ekonominya masyarakat juga tidak sama, ya tetap saja walaupun sudah kita berikan sanksi atau penyuluhan rutin tetap saja ada yang melanggar, mangkanya seperti yang sampean tanyakan apa ada yang masih melanggar, ya itu tadi sudah melakukan penyuluhan sanksinya seperti ini tetap saja.

S : Untuk pengalih fungsian lahan, itu tadikan Bapak menjelaskan tentang zona-zona itu, saya sempat ngobrol dengan Mas Wahyu itukan ada zona-zona itu Pak, zona lahan guna usaha itu Taman Nasional tetap memberikan kontrol atau sudah dilepaskan kepihak perkebunan atau bagaimana ?

X : Kalau selama ini, karena itu sudah ke HTI kontrol tetap ada, dalam artian terbentuk NOU tadi jadi supaya tidak lepas begitu saja, jadi masih ada keterkaitan perkebunan dengan kawasan konservasi, mangkanya kita selalu koordinasi dengan pihak perkebunan, karena masyarakat di Sukamade ini rata-rata bekerja diperkebunan, dan apabila ada yang melanggar kita koordinasinya dengan perkebunan karena mudah berkoordiner, karena pihak perkebunan juga tegas apabila ada yang melanggar dan akan mengeluarkan dari perkebunan

S : Jadi termasuk kerjasama juga Taman Nasional dengan perkebunan ?

X : Mangkanya terjalin komunikasi melalui koordinasi yang rutin

S : Apakah termasuk dengan pariwisata juga kerjasama dari Taman Nasional, Perkebunan, dan Masyarakat ?

X : Iya, jadi untuk pariwisata kebetulan dipengelolaannya dipantai itu juga. Intinya disini wisata itu yang paling dominan adalah disini, dikita itu menyiapkan penginapan, diperkebunan juga ada jadi itulah wujud kerjasama bahwa walaupun ada tamu yang berkunjung menginap diperkebunan ada juga yang menginap disini, termasuk untuk tracking juga, jadi kita untuk tracking juga melibatkan orang-orang perkebunan yang tergabung dalam MPS tadi itu, jadi wujud kerjasama orang perkebunan dengna kita yaitu disini pariwisata ya itu tadi, penginapan kalau disana penuh disini penuh kesana, jadi ada komunikasi.

S : Kira-kira menurut Bapak ini pengaruh kebun sama Taman Nasional dan masyarakat ini pengaruhnya besar atau biasa atau bagaimana ?

X : Pengaruh terhadap apa ?

S : Pengaruh kebun terhadap upaya konservasi-konservasi gitu.

X : Kalau menurut saya pengaruhnya sedang, karena masyarakat dikebun rata-rata bekerjanya dikebun, jadi memang waktu-waktu yang luang untuk interaksi dengan kawasan hutan itu ada batasnya, karena bukan orang nganggur atau harus bekerja dikebun, jadi memang kenapa saya mengatakan sedang karena tetap ada celah dari rentan waktu itu ada yang memanfaatkan waktu malam hari untuk berburu, waktu-waktu yang memang punya kesempatan untuk menghasilkan sesuatu dikawasan kita, jadi makanya tidak kalau terlalu tinggi itu tidak dalam artian masih dalam kontrol kebun, karena mereka juga harus mematuhi peraturan perkebunan mangkanyakan tidak terlalu tinggi kecuali dimasyarakat pedesaan tidak ada itu, makanyakan susah untuk dikendalikan, kalau masyarakat perkebunankan ini kita menganggapnya sedang, dalam artian tinggi tidak rendah tidak karena memang disini masyarakat keluar masuk, jadi kadang kita membedakan pengunjung wisata atau tamu untuk melakukan hal-hal yang tidak benar itu juga kadang kesulitan juga

S: Terus mengenai masyarakat peduli sukamade, itu samapai sekarang ini apakah masih terus berlangsung kemudian efeknya atau dampaknya itu kepada masyarakat, kepada kebun, kepada taman nasional itu seperti apa Pak ?

X : Ini karena saya disini baru 2 samapi 3 bulan, waktu itu masih Pak Hartono, jadi sampai saat ini sesuai yang kita lihat kenyataan disini memang masih jalan ditempat, jadi belum terbentuk suatu organisasi yang bisa mempunyai nilai jual, jadi didalam keanggotaanya masih belum bisa solid, karena memang disitu tidak menjajikan ada tamu terus, jadi memang saat-saat tertentu saja MPS ini bisa difungsikan, tapi dalam kondisi-kondisi yang kalau tidak ada tamu ya tidak ada, jadi sampai saat ini saya anggap masih belum bisa berjalan, memang sebatas pembentukan, jadi memang masyarakat kita itu butuh bimbingan-bimbingan yang *continue* sampai terbentuk suatu organisasi seperti AD ART yang jelas, termasuk tadi kontribusinya terhadap Taman Nasional, terhadap perkebunan, terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri itu bisa tergambar disitu sampai saat ini masih belum, itupun masih baru satu tahun, tapi kayaknya pengurusnya itu masih belum begitu aktif, itu yang kita lihat

S: Jadi MPS itu pada dasarnya difungsikan sebagai pariwisata saja Pak ?

X : Intinya untuk pariwisata yang bisa menopang, meningkatkan kesesjahteraan masyarakat karena untuk mengcover ya itu tadi endotek di Perkebunan itu kita manfaatkan untuk masyarakat peduli Sukamade termasuk untuk jasa transportasi apabila sungai banjir

S : Local guide ?

X : Iya, mengarahnya kesitu

S : Jadi pendampingannya masih belum terlalu solid ?

X : Jadi memang pendampingannya kurang, sebatas baru pembentukan terus disamping itu memang pengurus sama anggota kurang solid, jadi kita melihat itu ibarat suatu benda belum berupa wujud cuma kerangkanya saja, jadi memang mau berjalan itu juga masih susah dalam artian koridornya itukan anggaran dasarnya juga belum terukur, dalam suatu obrolan tadikan harus memenuhi ada ketua, ada bendahara, kalau itu sudah terbentuk Cuma di AD ARTnya itu yang belum. AD ART itu yang akan ibaratnya bisnis apa yang akan kita lakukan, tindakan-tindakan apa nanti tertuang disitu semua, apabila terjadi seperti ini sanksinya apa nantikan tertuang di anggaran dasar itu, termasuk untuk pembagian dari hasil-hasilnya itu bagaimana.

S : Berati semuanya kembali lagi ke pemangku kepentingan atau dalam artian Taman Nasional yang paling vital dalam membentuk MPS ini ?

X : Sebenarnya kalau dari Taman Nasional kita itukan cuma menjembatani masyarakat, jadi memang tingkat pemahaman masyarakat itu masih belum bisa bahwa organisasi ini harus didampingi terus agar bisa jalan, jadi untuk Taman Nasional itu memang sebagai jembatan dan juga kita seharusnya memonitor perkembangannya seperti apa kalau tidak kendalanya apa

dan itupun belum bisa maksimal, ada tapi belum bisa maksimal karena pendampingnya ini ada dari penyuluh, ini ada dari Mas Wahyu seperti yang dimasyarakat, dan itupun sudah beberapa tahun kita bantu tapi nyatanya belum bisa berdiri, intinya masih butuh timbangan ataupun apalah dari Taman Nasional, padahal harapan kita itu kita bentuk kita beri modal agar bisa bangun sendiri, jadi ibarat kita mau mendapat ikan kita siapkan airnya. Walaupun tetap namanya pendampingan kita bisa tetap membantu secara continue

S : Kalau ini Pak mengenai zonasi dikawasan Taman Nasional, sebenarnya luas lahan untuk zona kelola baik untuk perusahaan maupun masyarakat itu berapa kisarannya Pak kalau hanya di daerah Sukamade ?

X : Maksudnya ?

S: Luas lahan yang bisa dikelola baik dari kebun maupun masyarakat, tadikan saya sempat jalan didaerah DAS tadikan banyak sawah, tegalan, itukan sebenarnya bukan dikelola kebun

X : Itu kebun yang mengelola, ini sudah ada sebelum taman nasional itu ada, ini adalah hasil kebun, jadi memang mangkanyakan cukup batasnya ini tidak boleh lebih

S: Kan tadi sempat ngobrol dengan Mas Wahyu juga kan saya sempat lihat digoogle earth itu diDASnya kok banyak yang bolong-bolong, saya kira apa ini yang digunakan sebagai zona rehabilitasi.

X : Bukan, kalau zona rehabilitasi ada di Sarongan, Rajegwesi. Jadi di Sukamade itu untuk zona pemanfaatnya disini, ada juga zona rimba, zona inti, selain itu ada yang terbaru yaitu zona tradisional yaitu pemanfaatan hunian oleh masyarakat kita. Jadi untuk di Sukamade tidak ada zona rehabilitasi.

S :Sementara cukup dulu Pak nanti kalau ada yang kurang nanti bisa ditambah lagi.

X : Apabila apa yang saya sampaikan kurang pas bisa disampaikan keatasan saya, apa yang saya sampaikan itu adalah pengalaman saya itu, nanti dibandingkan dengan yang lain, mana yang baik silahkan diambil, jadi jangan pure mentah dari omongan saya. Dalam artian sampean cari referensi-referensi yang dapat menggambarkan lokasi-lokasi disini.

S : Jadi ini memang bukan zona rehabilitasi ya ?

X : Bukan

S : Terus ini penanganan di zona rehabilitasi bagaimana Pak ?

X : Bisa ditanyakan di Rajegwesi, alangkah baiknya langsung ditanyakan langsung keteman-teman karena saya juga mantan sana, jadi ya upaya-upaya biar Mas Agus Hidayat yang sampaikan, kalau saya sampaikan takut salah karena bukan kewenangan saya, walaupun sedikit banyak saya tahu tetap menjaga.

S : Jadi di Sukamade ini tidak ada istilah deforestasi, penebangan liar, illegal logging ?

X : Saya tidak bisa mengatakan aman karena masih ada gangguan, karena akses Sukamade tidak hanya didarat saja bisa lewat laut, mengapa saya sampaikan kurang aman karena hutan pasti ada gangguan sekecil apapun, entah terhadap tumbuhannya, satwanya, bahkan tambangnya, jadi kalau dibilang aman tidak juga karena masih ada illegal logging walaupun kami belum bisa menemukan, tapi tahun kemarin kami menemukan di batas utara kabupaten Banyuwangi yaitu penebangan kayu lewat laut tapi masih tetap masuk di wilayah Sukamade. Jadi desa Sukamade ini secara wilayah premisan masuk wilayah kabupaten Jember, untuk akses kesini bisa lewat laut dari Rajegwesi. Dulu pernah ada pos tapi sekarang hilang karena pernah ada Tsunami. (gambar) ada zona pemanfaatan, selepas itu ada zona rimba. Kalau ada yang kurang pas sampean disana, ini menurut yang saya alami jadi nanti bisa dibandingkan untuk referensi-referensi, kalau tidak ada yang benar ya penguangannya yang realistislah, untuk arah mengambil suatu kesimpulan.

S: Inikan ibarat kata ada kayak segitiga masyarakat, kebun, dan Taman Nasional begitu ya Pak ?

X : Kalau kita tidak menganggap segitiga, karena masyarakat dan kebun itu suatu kesatuan, ya memang benar ada tiga dalam artian masyarakat itu ada yang dari pemerintahan desa, ada yang dari perkebunan ada juga dari Taman Nasional, ya bisa juga disebut segitiga.

S: Pernah ada misal dari luar atau pihak luar yang kasarnya memberi sosialisasi, penyuluhan yang fungsinya hampir sama seperti yang dilakukan taman nasional gitu Pak ?

X : Ada, dari pihak kepolosian seperti itu kan juga instansi, tapi kalau kepolosian mengarah ketindak pidana yang sifatnya umum, yang paling dominan dari perkebunan dan taman nasional

S : Penyuluh pertanian tidak sampai masuk sini Pak ?

X : Karena disini tidak ada lahan pertanian Mas

S : Tapi kan ada yang bercocok tanam Pak

X : Tapi kan Cuma dipinggir berem dipinggir sungai, karena diaturan kebun kan tidak boleh.

S : Itu yang menanam kira-kira masyarakat sini atau dari luar Pak ?

X : Sebagian besar masyarakat sini, tapi tetap ada yang dari luar memanfaatkan lahan perkebunan tapi mereka juga mempunyai kontribusi harus mengikuti aturan-aturan perkebunan termasuk untuk perbaikan jalan, selokan air, merawat tanaman yang ada disitu.

S: Itu termasuk perjanjian tertulis atau tidak Pak ?

- X : Kalau itu bukan berhak kita itu intern kebun jadi entah itu apakah tertulis atau secara lisan saya sudah tidak masuk kesana, jadi intinya yang kita tangkap dari itu adalah mereka yang memanfaatkan lahan perkebunan bertanggungjawab terhadap kelestarian dan keamanan kawasan konservasi, walaupun ada satu dua yang nakal berarti itu adalah kita harus mungkin frekuensi pembinaannya harus lebih, dalam artian bisa dengan perkebunan bisa dengan desa, saling memberi pemahaman yang baik, atau pemahaman bahwa disini bukan seperti kawasan-kawasan yang ada didesa seperti kawasan-kawasan konservasi.
- S: Kalau misal terjadi pelanggaran dikawasan kebun, kira-kira taman nasional ikut campur tidak Pak, dalam artian kebun juga sebenarnya dalam lingkungan taman nasional itu Pak, itu pelanggarannya mungkin merusak tanaman
- X : Kalau yang sifatnya untuk merusak tanaman perkebunan kita tidak ikut campur, karena itu adalah kewenangan dari intern perkebunan, tetapi kalau yang bersangkutan-paut dengan pergakan dengan satwa walaupun itu diperkebunan kita tetap akan ada upaya-upaya disitu entah itu upaya mediasi dengan masyarakat dalam artian kita juga itu pelanggarnya sebatas apa, apakah masih bisa ditoler dalam artian masih bisa dibina ataupun mungkin sifatnya harus diberikan tindakan yang tegas sampai kerancah hukum, mangkanya yang terkait dengan satwa walaupun itu aturan intern perkebunan.
- S: Tapi beda lagi kalau tanaman kebun ya Pak ?
- X : Kalau tanaman kebun yang merusak masyarakat itu selama kita tidak dimintai bantuan, kita tidak ikut campur tangan untuk mengatasi permasalahan itu karena disitu ada keamanannya juga, kalau yang terkait dengan tanaman perkebunan lo ya, tetapi kalau yang merusak itu satwa kita, kita tetap ada upaya penanganan ya tapi untuk kita menghalau.
- S: Pernah tapi yang seperti itu Pak ?
- X : Pernah, banteng merusak tanaman perkebunan, tanamannya perkebunan ini gimana Pak ? ya kita fair, ya namanya disitu hakikatnya namanya banteng itu juga butuh makan, dan persediaan makan disitu juga ada, dan menurut si banteng itu juga cocok, ya itu tadi mangkanya perkebunan ada aturan tidak boleh pagar bui karena akan melukai hewan, mangkanyakan terbuka, ya upayanya itu tadi mengembalikan ke habitatnya.
- S: Pernah enggak Pak ada kejadian luar biasa dari dalam hutan dari zona inti ataupun zona rimba yang kasarannya mengganggu sistem pemerintahan baik dari kebun dari masyarakat dari Taman Nasional, misal di zona inti, zona rimba terjadi bencana atau apa gitu mengancam sampai masyarakat kebingungan atau bagaimana gitu Pak ?
- X : Selama ini belum pernah, cuma yang faktor alam yang sifatnya pada saat-saat tertentu saja dalam artian itu memang mengganggu kepentingan masyarakat yang saya maksud itu adalah kondisi alam pada saat cuaca hujan, yang jelas akses menuju sarongan itu terputus,

kalau akses itu terputus dalam artian tiga sampai empat hari kita tidak bisa nyebrang otomatis akan menyebabkan pasokan distribusi bahan makanan menurun, kebetulan kita mengalami juga kehabisan semua, tapi menurut saya karena memang faktor alam, kita sudah berupaya membuat jembatan tetapi karena faktor alam juga rubuh kan seperti itu, menurut saya kalau hal-hal seperti itu dimana-mana ada, ya cuma faktor akses ya itu yang membuat mungkin sampai dari Bupati Banyuwangi sampai ke Sukamade karena lihat kondisi akses-akses terputus untuk stock makan mulai meipis itu pernah terjadi, jadi dari kayak ancaman seperti longso, kebakaran hutan yang sifatnya memang untuk pembukaan lahan atau apa itu belum pernah, yang saya ingat akses seperti itu belum pernah.

S: Apakah kira-kira alau terjadi seperti kebakaran hutan tadi Masyarakat Peduli Sukamade atau komunitas yang dipantau Taman Nasional juga ikut digerakan juga Pak, ada kemungkinan tidak ?

X : Iya ada, jadi wujud kerja sama kita dengan pihak perkebunan dan aparat desa, karena aparat desa disini juga termasuk keamanan perkebunan, jadi merangkap disitu itu kalau terjadi kita tetap harus berkomunikasi dengan mereka kita butuh bantuan, karena memang di NOU itu juga kebun punya kewajiban membantu Taman Nasional apabila terjadi sesuatu didalam upaya perlindungan dan pengamanan kawasan termasuk bencana alam ataupun kebakaran seperti itu, jadi memang di NOUnya itua ada tanpa kita memintapun karena secara aturan di NOU itupun memang bertanggung jawab juga dan kontribusinya juga mereka membantu untuk bahan makanan itu wujud kerjasama kita, kita patroli juga.

S: Kalau satwa Pak, dari segi faktor alam, cuaca, kira-kira ada tidak desas-deus harimau turun mengancam kampung dan lain sebagainya

X : Belum ada, walaupun yang pernah itu sebenarnya bukan mengganggu ya tapi banteng mencari makanan, sebenarnya mengganggu dalam artian pekerja karena waktu itu di kebun banyak coklat yang notabennya itu disenangi juga, jadi masyarakat itu ketakutan dalam artian masyarakat pekerja itu ya terganggunya diitu bukan dalam artian sampai terus ngungsi, ataupun mungkin diterkam harimau itu belum ada.

S: Memang masih ada Pak harimau di Sukamade ini ?

X : Kalau di Sukamade harimau jawa kita belum ada informasi yang menunjukkan keberadaan disitu ada atau tidak, sampai saat ini kita belum tau, cuma yang kita tau disini masih ada macan tutul, macan kumbang, seperti itu untuk harimau jawa kita juga belum tau, belum bisa menyuguhkan visual ataupun hasil dari tanda-tanda jejak ataupun kotoran, bulu belum ada sampai saat ini.

S : Saya rasa dicukupkan dulu Pak.

Beberapa pertanyaan dapat terjawab dan beberapa lagi tidak dapat terjawab dengan alasan beliau merupakan kares baru dan kares yang lama dipindah tugaskan ke seksi sarongan yaitu pak hartono. Dalam beberapa pertanyaan saya melihat ada hal yang tertutup-tutupi oleh beliau dilihat dari mimik wajah yang semula cerah berubah menjadi sedikit serius ketika saya bertanya tentang ilegal logging di kawasan ini. Akan tetapi saya dapat menangkap point penting yaitu Sukamade termasuk kawasan yang memiliki ancaman tinggi, baik tegakan, satwa dan bahan tambang. Memiliki dua jalur yaitu darat dan jalur air sehingga rentan terhadap pelanggaran, contohnya ilegal logging di kawasan permissan yang menggunakan jalur laut. Saya tidak berani bertanya terlalu jauh sehingga saya melewati pertanyaan yang sedikit sentimen meskipun hal tersebut untuk urusan penelitian saya disini dan data tersebut harus saya lewati dan saya memutuskan untuk mengakhiri wawancara. Dalam hati saya akan mendapatkan jawaban tersebut dari petugas lain melalui pengamatan langsung dan perbincangan dengan ranger lain. Meskipun saya melewati pertanyaan tentang ilegal logging yang masih ada, karena menurut pak kares disini terdapat dua jalur yang dapat dilalu para pembalak liar, satu jalur darat dan satu lagi jalur laut karena berbatasan dengan samudra hindia.

Saat saya menyebutkan ketika saya iseng melihat google earth dan mencari kawasan sukamade ini, ternyata beberapa daerah terlihat gundul, khususnya yang berada di aliran sungai. Lalu pak kares dengan sigap menjelaskan gambar tampilan tersebut melalui peta kontur yang tertempel di dinding dan menjelaskan tentang zonasi-zonasi yang terdapat di Merubetiri. Setelah wawancara singkat selesai akhirnya saya mohon ijin untuk pinjam tempat untuk istirahat, karena saya tidak bawa tenda dan menurut keterangan dari balai terdapat pondok yang khusus untuk peneliti. Lalu pak kares mengantarkan saya ke tempat tersebut dan ditunjukkan bangunan dan saya dipersilahkan untuk istirahat di salah satu ruangan kamar di bangunan tersebut. Bangunannya merupakan bangunan pondok panggung permanen dengan lantai semen belum keramik, terdapat 4 kamar dan 2 kamar mandi, setiap kamar dilengkapi kasur matras yang biasa digunakan untuk tidur. Pada saat malam saya meminta ijin untuk mengikuti patroli penyu di pantai. Saya bersama dengan mas parno dan mas rohman melakukan patroli ke arah barat pantai. Dengan ditemani bintang-bintang (gugusan milky way) dan lampu dari para nelayan di laut.

Wawancara dengan kepala dusun, Pak feri.

S : Tentang masyarakat sini, tentang hutan, tentang Taman Nasional, kan dulu Pak Feri dulu sempat bilang ke saya bahwa tidak ada illegal logging atau apa, terus ini yang pengen saya tanyakan itu hubungannya masyarakat sini dengan perkebunan itu seperti apa, Pak?

X : Kalau hubungan masyarakat sini dengan pihak perkebunan sebagai karyawan dukung.

S : Kemudian pernah disosialisasikan dari kebun bahwa hutan ini jangan sampai diganggu atau apa?

X : Pernah, lewat pos masing-masing.

S : Oh ada satpamnya?

X : Ada, ya setiap harinya kan ada.

S : Kabarnya apa aja, Pak, bagian-bagian dari kebun itu?

X : Di apdeling itu ada kepala bagian, ada apdeling sumberseko, sumberseko, sukomade, dan apedling sumberadap, ada 4 apdeling. Cuma di bawahin oleh 2 orang, jadi setiap orang membawahi 2 apdeling.

S : Kalau disini?

X : Disini masuk sukomade.

S : Jadi sukomade, sumberseko, sumberseko, dan sumberadap. Kalau di timur gunung itu bukan?

X : Bukan.

S : Kalau mengenai pengetahuan masyarakat tentang konservasi itu, menurut pandangan anda sejauh apa kira-kira?

X : Kalau masyarakat, tidak terlalu paham sebenarnya. Mereka hanya paham bahwa saya tidak boleh melihara hutan. Biasanya memang simple-simpel saja. Pokoknya jangan diganggu hutan, itu seperti perbatasan wilayah Taman Nasional dengan wilayah kebun. Jadi selama ini pemanfaatan ya kadang juga dari kebun sendiri yang memanfaatkan yang dalam garis kebun. Kalau pemotongan kayu, untuk kebutuhan-kebutuhan hanya di wilayah kebun. Memang sudah haknya. Jadi ada istilah jam cadangan, jadi batasnya tidak dihabiskan untuk semua kebutuhan.

S : Jadi disisakan ke masyarakat.

X : Kita itu memang, tidak tau juga kebun itu ditetapkan. Mungkin kaitannya dengan dana atau apa untuk pengelolaan cadangan.

S : Jadi pernah diadakan penyuluhan tentang konservasi disini?

X : Kalau dari Taman Nasional pernah, sering malahan, dari MMP juga sering. Kebetulan MMP itu kan dari masyarakat sini.

S : Berarti disini ada MMP dan MPS.

X : Iya, kalau MPS itu kan upaya dari pihak Taman Nasional untuk masyarakat sukumade sebagai wadah yang notabene disana itu menarik kemauan masyarakat untuk lebih dekat dengan alam, dan lebih paham apa itu Taman Nasional.

S : Jadi cenderung ke pariwisatanya ya.

X : Iya, pariwisatanya. jadi panjangnya itu dari hasil.

S : Lalu kalau bicara mengenai MPS itu, reaksinya masyarakat sini dan tanggapannya masyarakat sini itu seperti apa, Pak?

X : Biasa-biasa saja, karena memang itu sendiri belum bisa berjalan karena terlalu mepet sama waktu.

S : Jadi kegiatan di kebun itu penuh.

X : Iya, penuh itu.

S : Kalau kerja di kebun itu, hari liburnya ada apa tidak?

X : Kalau karyawan yang bekerjanya selain sadapan ada liburnya, tapi kalau sadapan karet hari libur tetap kerja.

S : Berarti mereka full satu bulan bekerja?

X : Iya, tapi mereka masih digaji.

S : Jadi sistemnya borongan gitu?

X : Iya, sistem borongan. Setiap harinya juga borongan.

S : Berapa jam kalau untuk kegiatan sadapan, Pak?

X : Kalau sadapan ada dua tahapan, jadi pertama disadap biasanya jam 3 sampai jam 5 setengah 6 itu sudah selesai, habis itu tahapan kedua jam 9 yaitu mengambil hasilnya terus penimbangan sampai jam 10-11.

S : Antara jam 5 sampai jam 9 itu ada jeda waktu, apakah biasanya itu dipakai untuk istirahat?

X : Iya, mereka yang ke ladang, ada yang mencari rumput,

S : Kalau setelah jam 11, istirahat atau apa?

X : Ya istirahat, kalau mereka punya lading ya di lading.

S : Berarti waktunya dihabiskan di ladang itu tadi.

X : Kalau punya lembu atau sapi ya mencari rumput.

S : Kalau untuk guidenya kira-kira, kan tadi masyarakat yang meladang mungkin jam 11 sudah selesai, kira-kira yang jam 11 itu sekiranya kosong terus jadi guide lokal sini ada apa tidak, Pak?

X : Belum ada. Ada yang tidak bekerja di sadapan ya hanya jadi penduduk biasa di jalanan.

S : Pihak Taman Nasional itu kan memberi keterangan kepada saya, MPS ini sebenarnya untuk membangun masyarakat supaya lebih mandiri, jadi pariwisata dikembangkan supaya masyarakat punya pendapat tambahan, tapi kan pendapatan pariwisata yang ada di sukomade dibawah dari perkebunan karena perkebunan sini juga termasuk destinasi, penghasilan dari perkebunan kemudian dari masyarakat itu apakah ada bagi hasil antara masyarakat dengan perkebunan?

X : Yang dihasilkan oleh kebun?

S : Yang dihasilkan dari pariwisata, ada atau tidak kira-kira?

X : Tidak ada. Kalau secara kebun ke pariwisata kan cuma penginapan, ya hanya itu saja yang dijual.

S : Jadi diambil kebun semua.

X : Iya. Kalau yang lain-lain kebun belum jual ke wisata.

S : Tapi sebenarnya bisa ya, Pak.

X : Kita menganggap bahwa fasilitas yang ada disini bisa dinikmati wisata walaupun itu bisa dikatakan bonusnya. Kita lihat proses kerja di karet, pengolahannya.

S : Di Sukomade sendiri ada berapa kepala keluarga?

X : Ada sekitar 341 KK, Cuma yang domisili disini ada 282 KK yang lain itu buruh kerja, ya tempat tinggalnya disini cuma tempat tinggalnya diluar.

S : Pernahkah pihak Taman Nasional, perkebunan dan masyarakat sendiri melakukan kerjasama membuat sesuatu secara bersama-sama, kira-kira pernahada program seperti itu, Pak?

X : Kalau dulu itu pernah, tanam bakau. Disini ya beberapa, dari tokoh masyarakat juga. Itu sudah lama juga. Tapi kalau secara ini, belum kayanya.

S : Berarti sukses ya, misal kalau ada kegiatan lain waktu kemudian dari Taman Nasional, kebun, masyarakat kalau misal ada kegiatan kerjasama lagi, masih dimungkinkan ya, Pak?

X : Masih dimungkinkan, karena kalau ada agenda-agenda acara itu fasilitas kendaraanya itu dibantu.

S : MPSC itu apa, Pak?

X : MPSC itu dari mahasiswa (**IKIP**) kalau tidak salah, mengadakan disini apa ya, saya sendiri tidak pernah masuk kesana, cuma denger-denger kok bisa ada MPSC. Itu biasanya juga dibantu kebun.

- S : Masyarakat ini kan melihat hutan sebagai sebuah kawasan yang tidak boleh diatak-atik kadang seperti itu, tapi beberapa masyarakat juga membutuhkan mungkin seperti material setidaknnya untuk membantu sedikitlah, itu tanggapan dari Taman Nasional pada masyarakat yang setidaknnya membutuhkan bahan dari hutan itu bagaimana, Pak?
- X : Sepantasnya dari desa saja, pengambilan besar-besara, dijual, karena saya tidak setuju, seperti bambu yang sampai keluar dari sarongan. Bambu itu kan mencari dari bawah, prosesnya lama. Tapi kebanyakan bukn masyarakat sini tapi masyarakat sarongan.
- S : Jadi masyarakat sarongan cari bambu disini. Kemudian?
- X : Kemudian dibawa oleh masyarakat sarongan itu, entah dijual atau apalah.
- S : Jadi masyarakat disini tidak terlalu suka atau bagaimana, Pak?
- X : Ya mereka jadi korban. Mereka kan disini itu kebanyakan pakai dinding bambu, dulu sebelum ada lanjaran harga perlembar dinding bambu atau gedek itu 100 ribu perlembar. Itupun mereka tidak bisa selesai dalam satu bulan juga. Ketika ada masalah seperti ini bersiko, masyarakat sini jadi korban.
- S : Tadi juga sempat disinggung masalah ini sama Pak Haji, katanya memang persoalan ini cukup lama selesainya. Apa memang gara-gara, saya mohon maaf ini, jadi masyarakat sini juga membutuhkan seperti bamboo kaya gitu, kalau misal orang sarongan tidak boleh ambil disini dan orang sini juga tidak boleh mengambil, apa memang seperti itu, Pak?
- X : Tidak, masyarakat sini boleh ambil bahkan sampai dijual belikan karena kalo sudah keluar dari sini itu lain, tapi hanya untuk kebutuhan sini.
- S : Jadi hanya dikonsumsi masyarakat sekitar saja.
- X : Tapi masih ada batasan. Karena untuk kebutuhan 288 kk itu.
- S : Kebun kan sebenarnya muncul lebih dahulu sebelum adanya Taman Nasional, sepengetahuan anda sebagai kasat tokoh masyarakat disini, melihat Taman Nasional yang kasarnya baru terbentuk ini, seperti apa kira-kira?
- X : Kalau saya pahami itu, dulu pelanggar belum sampai situ. Ada juga suaka marga satwa, terus ada Taman Nasional. Kalau perihal itu perbedaanya lebih bagus sekarang, mungkin dari kemajuan jaman, pemahaman dari masyarakat juga, lebih banyak resiko-resikonya, dilihat dari itu semuanya ada perubahan pemahaman.
- S : Apa dulu pernah ada penolakan kemunculan dari Taman Nasional dari masyarakat?
- X : Kalau daerah sini intinya tidak tahu, mereka bukan masyarakat Taman Nasional, mereka ini masyarakat kebun. Kalau aturan-aturan itu terpampang sistem pemberitahuan dari masyarakat. Jadi kalau ada apa-apa di Taman Nasional ya sudah.
- S : Kalau ketergantungan masyarakat pada kebun itu bagaimana?

- X : Sangat tergantung. Kalau duduk di tanah sekatik, mau tidak mau itu sudah makan direbut. Walaupun mereka itu pekerja kebun, mereka kadang diberi kebijakan. Ya itu tanah HGUnya juga kebun yang punya kewajiban pajak.
- S : Kalau mengenai penguasaan politis, anda kan sebagai tokoh masyarakat sebagai Kasen. Ya itu kan memiliki kekuasaan politis. Kira-kira pernahapa tidak urusan anda ini sebagai pemerintah desa dalam menjalankan sebuah program diganggu dari perkebunan atau mungkin sebaliknya?
- X : Kalau diganggu sebetulnya tidak, cuma beberapa benturan seperti ada penolakan, sebetulnya tidak juga cuma karena berbeda aturan artinya dimana program disini bisa diterima dengan kondisi wilayah. Tapi untuk hal-hal yang bersifat infrastruktur, saya mengalami tidak pernah karena ada bentuk koordinasi sama wilayah mana yang mau ditempati. Oh ini ada di wilayah kebun, jadi kebun mengeluarkan surat bersedia ditempati satu program ini yaitu jembatan, seperti itu. Tapi biasanya itu juga diminta oleh pemberi program juga data-datanya. Orang yang masih di wilayah ini juga punya tanggungan listrik. Pihak Taman Nasional memberikan definisi untuk menerapkan kami dengan pihak PLN sebagai pengusul dan PLN sebagai pelaksana jadi untuk minta ijin ke kementerian. Ini masih diproses, saya juga tidak tahu bagaimana jadi yang jelas disana mungkin nanti tidak ada kajian-kajian, untuk larangannya beralasan kuat dengan aturan.
- S : Aturan dari Taman Nasional?
- X : Iya, aturan dari Taman Nasional. Cuma kan kita kadang repot untuk menjelaskan kepada masyarakat, itu biasanya yang sulit. Untuk menjelaskan kenapa Taman Nasional sama-sama warga Indonesia kok tidak mendukung padahal mereka kan punya aturan sendiri.
- S : Kalau kebun, pernah mengadakan seperti sebuah penyuluhan mengenai cara berpikir masyarakat tentang hutan ini yang coba dibangun perkebunan ini seperti apa? Kalau Taman Nasional tadi sempat anda memberi keterangan kalau hutan tidak boleh diuti-utik seperti itu. Kalau kebun pernah mengadakan penyuluhan mengenai hutannya sendiri?
- X : Masyarakat pun begini, kebun dengan HGU itu kebun bertanggung jawab juga, itu salah satu syarat dari HGU dipersetujui. Siap dan bertanggung jawab atas kelestarian dari wilayah Taman Nasional. Itu merupakan salah satu syarat dari pimpinan. Jadi perihal sosialisasi yang simpel, sudahlah kamu jangan kerja di hutan kalau kerja kamu kerja di hutan kapan kamu kerja di kebun.
- S : Saya kan menyebutnya bahwa Taman Nasional, kebun dan masyarakat itu seperti segitiga jadi saling berkaitan satu sama lain. Berarti antara Taman Nasional dengan perkebunan sendiri juga memberi seperti kerjasama untuk kolaborasi untuk masyarakat juga nantinya.
- X : Iya, tapi kalau Taman Nasional tidak secara langsung, lebih ke titik. Kan gini titik masyarakat sampean dikondisikan, karyawan sampean itu dikondisikan supaya kerja semua. Biar mereka itu tidak ada peluang kerja di hutan, sampai kebun memberikan kebijakan ladang. Itu salah satu ada kesana juga.

- S : Jadi gini, Pak, warga anda ini kan mayoritas sebagai karyawan kebun ada juga yang sebagai petani atau peladang yang buka ladang di daerah aliran sungi sini. Pernahkah terjadi benturan dengan kebun atau sama Taman Nasional ketika warga anda ini sedang kerja di ladang.
- X :Iya, di kebun terutama. Karena mereka memberi dampak yang jelek kepada yang lain. Karena yang lain sibuk kerja di kebun, mereka sibuk dengan pekerjaan di ladang. Bahkan itu dikeluarkan aturan juga, dilarang bekerja di ladang saat jam aktif di kebun, itu berpengaruh.
- S : Mungkin saya bisa mengatakan kalau ada warga anda yang sedang meladang, kira-kira yang lain ingin ikut-ikutan juga sebagai tambahan.
- X : Iya seperti itu. Minimal mereka sampai jam 11 ada di kebun.
- S :Tadi saya sempat ngobrol sama Pak Pras Karesnya yang baru. Sedikit banyak Taman Nasional melakukan tindakan prepektif upaya pencegahan, itu lebih banyak daripada penindakan secara sanksi tegas atau sebagainya. Itu berarti disini pernah terjadi kasus yang sekiranya merugikan Taman Nasional, itu faktornya kenapa, Pak?
- X : Mereka kurang tekun, ketika itu disebut karyawan mereka itu kurang tekun pada pekerjaan yang sudah disediakan. Bahkan dia juga sudah diberi ladang sampai dia itu disini bisa untuk ternak. Jadi dari satu pekerjaan utama dua pekerjaan tambahan ini mereka tidak bisa memaksimalkan. Pada akhirnya tergiur dengan pekerjaan yang **biasa** (sedengan). Padahal ini salah satu dampak, sekarang menjadi hasil positif kayanya untuk angka pelanggaran di sukumade ini sudah menurun. Karena dulu-dulunya ada yang nakal, terakhir itu pada tahun 2013 mungkin itu ada masyarakat sini 2 orang, ada 3 orang yang 1 kabur yang dua kena sampai ditahan 8 bulan. Mungkin yang lain sekarang itu sudah tidak ada untuk karyawan. Itu juga ada pendatang yang melakukan pelanggaran.
- S : Pelanggarannya seperti apa itu, Pak?
- X : Ya berburu satwa.
- S : Terus setelah terjadi kasus seperti itu tanggapan kebun otomatis kan karyawan kebun juga, apa ada penindakan lebih lanjut?
- X : Ya ada penindakan lebih lanjut supaya tidak terulang kejadian seperti ini.
- S : Oh jadi secara tidak langsung kebun juga punya andil untuk melakukan penindakan juga.
- X : Iya, tapi kan gini ketika dia itu sudah kena pelanggaran terus di jalur hukum kan pasti ada hal-hal lain. Terus perihal karyawan juga, akhirnya karena tidak ada komitmen. Kan terakhir-terakhir pegawai ADM tolong dijaga kebun dan Taman Nasional. Artinya itu kan luas, bukan hanya saya masyarakat juga.
- S : Tidak pernah terjadi benturan sama sekali, Pak, antara kebun dengan Taman Nasional, menurut sepengetahuan anda?
- X : Ya ada lah, cuma tidak seberapa. Biasanya ya kebun sendiri tidak bisa protes atau tidak bisa cari nafkah yang lebih. Disini itu sering jadi kita sadar gitu orang kita di wilayah tengah

hutan. Tanaman kebun itu bagus, ya ditengah satpamnya. “Mau kemana ini, Pak?” Loh ini siapa, kita kan orang sini artinya kebun yang rugi kalau begini. Akhir-akhir kita punya ... kita tanam, sudah 3 bulan hilang gara-gara banteng.

S : Oh satwa itu. Taman Nasional apa tidak pernah memberi kaya ganti rugi atau apa gitu, Pak?

X : Tidak ada.

S : Berarti resiko ditanggung sendiri ya untuk pekerjaan seperti itu.

X : Disini berupaya memberikan tunjangan, tapi mungkin tidak akan maksimal. Tidak akan maksimal karena juga dihitung posnya juga kan itu.

S : Sedangkan Taman Nasional sendiri juga terbatas petugasnya.

X : Tidak mungkin menghalang-halangi.

S : Apakah anda saran tokoh yang bisa saya wawancarai?

X : Kurang tahu.

Harapannya gini, Disini itu awal HGU cuma status pemerintahan dusun, kalau sebatas dusun ini tercatatnya tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan ketika mau mendirikan suatu dusun. Yang jelas kan membutuhkan proses mungkin sampai ke pusat. Kita tidak membaca disini statusnya tapi kita disini itu status kewarganegaraannya. Sebenarnya kalau status kita sama di dusun, kita tidak punya hak yang sama untuk bisa diperhatikan. Meskipun itu tidak 100% yang seperti di kondisi lain. Meskipun kita mendapatkan bantuan juga, kewajiban kita sendiri ke pemerintah selalu kita berikan seperti pajak, program-program pemerintah, acara pemilu. Mungkin dari itu kita tidak bisa berfikir bahwa hak kita itu sama.

S : Di kawasan sukumade tidak ada deforestasi kita setuju, cuma ada beberapa kasus illegal logging di daerah permisan itu lewat jalur laut. Tapi ada lahan kritis di sektor rajegwesi yang notabene limbah dari perhutani/Taman Nasional, jadi disitu ada upaya deforestasi yang terjadi sektor rajegwesi. Yang membedakan antara masyarakat sini dengan masyarakat rajegwesi yang melakukan deforestasi itu apa?

X : Itu ada satu poin untuk sukumade, poin itu ada satu komando. Jadi sejarah sampai gerak-gerik dari masyarakat itu minimalnya punya kesalahan. Siapa yang menduduki di daerah sukumade itu kan seperti itu. Kalau masyarakat sanggar itu kan masyarakat umum, jadi untuk jangkauannya sangat sulit. Lebih ke kondisi yang lebih sulit.

S : Jadi memang harus ada komando tugas itu.

X : Kalau kebun sampai sekarang itu apa ya, kaya artinya, ini kan sistem belanda. Tapi kan sistemnya keras, kalau sekarang tidak seperti itu tapi tetap. Kalau kebun itu A, kita ngga ada. Tapi yang disini tidak mau. Itu akan lebih mudah.

S : Jadi itu ya yang membedakan.

Kalau misal kebun ini ditutup kira-kira bagaimana, Pak?

X : Hancur, yakin saya. Saya tidak yakin kalau hutan disekeliling kita itu ditinggalkan. Jadi hutan disini hijau karena masih ada penduduk.

S : Jadi peran kebun untuk sebagai penjaga itu sangat penting sekali ya.

X : Iya. Karena disana itu orang kampung. Jadi kebun itu mulai dari perkampungan, jadi social masyarakat itu mudah terpengaruh. Disini itu yang berpengaruh itu orang tua.

.....bertanya narasumber.....

S : Disini pernah ada forum mengenai kira-kira hutan kita ini harus dijaga, kita harus punya rencana jangka panjang untuk kita?

X : Belum pernah, disini belum pernah. Ini kan status kita sebagai karyawan terlalu sibuk. Saya sendiri saja mencoba mau mengkondisikan setiap jam 3 kerja itu sulit.

S : Jadi waktunya semua habis untuk kerja.

X : Jadi dilewati juga semua itu. Kalau MPS itu remuk, terus MPS ada di daerah kebunnya gimana ini kebunnya, sudah tidak ada kebun.

S : Ini cuma sekilas pemikiran saja ya, Pak, sedikit nakal. MPS itu tidak berjalan karena memang dilarang dari kebun, itu bagaimana?

X : Tidak pernah melarang, bahkan ADM sendiri.

Setelah berbincang dengan pak busiri, saya langsung menuju ke kediaman pak feri selaku kasun. Waktu itu jam menunjukkan pukul sekitar pukul 19.30, badan saya cukup dingin karena saya belum makan malam. Sesampainya di rumah pak feri saya cukup terkejut, karena usia pak feri masih cukup muda saya perkirakan sekitar usia 29-30an. Saya menyampaikan maksud kedatangan saya dengan memberikan surat tembusan dari desa dan meminta ijin untuk penelitian di dusunnya, beliau memberikan paraf sebagai tanda diijinkannya saya melakukan penelitian. Setelah ijin diberikan saya lanjutkan untuk melakukan wawancara kepada beliau. Suara beliau cukup pelan dan membuat handphone untuk mencatat rekaman suaranya harus sangat dekat, dan betul saja beberapa detik suara pak feri dalam rekaman tidak terekam dengan sempurna, untung saja saya mendapatkan poin – poin penting yang bisa saya masukkan untuk penelitian saya. Terlihat dari jawaban-jawaban beliau saya menganggap bahwa pak feri ini cukup berpendidikan, pasalnya jawaban yang beliau jelaskan ke saya cukup berbobot, bahkan ada penekanan – penekanan terhadap objek kajian saya. Semisal urusan organisasi tentang MPS dan orientasi masyarakat terhadap kerjasama dengan Taman Nasional, pak feri cukup mengikuti alur pertanyaan saya ya meskipun pertanyaan yang saya berikan tidak begitu berbobot. Saya tidak merasakan adanya urgensi pada pertanyaan dan jawaban yang disampaikan kepada saya.

Cukup enak dan jelas dan saya sempat beranggapan bahwa disini tidak terdapat urgensi sama sekali terkait deforestasi. Beliau menjelaskan bahwa penopang kehidupan masyarakat adalah perkebunan dan kebun sudah memberikan pekerjaan ke mereka sebagai mata pencaharian. Usaha pembalakan liar masih dalam upaya terkontrol karena berada di area hak

guna usaha perkebunan meskipun masuk dalam kategori pengawasan Taman Nasional. Pak feri juga memberikan penjelasan kepada saya soal mata pencaharian masyarakat, selain menjadi pegawai kebun masyarakat biasanya memiliki ternak dan tegal atau ladang garapan sendiri (yang akhirnya saya tahu bahwa ladang di sekitar DAS yang saya lihat dari google earth terlihat bolong-bolong) merupakan garapan masyarakat yang ditanami kacang tanah sepanjang tahun dan terdapat 151 orang penegal di 254 hektar berada di zona hak guna usaha perkebunan. Rata-rata masyarakat dapat memanen 1 ton 2 kwintal dan dalam satu tahun terdapat 2 kali masa panen. Hampir 90 % masyarakat yang bekerja di kebun ini juga menjadi penegal dan yang 10 % adalah orang luar dusun sukumade yang bekerja di lahan yang bukan garapan kebun. Keterlibatan masyarakat untuk mengikuti organisasi cukup rendah, hanya beberapa saja seperti pak ali yang bertugas untuk menyebarkan masyarakat menggunakan rakit, dan beberapa kegiatan seperti bersih camping ground untuk MBSC. Dalam keterangan pak feri sewaktu saya bertanya tentang pelanggaran atau tindak kriminal di dusunnya, beliau hanya mengatakan dulu pernah ada orang masuk ke sini dan bawa motor akan tetapi dapat terlacak karena melewati palng pintu di perkebunan dan palang pintu Taman nasional sehingga bisa tertangkap, selebihnya itu tidak ada.



Wawancara dengan Masyarakat Mitra POLHUT, Pak tri.

Beberapa hari terlewat di resort, pulang pergi setiap sore hari lalu pulang malam-malam kembali ke resort. Jarak yang harus ditempuh sejauh 5 km antara resort dan dusun melewati hutan dan perkebunan dan hanya menggunakan penerangan sepeda motor. Saya hanya takut diserang oleh binatang buas ketika pulang pergi. Jujur saja, beberapa hari berlalu tidak membuat saya semangat sama sekali karena data yang memiliki nilai urgensi belum juga saya dapatkan. Saya hanya berfikir dalam hati jangan-jangan urusan disini tentang pemahaman masyarakat dan hutan baik-baik saja? Tidak ada masalah? atau saya saja yang terlalu bodoh dan tidak peka melihat situasi yang sedang saya hadapi. Sampai pada akhirnya ketika sedang istirahat siang, sambil senda gurau bersama teman-teman UPKP datanglah pak tri kemudian mengajak berbincang dengan pak kares. Dalam perbincangan tersebut saya dapat mengambil beberapa catatan bahwa terdapat upaya penebangan pohon di sektor yang berbatasan antara Taman Nasional dan perkebunan. Kayu pohon tersebut digunakan untuk membuat atap perbaikan di TPQ. Akan tetapi berlanjutnya perbincangan tersebut munculah hal – hal kurang pas menurut saya karena pada waktu itu kayu yang berada di TPQ sudah ada banyak dan anehnya kenapa masih membutuhkan kayu lagi? Lalu kenapa mau menebang pohon yang besarnya melebihi kekurangan kayu yang dianggap dibutuhkan untuk renovasi atap TPQ?. Saya hanya mengira-ngira ini adalah modus penyulundupan kayu yang dilakukan oknum untuk bisa mendapatkan kayu hutan dengan aman dan gratis.

Tak ingin kehilangan informasi itu saya langsung menuju rumah pak tri selaku MMP. Rumah pak tri berada di kawasan dusun juga, yaitu bertempat di rumah dinas berada paling utara dari perkampungan penduduk. Waktu saya datang pak tri sedang merapikan besi-besi yang ternyata saya lihat pak tri merupakan teknisi untuk sepeda ontel dan barang-barang bekas. Saya mencoba untuk meminta izin untuk melakukan sedikit wawancara dan akhirnya pak tri bersedia untuk saya wawancarai, saya dipersilahkan masuk ke rumah yang sewaktu saya lihat hanya terdapat 2 kursi plastik dan satu meja lalu terdapat karpet yang saya pikir digunakan untuk tidur.

S : Saya ini tadi dengar anda ngobrol bersama pak kares (Pak Pras) mengenai kasus-kasus tentang kayu, itu bagaimana?

X : Tentang masalah itu orang sini kan gimana ya, dapat ditanggulangi sampai sampai selesai. Ini tadi saya bersama pak kares sempat berbicara, tapi kenyataannya kayu memang murah tapi sering dijual, ini tadi juga bersama pak kares mencari titik tengah permasalahannya. Kalau ada masalah dalam kawasan perbatasan kita tidak berani untuk berhenti. Kalau memang berani, silahkan mengambil resiko ke kebun atau orang yang bekerja disitu.

S : Jadi disini ada peristiwa seperti itu?

X : Ada, tapi kan cuma niatnya untuk intern, kebutuhan umum satu misal seperti tempat ibadah seperti masjid terus dewan perkebunan. Itu otomatis bukan kayu di tengah kawasan perkebunan. Tapi saran kita kalau memang di tengah perkebunan, ADM sudah memberi ijin harus pak ADM atau pihak perkebunan memberi tahu di petugas taman nasional. Karena nanti dikhawatirkan itu disalahgunakan mengambil di tengah kawasan. Kemudian setelah mengambil di tengah perkebunan, di tengah karet itu kan ada tujuan kecil tapi itu kayu hutan

yang dibiarkan sampai besar ternyata diminta oleh kepala dusun untuk bangunan ibadah, masjid masyarakat itu mengambil kesempatan terjadinya itu, bukan kayu di tengah kawasan jadi kan yang dibicarakan kayu yang di perbatasan. Lebih baik tidak usah, bukannya tidak diijinkan tapi tidak usah saja. Karena itu masih diperbatasan betul. Tapi kalau nanti diperbolehkan, lama-kelamaan saya pikir masyarakat akan melonjak.

S : Jadi, anda waktu masalah itu sempat ramai, saya juga sempat bertanya-tanya sama Mas Eko ini kan saksi, anda bagaimana pas kejadian itu?

X : Ya saya tahu tentang itu, tapi saya tidak mengikuti perkembangannya.

S : Itu aslinya seperti apa, Pak?

X : Itu sebenarnya, sebelumnya ada rumah pengambilan diperbatasan kawasan rajegwesi, terus akhirnya dijalan itu kan rimbun, itu ditebangi tapi yang dijalan terus dibuang. Istilahnya seperti ini, orang kerja ini mau dibuang biarpun sebanyak apa, misal satu contoh hanya seratus batang bambu, itu sebenarnya tidak boleh dibawa, tapi karena masyarakat membutuhkan itu boleh dibawa. Lama-kelamaan masyarakat itu semakin mengentengkan “oh boleh kalau ini, masa dipotong cuma sedikit tidak boleh dibawa” akhirnya sampai orang-orang banyak terus sampai masuk sini.

S : Jadi yang mulai itu daerah Rajegwesi?

X : Iya, daerah Rajegwesi sebenarnya bukan daerah dalam kawasan tapi karena pemanfaatan, karena manusia itu kan sifatnya selalu kurang.

S : Jadi status Pak Tri ini di Taman Nasional sebagai apa, Pak?

X : Saya sebagai MMP (Masyarakat Mitra Polhut) jadi untuk penghubung dalam masyarakat.

S : Berapa orang sebagai MMP, Pak?

X : Dua orang, saya dengan Pak Yit. Sebenarnya pekerjaan saya ini sifatnya bukan untuk melaporkan pelanggar, utamanya untuk memberi kesadaran pada masyarakat. Jadi, kalau berulang kali tidak bisa ya terserah petugasnya.

S : Inti penelitian saya disini kan tentang bagaimana masyarakat mengartikan hutan kita, jadi secara tidak langsung masyarakat menilai hutan itu sampai mana, dan pemanfaatannya sampai mana. Aslinya bukan jauh-jauh dari situ, cuma saya dengar pembicaraan anda dengan Pak Pras, sebelumnya saya minta maaf ya, Pak.

X : Tidak apa-apa. Lebih bagus kalau ada permasalahan ini diketahui, jadi tahu bagaimana semua petugas itu bekerja. Jadi, mungkin saja kalau ada suara yang sumbang jangan sampai anda ini berfikir begini begitu.

S : Saya ini juga takut kalau ada fitnah gitu kan, Pak, penelitian ini harus murni dari masyarakat, nanti takurnya kalau ada suara-suara dari masyarakat kurang pas, saya kan jadi tambah berbohong, jadi saya langsung tanya di tempat ini.

X : Saya juga apa adanya seperti ini, bukannya membohongi masyarakat, melindungi petugas. Ini semua terus terang. Saya disini sudah 23 tahun sebagai pembantu Taman Nasional, bahkan sebelum ada pembentukan MMP atau apa saya sudah bekerja di Taman Nasional dengan sukarela.

S : MMP itu berdirinya sejak kapan, Pak?

X : Sejak 2010.

S : Jadi sekarang sudah tujuh tahun. Kegiatan keseharian MMP itu seperti apa?

X : Ikut petugas patroli, karena kewajibannya hampir sama dengan Polhut.

S : Menurut anda ini selaku petugas, memberitahu/mengingatkan masyarakat disini itu bagaimana, Pak?

X : Kalau masalah masyarakat ini, Alhamdulillah selama saya bekerja disini 80% bagus di daerah Taman Nasional. Jadi saya jamin. Masalahnya itu semua terikat dari perkebunan, masyarakat dulu itu kan tenaga perkebunan, jadi kalau ada pemuda-pemuda seperti suatu misal ada masyarakat yang melanggar yang tidak bisa ditanyakan kita berdasarkan tentang senjata.

S : Kalau yang 20%?

X : Kalau yang 20% bisa dikatakan siap dilanggar dulu, tapi sekarang sudah meningkat lagi. Cuma kebutuhan untuk pribadi. Ya seperti tadi, tidak untuk diperjual belikan tapi untuk kebutuhan pribadi.

S : Menurut anda tentang petugas Taman Nasional disini bagaimana, Pak?

X : Sama juga, kita itu juga saling bekerja sama dengan masyarakat dalam hal-hal positif. Kita sebagai petugas juga memasuki dalam masyarakat untuk menasehatinya dan melakukan pembinaan. Kita juga melakukan pendekatan meskipun tidak rutin.

S : Jadi anda sejak 23 tahun membantu Taman Nasional ini, mulai umur berapa itu, Pak?

X : Saya itu mulai umur 31 tahun.

S : Jadi itu mulai awal pekerjaan anda di Taman Nasional.

X : Iya, tapi saya bekerja itu tidak masuk dalam anggota jadi sifatnya saya senang membantu.

S : Untuk penghidupan anda ini bagaimana, Pak?

X : Saya dulu sebenarnya dari pendidikan, sebagai guru. Jadi kalau paginya saya sekolah, siangnya saya pergi untuk membantu. Itu belum saya hitung, untuk penginapan. Petugasnya juga belum baru, masih dari sukumade jadi berkumpul di rumah warga.

S : Jadi anda benar-benar mulai dari nol.

X : Iya, bahkan dulu itu pencuri lebih keras dari sekarang.

S : Nah, tentang itu bagaimana, Pak?

X : Saya memasuki dan mendekat, seolah-olah saya mengikuti tapi saya tidak akan memasuki atau bergerak dalam mengambil larangan itu, jadi saya berteman tapi sedikit demi sedikit saya itu istilahnya kagum, tanya bagaimana, terus nanti efeknya bagaimana, apa ngga tau begitu.

S : Apa keras begitu, Pak?

X : Keras, kalau dulu membunuh ya membunuh.

S : Pernah juga kejadian seperti itu, Pak?

X : Pernah, ada juga yang dibacok di pantai.

S : Itu sebelum adanya polhut atau ada petugasnya?

X : Itu sebelum adanya polhut.

S : Ini saya mau minta maaf lagi, Pak, waktu anda ngobrol sama Pak Pras kan saya juga dengar, terus anda bialng ke Pak Pras, "Awat ini lo mata-mata", anda kan disebut seperti itu oleh masyarakat, anda bagaimana, Pak?

X : Saya santai saja.

S : Apa anda tidak mendapat ancaman?

X : Kalau itu sudah sering, bahkan berhari-hari bukan lagi berbulan-bulan. Bahkan sudah pernah kena jotos orang.

S : Menurut anda kejadian apa yang membuat itu tak terlupakan?

X : Pernah saya itu terancam, sekitar sepuluh tahunan yang lalu saya itu mau dibunuh, dihajar, itu sering. Pada tahun 2014 sempat saya dihajar orang di tengah gunung, saya juga sudah laporan di Taman Nasional. Tapi saya tidak mau orang itu saya lanjutkan masuk sampai final. Padahal kepala saya juga sampai parah itu. Banyak juga teman-teman saya yang tahu, bahkan seksi-seksi itu tau semua, kumpulan saya juga sudah laporan ulang.

S : Itu pelakunya dari warga sini atau warga luar?

X : Dari warga luar. Mungkin perbuatannya melakukan pelanggaran itu saya tidak tahu, sering terjadi pelanggaran yang lain itu saya ingatkan, mau memberi kekerasan ke saya itu pikir-pikir.

S : Benar-benar pernah begitu, Pak?

X : Pernah itu sampai dua kali. Yang didorong-dorong, dijotos itu tidak bias dihitung.

S : Kalau diancam mau dibunuh?

X : Kalau diancam mau dibunuh itu sering kali, tapi tidak saya hiraukan.

S : Kebanyakan peristiwa-peristiwa seperti itu anda mengingatkan warga saat menebang kayu atau hanya cari bambu atau bagaimana, Pak?

X : Lain-lain untuk pelanggaran dari telur penyu, kayu dan lain sebagainya, kalau pelanggaran disini kan ada perairan dan daratan.

S : Jadi ada dua macam pelanggaran disini ya, Pak.

X : Iya, ada juga burung, pulut. Makanya saya dikata-katakan mata-mata PA sejak dulu sebelum saya masuk MMP. Kemudian sempat terjadi itu karena saya dekat dengan petugas. Sebenarnya tujuan saya bukan untuk jadi mata-mata tapi ingin menyadarkan masyarakat. Kalau mencari ekonomi ya ekonomi jangan sampai seperti itu.

S : Alasan anda bisa setia untuk membantu petugas, sebelumnya mohon maaf padahal anda bukan berasal dari latar belakang Taman Nasional itu apa, Pak?

X : Alasan saya itu bukan berdasarkan membantu petugas, saya itu senang karena hidup manusia berkaitan dengan alam, itu adalah prinsip saya. Dan dipelajaran SD maupun SLTA, kita butuh alam dan alam juga butuh kita, itu dasar saya. Jadi kalau alam hutan rimba kita itu habiskan terutama pasokan sumber mata air, terus nanti kalau kita habiskan kita kenyang sekarang tapi susah kemudian, itu prinsip saya. Jadi saya bukan ingin membantu petugas, dipuji, jadi ini murni keinginan saya. Saya juga pernah ditanya petugas seperti itu, saya juga pernah ngomong saya sudah melakukan bertahun-tahun tanpa ada honoran, saya sukarela bukan saya melamar kesana-kesini, kemarin itu saya langsung terjun. Itu prinsip awal saya sudah dari SMP. Setelah saya mengetahui makhluk hidup itu butuh alam, dan kita saling membutuhkan. Dan saya sebelum masuk ke alam ini, dulu waktu masih SMP saya pernah praktek, ini ringan tapi saya tidak masuk di hutan itu tapi di desa. Saya waktu itu sering mengikuti orang yang menggali sumur. Ini kalau tidak dekat pepohonan, itu sumbernya besar. Kalau jauh dari itu ad tapi sumbernya tidak besar. Berarti kita membutuhkan tumbuhan, dan juga tumbuhan ini akan menghasilkan oksigen dan kita terima.

S : Jadi berasal dari situ, pak.

X : Iya, berasal dari situ. Bukan karena saya ada paksaan kamu harus ikut ini itu. Sebenarnya sama istri saya juga tidak didukung.

S : Karena apa, Pak?

X : Ya karena resiko.

S : Anda dengan Pak Yit. Rekrutan MMP itu kok bisa muncul itu sendiri atau banyak anggotanya, Pak?

X : Awalnya saya sendiri, terus saya cari teman yaitu Pak Yit itu.

S : Jadi waktu saya tanya pada Mas Eko pas masih mengabdikan di Rajegwesi, ada demo masalah gara-gara kasus lahan sampai dijotos, itu bagaimana, Pak?

X : Jadi memang petugas Taman Nasional atau petugas hutan itu berat, kalau masyarakat melihat sekilas itu mudah, padahal kita itu berat. Pertama itu kita harus siap mental dan siap semuannya. Apapun yang terjadi kalau itu memang tertangkap disitu ya sudah.

S : Menurut anda ini daerah Sukomade aman soalnya karena ada kebun yang sudah dipatoki, kalau semisal kebun ini pindah atau tutup, menurut anda bagaimana, Pak?

X : Bakalnya kembali ke Taman Nasional.

S : Dan ini akan tetap terjaga atau bagaimana, Pak?

X : Kalau menurut saya tetap terjaga.

S : Kalau menurut Bapak ini sekolah, Puskesmas atau Pos Kesehatan itu sudah memumpuni atau belum ?

X : Itu memumpuni masalah apa dulu ?

S : Maksudnya, atas nama masyarakat sini gitu, kalau melihat masyarakat sini gitu kan ada sekolah nah itu sudah cukup atau masih ada kurangnya gitu ?

X : Kalau masalah sekolah itu cukup dan tidaknya masalah bangunan atau ketenagaan, nah ini kalau saya masalah pembangunan sudah begitu mewah disini karena bangunannya itu tidak kalah dengna yang dikota, bisa-bisa diatasnya sebagai contoh di Sukumade dibanding dengan Pesanggaran jauh bangunannya, tapi kalau ketenagaannya itu bagi saya kurang.

S : Kalau pendidikan masyarakat sini Pak ?

X : Masih kurang, mangkanya harus pandai-pandai mendekati masyarakat, ini kebanyakan pendidikannya kurang, terus pola pikirnya masih sempit juga. Saya mengajar disini mulai tahun 1995 bahkan sekolaahn sebelum seperti yang sekarang ini, saya cari murid dulu, saya cari kerumah emudian saya bonceng, bahkan saya tidak pernah pulang itu tahun segitu, satu kepala sekolah, satu PNS, yang satu saya itu megang dari kelas 1 sampai keals 6

S : Itu munculnya sekolahan apa karena kesadaran warga atau bagaimana ?

X : Munculnya sekolahan dari pemerintah, jadi yang bangun ya pemerintah

S : Kebun tidak ikut campur ?

X : Tidak, ya cuma membantu , ini yang mendirikan ya pemerintah

S : Bapak kalau waktu penyadaran masyarakat seperti kasus yang seperti tadi yang bapak sempat diancam caranya mendekati mereka supaya sadar itu bagaimana, bapak bilang seperti apa?

X : Pertama kita ketemu diam tapi ktia ya tetap menyapa, kalau kita langsung bilang menyadarkan itumungkin masyarakat tambah lebih emosi karena SDMnya rendah, jadi saya coba berdasarkan ingatan saya kalau saya ketemu selalu saya yang menyapa, kalau saya tidak menyapa bisa nanti terjadi benturan lagi,terus kemudian masyarakat saya pernah mendengarkan sudah dibenci orang tetap saj menyapa tidak takut, dibenci saya dari situ berarti kelemahan-kelemahan orang itu diliihat kita, saya tidak pernah mengandalakan uang atau bagaimana, saya tidak pernah merasa takut diancam, ya ada sih tidak begitu, tetap prinsip

saya begini, saya hidup ada pemerintah masa kalau ada pelanggar gini kaget yaudah tidak usah ditanggapi, saya melakukan kebenaran.

S : Jadi harus sopan, santun,ramah, akhirnya luluh gitu ?

X : Iya benar, kalau kira imbangi tidak sopan, bocara kita seolah-olah mengejek atau menunjukkan kebencian itu akan membuat tambah emosi, jadi mungkin perasaannya dia itu malah juga nantang, saya pernah mau ditempeleng, diludah gitu berulang-ulang, catatan saya setiap hari itu ada dan ingat semua, kadang saya buka catatan saya memori saya, tiap kejadian tercatat

S : Itu oknum-oknum yang masih pernah melakukan seperti itu kepada bapak apa masih ingat ?

X : Tidak ingat sampai saat ini tapi masih ada

S : Terus reaksinya bagaimana kalau ketemu gitu ?

X : Ya saya biasa saja, tiap hari juga lewat kadang sambil mengancam gitu sampai sekarang ini.

S : Orang yang sama ?

X : Iya, sebenarnya prinsip orang sama-sama makan nasi pasti akan terjadi bentrok, tapi akrena mengimbangi dengan kebaikan dan kesopanan. Itulah kunci saya menghadapi hal seperti itu

S : Ya sementara saya cukupkan dulu pak tri terimakasih banyak

X:ya sama – sama mas, saya juga seneng kalau ada seperti ini langsung ditanyakan jadi dapat informasi langsung ke yang bersangkutan, tidak desas- desus saja.

Dari perbincangan pak tri dan pak kares dan juga sedikit wawancara yang saya lakukan langsung dengan pak tri, saya mulai berfikir masyarakat dusun sukamade ini hampir sama dengan masyarakat pada umumnya. Mereka membutuhkan unsur penyangga seperti kayu, dan kayu yang dibutuhkan akses paling dekat adalah mengambil langsung dari hutan, tempat mereka dibesarkan dan dibiasakan. Setelah saya selesai mewawancarai pak tri yang cukup singkat batre handphone yang saya pakai untuk merekam suara ternyata habis dan butuh untuk di charge ulang. Akhirnya saya memutuskan untuk mencatat poin poin penting yang saya tanyakan dan jawaban yang disampaikan oleh pak tri. Secara garis besar masyarakat dusun sukamade ini dapat dikatakan aman dari upaya pengrusakan hutan karena terdapat penyangga yaitu kebun. Akan tetapi prosentase kecil yang bisa jadi semakin meluas juga tetap mengancam dari keberadaan hutan yang semakin lama semakin tergeser nilainya

Wawancara dengan tokoh masyarakat Sukamade, Pak haji Busiri.

Saya melihat di sebelah masjid ini terdapat toko dan penghuninya bernama pak busiri, orang yang dianggap tokoh masyarakat yang kelak akan saya temui untuk wawancara juga. Kami sampai dirumah pak kasun, ternyata beliau sedang keluar menurut tetangga depan rumahnya, akhirnya saya malah bersowan ke rumah pak totok yang tidak lain adalah kawan dari oom saya yang berada di rumah.akhirnya saya dipersilahkan beliau dan sedikit bercakap-cakap lalu ditanya akan tinggal istirahat dimana malam ini, saya berkata kalau kemalaman saya akan menginap di masjid, lalu beliau menyilahkan saya untuk tinggal dirumahnya saja. Setelah percakapan saya dengan pak totok tersebut akhirnya saya kembali ke masjid sambil menunggu pak kasun datang. Senja telah datang, akhirnya saya memutuskan untuk salat magrib dan dilanjutkan salat isya berjamaah di masjid ini. Menurut pengamatan sekilas saya waktu itu shaf barisan terisi tiga shaf terdiri dari para bapak dan anak-anak usia sd dan smp. Setelah selesai salat, saya bertemu dengan seorang bapak-bapak yang tidak lain adalah pak busiri yang rumahnya sebelah masjid dan memohon izin untuk numpang istirahat di masjid malam ini dan beliau mengiyakan sambil bertanya –tanya asal usul saya.

S : Pada dasarnya itukan kalau melihat dari dulu sejarahnya masyarakat dusun Sukamade itu bagaimana pak ?

X : Dulu ini yang masuk sini dulu, yang babat disini dulu orang jawa darai Mentaram, Jawa Tengah. Akhirnya jadilah perkebunan Sukamade milik Belanda, terus sekitar tahun 1918 dibeli oleh Cina ya sampai sekarang ini.

S : Jadi ini miliknya Cina ?

X : Iya milik Cina

S : Jadi PT ini muncul duluan sebelum Taman Nasional ?

X : Iya, sebelum ada Taman Nasional dulu disini, sebelum ada PA dulu disini sudah ada, terus dulu saya ingat itu PBA sebelum disebut Taman Nasional, harimau jawa masih ada disini komplit dulu.

S : Pak haji ini dulunya itu pegawai perkebunan atau ?

X : Iya kerja dikebun dulu, tahun 1970 saya masuk kebun, tapi saya asli kelahiran sini tahun 1951, sekolah dulu sampai tahun 1970 lulusan saya SR (Sekolah Rakyat), langsung tidak melanjutkan ke sekolah umum saya dipondok dulu.

S : Bapakan udah lama ada disini, kemudian Taman Nasional juga baru muncul setelah adanya kebun, bahkan kebun mucnul duluan sebelum Taman Nasional, kira-kira hubungannya antara masyarakat

sini yang pastikan karyawan kebun dulunya dengan Taman Nasional yang baru muncul ini bagaimana Pak ?

X : Ya bagus, maksudnya bagus begini, karena karyawan disini, masyarakat yang ada disini kan karyawan kebun, kebun dituntut dengan Taman Nasional akhirnya tidak berani berkulit karyawan, musuhnya bukan karyawan tapi kebun, ancumannya kebun ditutup kalau karyawannya, masyarakatnya merusak hutan, sampai sekarang itu. Jadi Taman Nasional tidak hubungan dengan masyarakat tapi kebun yang ditegur, kemudian kebun menegur karyawan, kalau sekarang banyak pendatang dari luar lain lagi urusannya, tapi kalau karyawan kebun selama yang ada disini setahu saya kerjasama dengan Taman Nasional cukup bagus.

S : Jadi kalau masyarakat disini dalam artian melihat hutan itu seperti apa kira-kira Pak, dulu kira-kira seperti apa, sekarang seperti apa gitu Pak ?

X : Kalau dulu sekarang Sukamade yang saya tahu ya begini inilah, jadi hutannya masih asli, yang rusak ini yang diluar dekat laut, jadi kalau hutan yang skitar sini ya utuh, malahan ada tanah perkebunan yang dibikinkan, karena disini sistem kontrakan, ijin 5 tahun bisa perpanjang setahun, malah ada 250 Hektaran, tapi sampai sekarang tidak berani mau nebang tidak berani.

S : Berati PT ini juga punya hutan cadangan ?

X : Hutan punya, tapi sampai sekarang yang saya ingat tidka berani nebang, karena setau saya itu dimanfaatkan orang-orang lain, nanti kebun yang neabgn dimanfaatkan orang-orang lain.

S : Dimanfaatkan oleh orang lain maksudnya bagaimana Pak, telah dibuka kemudian ditanami sendiri atau gimana Pak ?

X : Ya begitu, akhirnya kan kalau disini kayunya bagus-bagus, mungkin hutan lain tidak ada seperti ini.

S : Apa seperti yang ada dipertigaan di seberang jalan itukan ada hamparan itu dijadikan kayak kebun jagung apa itu termasuk hutan cadangan juga ?

X : Disebelah mana ?

S : Sebelum timurnya kakao

X : Oo, itu kebun yang ditanami pertanian itu wilayah kebun, jadi pajaknya disini ini kebun 1000 hektare, cuma yang tertanam itu cuma 750 Ha, tapi yang produktif hanya 500an yang lain dari sungai itu.

S : Jadi yang 250 itu dibiarkan ?

X : Iya dibiarkan, bahkan mau ngambil kayunya saja tidak berani, harus bayar pajaklah ya karena itu hubungan antara kehutanan dengan kebun itu lain, jadi titiplah istilahnya, saya diberi izin umur panjang tapi jangan merusak hutankan begitu.

S : Kalau penyuluhan, sosialisasi itu sering dilakukan Pak ?

X : Sering, yang mensosialisasi dari ITS Surabaya, Unej.

S : Biasanya penyuluhannya seperti apa ?

X : Ya seperti adek-adek itu konservasi, kadang-kadang bertanya air makainya satu hari berapa liter, mandi pakai air apa sungi atau sumur.

S : Jadi cenderung kepenyangga kehidupannya ya pak ?

X : Iya

S : Ketika diberikan penyuluhan sebagai salah satu tokoh masyarakat sini bapak waktu ada penyuluhan dari Taman Nasional kira-kira reaksinya seperti apa, apakah diterima mentah-mentah atau masih ada penolakan-penolakan seperti itu ?

X : Tidak ada penolakan-penolakan, maksudnya penolakan dari ?

S : Dari masyarakat sini

X : Tidak ada

S : Jadi benar-benar diterima dari pengaruh kebun tadi ?

X : Iya dari pengaruh kebun tadi, kalau karyawan kebun itu pasti langsung diterima

S : Apa warga sini ada yang bukan karyawan kebun Pak ?

X : Kalau yang punya rumah disini karyawan kebun semua, ada yang penegal dari luar itukan sanggem, borolah.

S : Tadi sempat bicara juga sama Pak Kares yang baru Pak Pras, kan disini juga dibentuk MPS itu kira-kira prosesnya dulu ketika mau diinisiasi seperti itu seperti apa pak ?

X : Iya repot juga kan, maksudnya repotkan disini ada hubungannya dengan kebun, semua karyawan kebun, jadi ya seperti ini premisan mau dibuka dulu, air terjun tidak jadi

S : Apa memang tidak diperbolehkan sama sekali ?

X : Boleh, malah kerjasama kebun dengna Taman Nasional sejak laam tapi dibentuk MPS itu tadi tidak jadi, ya masyarakatnya sinikan awam, pendidikannya ya seperti itulah.

S : Apa memang kehabisan waktu untuk kerja dikebun ?

X : Betul, yang pasti itu, ya kerjanya orang ya pagi kebun, sore negal malam itu dijaga takut dimakan babi hutan, siangya juga. Beda dengan kebun lain disini.

S : Bedanya seperti apa Pak ?

X : Kalau PTP itu karyawan asli tidak boleh negal, karena apa karena takut mengganggu pekerjaan jadi mendatangkan orang luar yang dekat kampungannya, kalau sini seumpama tidak boleh negal cuma kebun pasti banyak yang tidak kerasan disini, tidak cukuplah kalau cuma mengandalkan kebun saja, karena kemauannya orang sekarang anak muda sekaranglah beda dengan dulu, tuntutan nya besar sekali. Sepeda motor.

S : Jadi organisasi MPS itu kurang begitu jalan ya ?

X : Tidak jalan

S : Saya kepingin tahu apa pengaruhnya kebun kemasyarakat ini apa memang benar-benar mengikat atau masih ada sela untuk waktu untuk mengembangkan diri itu kira-kira masih ada ?

X : Iya ada selesai jam kerjanya bisakan yang penting pagi kerja kebun

S : Berarti tergantung motivasi masyarakat ?

X : Masyarakatnya sendiri, tapi rata-rata kalau orang sini selepas kebun bertani sambil merawat sapi atau hewan ternaklah, jadi orang sini anak-anaknya beli sepeda motor dari jual sapi dan bertani itu. Bertani sekian hektare, masih babat minta modal ke juragan, ya dengan adanya koperasi kebunlah.

S : Kalau sebagai tokoh masyarakat, sebagai warga yang dituakan dari masyarakat sini, kalau keberlangsungan warga lokal melihat hutan itu ada tidak kira-kira kearifan lokal yang bisa diambil dan dijadikan seperti kaya dijadikan kaya petuah atau cerita rakyat gitu kira-kira ada?

X : Karena begini saya dulunya gini, cuma dituakan kalau seperti itu saya kurang tau karena pendidikan saya dulu minim sekali ya cuma SD lah.

S : Cerita rakyat atau mitos-mitos gitu pernah dengar Pak ?

X : Saya tidak percaya gitu itu

S : Tapi apakah ada ?

X : Ada

S : Ceritanya seperti apa Pak ?

X : Ya itu tadi saya tidak percaya jadi saya juga tidak tahu, kalau cuma katanya saja kan tidak yakin

S : Disini masih ada tidak pak masyarakat yang menggunakan kayu atau obat-obatan masih merambah hutan untuk cari tambahan atau pemasukan ?

X : Begini, kalau masalah itu terus terang kalau merusak hutan tidak boleh, karena kebun dengan taman nasional sudah bagus, jadi terus terang memperbaiki rumah beli ketoko pakai kayu kelapa, disini kan ada kelapa kebun aja pakai kayu kelapa, tetap aja seperti ini, kalau buat masjid atau fasilitas umum sekolah itu boleh menagambil tapi didalam wilayah kebun, kalau di hutan sampai busukpun tidak

berani, pengaruhnya karena dari taman nasional memang tidak boleh, seumpama utuh bambu diminta ijinlah, cuma kalau kayu tidak boleh.

S : Kalau pendampingan Pak, yang paling sering atau yang paling betul mendapampingi masyarakat ini untuk bikin ini itu dari pihak taman nasional atau dari kebun

X : Itu gini kan ada kamitua, itu kamitua yang ngerti maslaah itu, Pak Feri.

S : Terus program kerja sama antara taman nasional dengan kebun yang sekiranya sampai sekarang masih jalan itu apa Pak ?

X : ini kebun mana saja, selain produksi menurun harga juga tak seimbang dengan membayar gaji karyawan, kalau dulu-dulunya taman nasional jalanya rusak minta kekebum, perumahan itu yang saya tahu, terus kalau sekarang entah jalan atau tidak jadi kalau taman nasional butuh tenaga dikasih, seperti ni penegal-penegal penegal yang dari luar, yang kerja kebun itu dpake sama PA umumnya kalau mau ada kegiatan dipantai bersih-bersih, melalui kebun.

S : Jadi sebatas itu kerjasamanya pak. Sebenarnyakan Taman Nasional kepingin menginisiasi agar masyarakat ini supaya merasa hutan ini seperti miliknya sendiri gitu pak.

X : Iya, kemarin seperti ini dulukan ada orang merusak hutan mencari bambu, setiap hari orang sarongan sampai ketemu dikeroyok atau bagaimana, pernah terjadi itu,, tapi akhirnya sekarang karena begini sebagian bukan karyawan kebun tapi keluarganya dikebum, itu kadang-kadang jual, akhirnya dituntut sama orang-orang bawah kalau ini terus saya terus, kalau ini berhenti saya berhenti, akhirnya berhenti untuk kesepakatan.

S : Pernah kejadian seperti itu ya ?

X : Iya bambu, buat betek itukan dibawa membutuhkan lanjaran, tanam cabe, tanam melonkan butuh lanjaran.

S : Kalau ini Pak, kan tadi sempat disinggung mengenai pariwisata, keinginan taman nasional untuk membuka pariwisata yang telah dijelaskan buka premisan, kemudian dan sebagainya anggapan masyarakat yang kurang begitu, sebenarnya kalau misal dilihat secara ekonomi itu apakah bisa, maksudnya dalam artian ini bisa bantu saya tidak sih

X : Sebetulnya ya bisa tapi cuma ya semangatnya yang kurang ya itu tadi udah banyak pekerjaan, jadi tidak punya, umpanya dimusyawarahkan dirundingkan iya iya iya, tapi tidak jalan.

S : Kalau pemudanya Pak ?

X : Iya, sama

S : Pernah terjadi kejadian luar biasa tidak pak dari dalam hutan, sampai mengganggu sistem masyarakat kehidupan sehari-hari ?

X : Tidak pernah, aman, Sukamade ini paling aman segala bidang, sepeda motor baru beli taruh diluar tidak apa-apa , tapi kalau disarongan ya habis.

S : Apa memang keamanan sini termasuk yang paling betul ?

X : Ya begini, karena apa ya satu-satunya jalankan ya cuma itu jadi orang keluar masuk kan dicatat itu, meskipun tidak ditanyai dicatat, kalau orang sini kan sudah paham tiap hari, tapi keluar masuk itu dicatat jam sekian, mobil saya jam sekian keluar, bawa apa itu diperiksa, kalau orang asing pasti ditanyakan masuk, suruh mengisi buku tamu, pernah terjadi dulu orang mencuri sepeda motor, ya kena, gampang caranya, dibawa si A nomernya ini langsung kena

S : Ini sementara say cukupkan dulu Pak mungkin nanti ...

X : Ayo makan dulu aja yok..

S : Wah tidak usah repot-repot Pak

Terkait dengan organisasi MPS pak haji menjelaskan bahwa masyarakat mayoritas memiliki tingkat kesadaran rendah terkait pendidikan dan kemampuan berorganisasi. Jam kerja yang cukup rapat di kebun belum lagi merumput dan berladang membuat MPS tidak berjalan dan tidak dikerjakan. Kemudian karyawan asli atau yang berstatus sebagai pegawai kantor kebun dilarang berladang karena takut mengganggu pekerjaan. Untuk membantu roda perekonomian masyarakat dusun Sukamade terdapat koperasi yang disediakan kebun dan juga membantu masyarakat sekali. Subjek saya atau pak haji ini dalam interview yang saya lakukan terlihat cukup tenang dan terkesan apa yang ingin saya ketahui secara cepat langsung dialihkan. Dibuktikan dengan beberapa pertanyaan saya yang sedikit-sedikit langsung dibalas dengan cepat bahwa kejadian tersebut tidak ada seperti warga masyarakat yang menjadi tersangka kasus pelanggaran oleh pihak taman nasional. Setelah wawancara saya cukupkan, pak haji mengajak saya untuk makan malam, saat itu saya dihidangkan jamuan kopi lalu untuk makan malamnya saya disajikan sayur angka beserta ikan asin dan rempeyek teri. Awalnya saya makan dengan santai akan tetapi godaan dari makanan tersebut terlalu kuat maka saya memutuskan untuk menambah porsi saya. Bisa dibayangkan, kondisi saya yang kelaparan ditambah disajikan makanan dengan nasi hangat dan menu yang cukup menggugah selera saya.